

**Alih Fungsi Guna Lahan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan Peri Urban (Studi
Pengembangan Kawasan Kota Baru Moncongloe
Metropolitan Mamminasata)**

SKRIPSI

Oleh

Wa Ode Hesty Eka Prawira D.

NIM 45 17 042 016



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

**Alih Fungsi Guna Lahan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan Peri Urban (Studi
Pengembangan Kawasan Kota Baru Moncongloe
Metropolitan Mamminasata)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

Wa Ode Hesty Eka Prawira D.

NIM 45 17 042 016

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**ALIH FUNGSI GUNA LAHAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERI URBAN
(STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU
MONCONGLOE METROPOLITAN MAMMINASATA)**

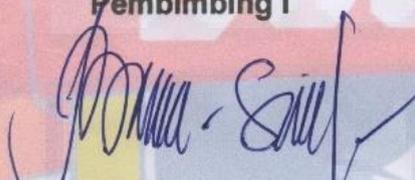
Disusun dan diajukan oleh

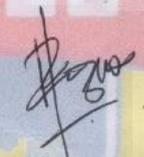
**WA ODE HESTY EKA PRAWIRA D.
NIM. 45 17 042 016**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si
NIDN: 09-130171-03


Rusneni Ruslan, ST., M.Si
NIDN: 09-150386-02

mengetahui :

**Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar**

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**


Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01


Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si
NIDN: 09-170768-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor. A.205/SK/FT/UNIBOS/II/2022 pada tanggal 17 Februari 2022 Tentang Panitia dan Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Akhir Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, maka :

Pada hari/tanggal : Kamis, 17 Februari 2022

Skripsi atas nama : Wa Ode Hesty Eka Prawira D.

NIM : 45 17 042 016

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. Ir. Batara Surya ST., M.Si

Sekretaris : Rusneni Ruslan, ST., M.Si

Anggota : 1. Dr. Ir. Syafri, ST., M.Si

2. Idris Taking, ST., MSP

**Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar**

Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**

Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si
NIDN: 09-170768-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wa Ode Hesty Eka Prawira D.

NIM : 4517042016

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tuliskan/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima segala bentuk konsekuensi/ sanksi atas perbuatan saya.

Makassar, Januari 2022

Yang Menyatakan



Wa Ode Hesty Eka Prawira D.

ABSTRAK

Wa Ode Hesty Eka Prawira D. 2021 “Alih Fungsi Guna Lahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Peri Urban (Studi Pengembangan Kawasan Kota Baru Moncongloe Metropolitan Mamminasata”. Dibimbing Oleh, **Batara Surya dan Rusneni Ruslan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe. Serta untuk merumuskan strategi yang relevan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru.

Variabel yang digunakan terdiri dari 4 (Empat) variabel diantaranya : (1) Aktivitas Tambang Galian Golongan C; (2) Alih Fungsi Guna Lahan; (3) Mobilitas Kendaraan; (4) Penurunan Kualitas Lingkungan. Metode analisis yang digunakan berupa analisis superimpose (*overlay*) / *spasial analisis*. Selanjutnya, mengkaji dan menentukan strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru dengan metode analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai derminan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe. Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis SWOT adalah strategi SO yaitu, memanfaatkan seluruh masyarakat yang ada dengan membentuk lembaga masyarakat Desa Moncongloe guna merealisasikan perda Kabupaten Maros No.16 tahun 2008 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan terkait penataan ruang terhadap aktifitas tambang galian golongan C, Merancang dan mendesain alih fungsi lahan dengan konsep *Green Open Space* terkait pembangunan desa Moncongloe, mengembangkan konsep transportasi bebas hambatan terhadap mobilitas kendaraan, serta memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada untuk pembangunan permukiman yang aman,nyaman,produktif, dan berkelanjutan, untuk menerapkan konsep *green building* yang ramah lingkungan.

Kata Kunci : Pengendalian, Strategi, Aktivitas penambangan, Alih Fungsi Guna Lahan, Desa Moncongloe

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi ummat-Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Alih Fungsi Guna Lahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Peri Urban (Studi Pengembangan Kawasan Kota Baru Moncongloe Metropolitan Mamminasata)”**. Penelitian ini berisikan tentang indikator alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru moncongloe.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Wa Ode Haida dan Ayahanda Darmin yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah S.W.T senantiasa melimpahkan

rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak **Dr. Ridwan, ST., M.Si** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak **Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si** selaku pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Rusneni Ruslan, ST., M.Si** selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak **Dr. Ir. Syafri M.Si** selaku penasihat akademik yang setiap semester selalu memberikan arahan akademik kepada penulis.
7. Saudara tercinta **La Ode Muh. Rajab, La Ode Aqil Falih, dan La Ode Dzuljalali Wal Ikram** serta seluruh keluarga atas do'a, dukungan dan motivasinya yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini.
8. Saudara-Saudari **Nahari Asra Sani, Israyanti, Nur Asmi Amir, Marwah, Afifah Suyadi, Apris Sural Jayadi, Muhajirin Muhid, Eza Anugrah, Muhammad Imam Hijir dan M.Ari Ahmad** yang menemani berdiskusi pada saat penulis menyusun penelitian ini.
9. Seluruh sahabat dan saudara-saudari seperjuangan **PWK 2017 (GRID)** yang selalu memberikan semangat, kritikan, dan dukungan serta bantuan kepada penulis.
10. Seluruh **keluarga Besar Lanoilo** yang telah memberikan kritikan dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan beserta isinya. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini kedepannya.

Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Januari 2022

Penulis



Wa Ode Hesty Eka Prawira D

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN PENERIMAAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Landasan Teori..... | 13 |
| B. Pengertian Pertambangan..... | 39 |
| C. Pengelolaan Pertambangan | 44 |

| | |
|--|-----------|
| D. Pengertian Lahan | 47 |
| E. Pengertian Alih Fungsi Guna Lahan (Konversi Lahan).. | 49 |
| F. Dampak Konversi Lahan di Wilayah Peri-Urban..... | 51 |
| G. Pengaruh Transportasi Terhadap Perkembangan Wilayah Periurban..... | 56 |
| H. Pengertian Pemanfaatan Lahan | 60 |
| I. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan | 62 |
| J. Perencanaan Landscap Pasca Tambang..... | 64 |
| K. Kota Berkelanjutan | 67 |
| L. Dasar Hukum Alih Fungsi Guna Lahan | 68 |
| M. Kedudukan Moncongloe Dalam Konteks Mamminasata | 70 |
| N. Penelitian Terdahulu..... | 70 |
| O. Kerangka Pikir | 73 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 76 |
| A. Jenis Penelitian..... | 76 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 77 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 78 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 80 |
| E. Variabel Penelitian..... | 82 |
| F. Metode Pengolahan dan Analisis Data..... | 83 |
| G. Definisi Operasional Variabel..... | 93 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | 96 |
| | A. Gambaran Umum Kabupaten Maros..... | 96 |
| | B. Gambaran Umum Kecamatan Moncongloe..... | 105 |
| | C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 109 |
| | D. Hasil Survei dan Pembahasan | 134 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 166 |
| | A. Kesimpulan | 166 |
| | B. Saran | 168 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 3.1. | Schedule Pelaksanaan Peneliti/ Skripsi | 78 |
| Tabel 3.2. | Sumber Data Penelitian | 79 |
| Tabel 3.3. | Unsur Keterkaitan Variabel dan Indikator yang diukur | 83 |
| Tabel 3.4. | Model Penentuan Indikator Komponen SWOT | 87 |
| Tabel 3.5. | Internal Strategy Factor Analysis (IFAS) | 90 |
| Tabel 3.6. | Nilai Skor IFAS..... | 90 |
| Tabel 3.7. | Nilai Skor Internal Strategi Factor Analisis (IFAS) | 91 |
| Tabel 3.8. | Nilai Skor EFAS | 91 |
| Tabel 3.9. | Matriks Strategi SWOT | 93 |
| Tabel 4.1. | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 | 97 |
| Tabel 4.2. | Rata-rata dan kelembapan udara menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2020 | 99 |
| Tabel 4.3. | Jumlah Curah Hujan dan Hari Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2020 | 100 |
| Tabel 4.4. | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 | 101 |
| Tabel 4.5. | Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020..... | 102 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabel 4.6. | Banyaknya Sertifikasi Tanah yang dikeluarkan menurut Kecamatan dan Jenis Hak Tanah Tahun 2019 | 104 |
| Tabel 4.7. | Keadaan Geografis Kecamatan Moncongloe Tahun 2019 | 105 |
| Tabel 4.8. | Luas Wilayah Kecamatan Moncongloe Tahun 2020 | 106 |
| Tabel 4.9. | Jumlah RT, RW, Dusun dan Blok Sensusu di Kecamatan Moncongloe Tahun 2020 | 107 |
| Tabel 4.10. | Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kecamatan Moncongloe Tahun 2020 | 108 |
| Tabel 4.11. | Penggunaan Lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun 2021 | 126 |
| Tabel 4.12. | Panjang jalur transportasi di Kecamatan Moncongloe | 129 |
| Tabel 4.13. | Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun 2010-2015..... | 140 |
| Tabel 4.14. | Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun 2015-2021 | 143 |
| Tabel 4.15. | Strategi Internal..... | 160 |
| Tabel 4.16. | Nilai Skor IFAS..... | 160 |
| Tabel 4. 17. | Strategi Eksternal..... | 161 |
| Tabel 4. 18. | Strategi Eksternal..... | 162 |
| Tabel 4. 19. | Nilai Skor EFAS | 162 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|-----|
| Gambar 2.1. | Kerangka Pikir | 75 |
| Gambar 3.1. | Kuadran Swot | 92 |
| Gambar 4.1. | Peta Administrasi Kabupaten Maros | 98 |
| Gambar 4.2. | Peta Administrasi Kecamatan Moncongloe | 106 |
| Gambar 4.3. | Peta Administrasi Desa Moncongloe Bulu..... | 110 |
| Gambar 4.4. | Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2010..... | 112 |
| Gambar 4.5. | Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2015..... | 113 |
| Gambar 4.6. | Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2021..... | 114 |
| Gambar 4.7. | Peta Kondisi Topografi desa Moncongloe Bulu | 116 |
| Gambar 4.8. | Peta Kemiringan Lereng Desa Moncongloe Bulu | 117 |
| Gambar 4.9. | Peta Geologi Desa Moncongloe Bulu..... | 120 |
| Gambar 4.10. | Peta Jenis Tanah Desa Moncongloe Bulu..... | 121 |
| Gambar 4.11. | Peta Hidrologi Desa Moncongloe Bulu | 123 |
| Gambar 4.12. | Peta Kondisi Curah Hujan Desa Moncongloe Bulu | 124 |
| Gambar 4.13. | Peta Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu | 127 |
| Gambar 4.14. | Kondisi Tambang Galian Golongan C | 131 |
| Gambar 4.15. | Aktivitas Truk Pengangkut hasil tambang..... | 132 |
| Gambar 4.16. | Peta Lokasi Tambang Galian C..... | 133 |
| Gambar 4.17. | Peta penggunaan lahan desa Moncongloe Bulu Tahun 2010..... | 137 |

| | | |
|--------------|--|-----|
| Gambar 4.18. | Peta Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu Tahun 2015 | 138 |
| Gambar 4.19. | Peta Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu Tahun 2021 | 139 |
| Gambar 4.20. | Peta perubahan penggunaan lahan Desa Moncongloe Bulu tahun 2010-2015..... | 142 |
| Gambar 4.21. | Peta Perubahan Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu Tahun 2015-2021..... | 144 |

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata memiliki peranan sangat penting yaitu sebagai pintu gerbang Indonesia bagian timur berskala internasional. Mamminasata adalah akronim dari empat nama kota/kabupaten: Maros, Makassar, Sungguminasa dan Takalar. Tetapi makna mamminasata kemudian berkembang bukan lagi sebagai sebuah akronim tetapi istilah untuk sebuah pengembangan kota dan pembangunan infrastruktur jalan yang berbasis pada empat kabupaten kota yang terintegrasikan menjadi sebuah kota besar Mamminasata. Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Kawasan Mamminasata sebagai kawasan Metropolitan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sehingga prioritas pembangunan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pembangunan kawasan Mamminasata itu sendiri. Konsep pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang Metropolitan Mamminasata membagi kawasan perkotaan yang meliputi kota inti, sub-sub pusat kota dan beberapa kota-kota satelit, merupakan suatu pendekatan di dalam mengarahkan ruang kawasan Metropolitan Mamminasata yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan urban fringe dari kota tersebut, dimana

semuanya membentuk satu kesatuan sistem dalam pelayanan penduduk wilayah metropolitan agar tercipta suatu ruang yang dinamis dan proporsional dalam konsep ruang yang terpadu, berhirarki, dan harmonis sehingga mempermudah pengembangan suatu wilayah. Menurut Friedman (1984) pembentukan hirarki suatu wilayah dapat mempermudah pengembangan sistem pembangunan, Friedman berpendapat bahwa dengan adanya pusat pertumbuhan akan lebih memudahkan dan pembangunan akan lebih terencana.

Pengembangan sistem pembangunan suatu wilayah ditandai oleh perkembangan kota-kota yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan segala kegiatan, akan senantiasa tumbuh dan berkembang serta mengalami perubahan fungsi ruang baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Menurut Charles Colby, 1993 (dalam Yunus, 2000: 177) mengemukakan bahwa dari waktu ke waktu kota berkembang secara dinamis. Perkembangan (fisik) ruang merupakan perwujudan spasial dari penambahan penduduk sebagai akibat dari meningkatnya proses urbanisasi maupun proses alamiah, sehingga mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan ruang kekotaan yang besar namun ketersediaan ruang terbatas. Terbatasnya ruang pada pusat kota menjadikan nilai ekonomi akan lahannya meningkat. Meningkatnya harga tanah di kota besar menyebabkan keberadaan kawasan permukiman di pusat kota telah beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, perdagangan dan jasa,

tempat hiburan dan lainnya, sementara dikawasan pinggiran kota terjadi alih fungsi guna lahan menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan industry secara besar-besaran dan tidak terkendali (Surya, 2018).

Kota Satelit yang dikembangkan dalam konsep Metropolitan Mamminasata adalah pembangunan kota baru Moncongloe yang fungsi utama kawasan kota baru adalah transportasi, perdagangan jasa, RTH, permukiman dan rekreasi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros tahun 2012-2032 disebutkan bahwa Kecamatan Moncongloe merupakan kota satelit KSN (Kawasan Strategis Nasional) Perkotaan Mamminasata bagian timur, sebagai kawasan permukiman baru kawasan strategis Moncongloe, kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor bypass Mamminasata dan kawasan perdagangan. Kecamatan Moncongloe memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Maros. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kecamatan Moncongloe tahun 2011 sebanyak 17.314 jiwa, kemudian bertambah 2.303 jiwa menjadi 19.617 jiwa pada tahun 2019 (Kabupaten Maros dalam angka 2012 dan Kabupaten Maros dalam angka 2020). Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh tingkat urbanisasi dan angka kelahiran yang tinggi sehingga mengakibatkan munculnya berbagai aktivitas masyarakat yang berdampak pada perubahan pemanfaatan ruang karena semakin meningkatnya tingkat kebutuhan

akan lahan Kota Makassar. Secara positif pembangunan kawasan Kota Baru Moncongloe tidak terlepas dari pengaruh fungsi dan peran kota Makassar sebagai Kota Inti dalam wilayah Metropolitan Mamminasata.

Perkembangan Kota Baru Moncongloe yang pada awal pertumbuhannya mempunyai bentuk yang kompak dalam skala wilayah yang kecil kemudian meluas. Selain itu perubahan bentuk morfologi kota yang terbentuk terindikasi pada perkembangan Kota baru Moncongloe sehingga berimplikasi pada perluasan area perkotaan akibat kebutuhan lahan akan permukiman yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan secara skala besar sehingga mengarah pada daerah-daerah yang ketersediaan lahannya tersedia dan masih dominan dengan fungsi lahan pertanian yang mengarah pada *rural-urban fringe*, yaitu daerah peralihan penggunaan lahan, yang ditandai oleh transisi yang tetap dari pertanian ke non pertanian.

Pola perkembangan kawasan Kota Baru Moncongloe akibat perluasan area perkotaan Metropolitan Mamminasata yang dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, industrialisasi, serta proses urbanisasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sentrifugal yaitu gerakan penduduk dan fungsi-fungsi yang berasal dari bagian dalam sesuatu wilayah menuju bagian luarnya (Yunus, 2008). Variasi kondisi lingkungan terkait dengan spesifikasi lingkungan kekotaan di satu sisi dan spesifikasi lingkungan kedesaan disisi lain. Bila dikondisikan mengarah pada fungsi kekotaan

berasosiasi secara spasial dengan kondisi kedesaan, secara tidak langsung sifat perdesaan akan mengarah ke sifat perkotaan baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Yang terjadi pada penggunaan lahan di Desa Moncongloe Bulu pada tahun 2016 menurut data pemerintah desa mengalami penambahan luas lahan permukiman pada kawasan kota baru Mocongloe dengan luasan untuk pengembangan kawasan permukiman 1.119,55 Ha yaitu 33,16% dari luasan kawasan. Selain itu perkembangan fungsi-fungsi aktivitas kota (aktivitas perdagangan, sosial, wisata, dan perkantoran) bertambah. Selain itu terjadi transformasi spasial yaitu hilangnya lahan pertanian dari luasan 2.838.73 Ha menjadi 1.726,54 Ha. Transformasi spasial terhadap kondisi lingkungan WPU akan ditekankan pada (1) dampak terhadap bentuk pemanfaatan lahan, (2) dampak terhadap harga lahan, (3) dampak terhadap lingkungan, (4) dampak terhadap spekulasi lahan (Yunus, 2008).

Apabila dikondisikan pada keadaan eksisting kawasan kota baru Moncongloe yang mempolakan perkembangan aktivitas permukiman dan perdagangan yang awalnya merupakan fungsi pertanian dengan kata lain akan terjadinya alih fungsi guna lahan dari fungsi pertanian (agraris) ke lahan fungsi non pertanian (fungsi industrial perkotaan). Yunus (2008) menyebutkan transformasi spasial terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian adalah hilangnya lahan pertanian, gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian serta produksi dan produktivitas.

Alih Fungsi Guna Lahan yang sedang terjadi di Kecamatan Moncongloe adalah berubahnya fungsi guna lahan pertanian yang akan menjadi industri dan perumahan atau permukiman serta terdapat galian golongan C di beberapa kawasan tersebut. Salah satu daerah di Kecamatan Moncongloe terkait fenomena ini adalah di Desa Moncongloe Bulu. Para petani ataupun masyarakat di sana lebih memilih mengkonversikan lahan mereka disebabkan faktor keadaan sosial ekonomi dan mempertimbangkan kondisi geofisik lahan. Selain itu dengan meningkatnya pertumbuhan wilayah maka mulai adanya investor yang datang untuk membangun perusahaan. Banyak juga yang merelakan lahan mereka ke investor karena tergiur dengan janji yang diberikan oleh investor. Melihat kondisi tersebut, logikanya alih fungsi guna lahan diartikan sebagai mengalihkan sumber penghasilan petani atau bahkan menghilangkan pekerjaan petani dan lebih memilih bekerja ke sekitar daerah tambang galian tipe C.

Pada Kawasan Peri Urban yang berada pada Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dimana masyarakat dominan bermukim disekitar kawasan penambangan tentu saja merasakan dampak dari penambangan galian golongan C ini. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang antisipatif dalam meminimalisir dampak dari tambang galian tipe C dengan menyiapkan langkah antisipasi dari sekarang sehingga tidak terjadi penurunan kualitas

lingkungan. Serta alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe perlu diatasi. Kesiapan menghadapi situasi akan menjadi solusi paling bagus untuk mengatasi dampak dari tambang galian golongan C. Terlebih, wilayah periurban adalah wilayah yang paling penting di jaga kelestariannya . Penambangan galian golongan C perlu diatasi sehingga dampak negatif dari penambangan dapat berkurang. Upaya dalam menangani penambangan galian golongan C didasarkan pada beberapa pendekatan yang kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena ini menarik untuk dapat diteliti yaitu Alih Fungsi Guna Lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan serta bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru. selain itu perlunya peran Pemerintah Kabupaten Maros selaku pengelola Kabupaten dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang guna mengurangi kerentanan yang terjadi serta diperkuat dengan Visi-Misi Kabupaten Maros yaitu “MAROS LEBIH SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BAIK “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe ?
2. Bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan Kota Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe.
2. Untuk merumuskan strategi yang relevan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari dilakukannya penelitian mengenai alih fungsi guna lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan peri urban studi kasus Desa Moncongloe Bulu Kabupaten Maros ini adalah :

1. Bidang Akademik : Terkait dengan bidang akademik perencanaan wilayah dan kota, penelitian ini bermanfaat untuk semakin memperdalam pemahaman tentang kajian terkait adanya aktifitas pertambangan terhadap perubahan kondisi bentuk pemanfaatan lahan masyarakat di Desa Moncongloe Bulu, Kabupaten Maros, dan kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneruskan penelitian ini.

2. Bidang Pemerintah : Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam pembangunan selanjutnya.

3. Masyarakat : Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang dampak pemanfaatan lahan sekitar setelah adanya aktivitas tambang di Desa Moncongloe Bulu Kabupaten Maros.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang mendalam dan akurat serta dengan melihat keterbatasan waktu yang ada maka dilakukan pembatasan lingkup penelitan. Ruang lingkup dari pembahasan ini adalah Pengendalian Pemanfaatan ruang wilayah peri

urban terkait alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe yang meliputi:

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
2. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui alih fungsi guna lahan yang terjadi akibat adanya tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe.
3. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui strategi dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru
4. Penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi dampak adanya penambangan pada wilayah peri urban secara efektif dan efisien sehingga menjaga keberlanjutan sumberdaya alam maupun buatan serta keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini di bagi ke dalam lima Bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kajian teoritis yang terdiri dari landasan teori dari para ahli seperti definisi pertambangan, pengelolaan pertambangan, pengertian lahan, pengertian alih fungsi guna lahan, pengertian perubahan penggunaan lahan (konversi lahan), dampak konversi lahan di wilayah peri-urban, pengaruh transportasi terhadap perkembangan wilayah periurban, pengertian pemanfaatan lahan, konsep pola pemanfaatan lahan, perencanaan landscape pasca tambang, kota berkelanjutan, dasar hukum alih fungsi guna lahan, kedudukan Moncongloe dalam konteks Mamminasata, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis dan definisi operasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Gambaran Umum Kabupaten Maros Kecamatan Moncongloe secara makro dan mikro, Tinjauan Lokasi Studi, analisis alih fungsi guna lahan dan tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru serta membahas mengenai strategi pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kawasan kota baru Moncongloe.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Ada banyak pendekatan dalam proses perencanaan setiap pendekatan tersebut memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan salah satunya kota yang ramah lingkungan. Kota yang ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai metafora yang mencakup berbagai persoalan ekologi perkotaan yang bertujuan untuk mencapai kota yang Sustainable. Pendekatan ini mengusulkan berbagai kebijakan lingkungan, sosial, dan kelembagaan yang diarahkan untuk mengelola ruang kota agar berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan dan menekankan pada pengelolaan lingkungan melalui serangkaian proses perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. *Eco-City* dijelaskan sebagai kota yang menyediakan standar hidup yang dapat diterima masyarakat tanpa menguras ekosistem dan lingkungan di mana ia bergantung.

Ketika kota layak huni digambarkan sebagai sistem perkotaan yang berkontribusi pada aspek kesejahteraan fisik, sosial dan mental, serta perkembangan pribadi seluruh masyarakat didalamnya, pendekatan ini adalah tentang melaksanakan penataan ruang kota yang dapat pula memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang

terdapat pada pendekatan ini adalah kesetaraan, martabat, aksesibilitas, keramahan, partisipasi dan pemberdayaan. (Hosam K. El Ghorab , Heidi A. Shalaby, 2015)

1. Teori MC.Gee (1991)

Mc. Gee (1991, dalam Giyarsih 2009) menjelaskan bahwa konsep desa kota digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang berada di sekitar kota yang ditandai oleh adanya percampuran yang sangat intens mengenai kegiatan pertanian dan non pertanian. Wilayah yang disebut desakota tersebut terletak antar kota-kota besar yang ada dan membentang sepanjang koridor antar kota-kota besar.

Menurut Mc.Gee (1991) yang dimaksud desakota adalah sebuah proses munculnya wilayah yang berciri khusus dalam kegiatan pertanian dan nonpertanian yang ditandai dengan tingginya interaksi antara manusia dan komoditas diantara inti kota yang menimbulkan perubahan ekonomi dan pengembangan teknologi. Wilayah ini dikarakteristikkan sebagai wilayah yang padat yang muncul di daerah pertanian yang didominasi oleh pertanian lahan basah. Wilayah ini muncul akibat adanya kegiatan di kota inti yang terus berkembang kearah luas mendekati desa dan kota yang berada disekitarnya dan akhirnya wilayah yang berada diantara desa dan kota ini mengalami pertumbuhan yang lebih pesat sebagai akibat

dari pengaruh yang diberikan oleh kota inti. Daerah desakota pada umumnya terletak di sepanjang koridor antara pusat kota besar dan koridor tersebut berlokasi di sepanjang jalur-jalur transportasi utama (Koestar, 1995). Hasil penelitian Mc. Gee di negara-negara Asia, termasuk Indonesia mempertegas kecenderungan tersebut. Pertumbuhan kota proses terbentuknya desakota diantara dua kota mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sistem kota-kota. Proses ini diawali dengan adanya dua kota yang dihubungkan oleh jalur transportasi yang efektif. Konsekuensi adanya transportasi yang efektif adalah kawasan koridor antara kedua kota tersebut mengalami perkembangan yang relatif lebih pesat dibandingkan areal yang jauh dari jalur transportasi (Mc. Gee, 1991; Douglas, 1996). Mc. Gee (1991) mengungkapkan bahwa wilayah yang paling mungkin berkembang dalam struktur sistem kota adalah wilayah di antara dua kota besar dan wilayah pertanian dengan kepadatan tinggi yang berdekatan dengan kota besar.

Kawasan koridor diantara dua kota merupakan bentuk ekspresi wilayah yang mengalami desakotasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut (Suhardjo, 1999) :

- a) Meningkatnya pekerjaan nonpertanian di wilayah yang semula bercorak pertanian.

- b) Meningkatnya mobilitas penduduk sebagai akibat tersedianya fasilitas transportasi.
- c) Terjadinya penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya lahan bercorak campuran antara pertanian, industri kecil, industri besar secara berdampingan dengan berbagai dampak lingkungan.
- d) Meningkatnya partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi nonpertanian.
- e) Merupakan wilayah transisi yang belum tersentuh peraturan perundangan kota, meskipun secara fisik sudah wujud kota.

Pada awalnya wilayah desakota merupakan wilayah pertanian yang sangat padat penduduknya yang nyaris semuanya berkegiatan disektor pertanian. Namun demikian perlu dipahami bahwa kegiatan pertanian tidak harus identic dengan kegiatan budidaya sawah. Dengan demikian makin intensnya penjalaran ide-ide baru, inovasi yang berwujud nilai-nilai baru dan teknologi mengakibatkan penduduk diwilayah yang semula berkegiatan agraris tersebut mulai menganekaragamkan atau diversivikasi kegiatannya dengan tujuan memperoleh tambahan penghasilan. Peranan kota-kota besar menjadi bertambah signifikan bagi penduduk di wilayah desakota tersebut sejalan dengan makin baiknya prasarana dan sarana transportasi dari dan ke kota. Wilayah desakota merupakan wilayah yang telah mengalami pengaruh yang intensif dari kegiatan

nonpertanian, sehingga di dalamnya terlihat percampuran antara kegiatan pertanian maupun nonpertanian. Intensitas percampuran antara kegiatan pertanian dan nonpertanian merupakan fungsi jarak ke kota. Makin dekat jarak suatu lokasi ke kota maka makin intens kegiatan kekotaannya/kegiatan nonpertaniannya, dan begitu pula sebaliknya makin jauh dari kota makin intens kegiatan pertaniannya (Yunus, 2008).

Proses urbanisasi di pinggiran kota besar terjadi lebih cepat dibandingkan di kota besar itu sendiri. Fenomena ini diperkenalkan dalam konsep kotadesasi yang dikembangkan oleh Mc Gee. Menurut Mc.Gee (1991), Istilah KOTADESASI adalah kawasan antara rural dan urban tidak dikategorikan hanya berdasarkan keruangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor kepadatan, permukiman, pekerjaan, sektoral dan kategori rumah tangga.

2. Teori Gunnar Myrdal tentang Dampak Pengurasan (*Backwash Effect*) (1957)

Pada tahun 1957, Gunnar Myrdal melontarkan tesis tentang keterbelakangan yang terjadi di negara berkembang. Menurut Myrdal adanya hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang justru menimbulkan ketimpangan internasional dalam pendapatan per kapita dan kemiskinan di negara berkembang.

Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu dia memakai ide "dampak balik dan dampak sebar". Dia mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan. Sedangkan dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya.

Menurut Myrdal di dalam Sukirno (2007:126) menilai bahwa keterbelakangan negara-negara sedang berkembang (NSB) dapat dijelaskan dengan model sebab akibat kumulatif. Model sebab akibat kumulatif merupakan pembangunan di daerah yang lebih maju akan menyebabkan beberapa masalah dan kendala yang menimbulkan adanya hambatan yang lebih besar atau tinggi bagi daerah-daerah yang masih berkembang atau terbelakang. Ketimpangan pembangunan memiliki beberapa dampak yang bisa dikelompokkan menjadi *backwash effect* dan *spread effect*.

a) Backwash Effect

Dalam konsep *backwash effect*, pembangunan pada daerah yang maju akan menyebabkan hambatan yang jauh lebih besar daripada daerah yang masih terbelakang. Hal ini yang pertama disebabkan karena adanya corak perpindahan penduduk yang

terdidik dan produktif yang berpindah ke daerah yang lebih maju. Kedua disebabkan karena adanya corak aliran modal yang lebih terjamin di daerah yang lebih maju sehingga semakin berkurangnya aliran dan permintaan modal di daerah yang berkembang atau miskin. Dan yang terakhir disebabkan oleh adanya jaringan transportasi yang lebih baik di daerah atau wilayah yang lebih maju daripada daerah yang masih berkembang.

b) Spread Effect

Dalam konsep *spread effect*, perkembangan pembangunan daerah-daerah yang lebih maju mampu mendorong perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang miskin atau berkembang. Dengan adanya permintaan dari daerah yang lebih maju terhadap bahan-bahan hasil produksi pada daerah yang miskin atau berkembang. Permintaan-permintaan yang dibutuhkan daerah maju tersebut mencakup barang hasil pertanian, hasil industri barang konsumsi dan barang industri rumah. Dari kedua teori di atas jika laju *spread effect* dikatakan lebih rendah daripada laju *backwash effect nya*, maka akan menyebabkan jurang kesejahteraan daerah yang kaya dengan daerah yang berkembang atau miskin. Jurang pembangunan dapat mengecil kembali jika daerah kaya semakin berkembang sehingga

menimbulkan disekonomi eksternal pada berbagai perusahaan dan industri yang timbul akibat adanya kongesti-kongesti yang terjadi pada daerah-daerah yang maju. Kondisi disekonomi eksternal menimbulkan pengurangan arus perpindahan penduduk dan aliran modal yang mampu menghapuskan perbedaan tingkat pembangunan antar daerah yaitu daerah yang maju dan daerah yang berkembang.

Gunnar Myrdal menyoroti ketimpangan spasial (*spatial inequalities*) yang melekat pada model pembangunan ekonomi yang menekankan pasar bebas. Hal ini dapat dilacak dalam karyanya yang berjudul "*Economic Theory and Underdeveloped Regions*". Namun tidak seperti Hirschman, Myrdal tidak percaya bahwa polarisasi spasial secara otomatis akan reversed ketika pembangunan ekonomi mencapai suatu level tertentu. Menurutnya, manakala suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi maka akan ada penarikan sumber daya manusia, risorsis, dan dana ke daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan selanjutnya. Dengan demikian terjadi penipisan kontribusi orang dan risorsis pada pembangunan di wilayah atau daerah lainnya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai "*backwash effects*". Menurut Myrdal, ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya *backwash effect* yaitu:

- 1) Pola perpindahan penduduk atau imigrasi dari Negara miskin ke Negara yang lebih maju
- 2) Pola aliran modal yang terjadi menurut Myrdal, ada tiga hal yang menyebabkan suatu negara miskin mengalami kesulitan dalam mengembangkan pasar atas hasil-hasil industrinya, sehingga memperlambat perkembangan ekonomi di daerah tersebut yaitu kurangnya ketersediaan modal di negara miskin, adanya kecenderungan bahwa modal lebih terjamin dan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di negara yang lebih maju, pola perdagangan didominasi oleh industri-industri di negara-negara yang lebih maju.
- 3) Jaringan transportasi yang lebih baik di negara-negara yang lebih maju.

Gunnar Myrdal juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-akibat sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal dibelakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Adapun faktor utama yang menyebabkan

ketimpangan ini adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pasar yang luas dan konsentrasi modal keuangan di negara maju dan hal-hal tersebut sangat berbeda jauh dengan kondisi di negara berkembang. Kemakmuran kumulatif timbul di negara maju dan kemiskinan kumulatif dialami rakyat di negara miskin. Dengan perkataan lain, hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin menimbulkan efek balik (*backwash effect*) yang cenderung membesar terhadap negara miskin. Kesimpulan teori Gunnar Myrdal bahwa upaya untuk memberantas kemiskinan di negara berkembang harus dilakukan dengan campur tangan pemerintah terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas. Kemudian tentang teori keunggulan komparatif yang digunakan oleh ahli ekonomi neoklasik tidak dapat dijadikan petunjuk untuk proses alokasi sumber-sumber ekonomi. Harus ada perlindungan atas industri-industri rakyat yang belum berkembang dari persaingan dengan luar negeri. Pembangunan di negara-negara maju akan menyebabkan keadaan yang dapat menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi negara-negara yang terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Keadaan yang dapat menghambat pembangunan ini disebut sebagai *backwash effect*. Kemudian,

keadaan yang dapat mendorong pembangunan di negara yang lebih miskin disebut *Spread Effect*.

Bagi Myrdal, satu-satunya cara untuk mengurangi efek dari spatial inequalities adalah melalui intervensi pemerintah. Menurutnya, apabila perencanaan pemerintah lebih efisien maka tidak perlu ada variasi wilayah dalam angka pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, ia menyadari sepenuhnya bahwa dalam banyak situasi pemerintah dalam banyak negara tidak mampu mencapai hal tersebut (Myrdal 1970). Menurutnya perlu adanya *strong states* untuk menjamin agar mekanisme perencanaan dapat diimplementasikan yang menjadi keyakinan Myrdal mengenai perencanaan sebagai suatu solusi bagi “masalah-masalah pembangunan”.

3. Teori John Friedmann tentang Daerah Inti (Core Region) dan Daerah Pinggiran (Periphery Region) (1964)

John Friedmann (1964) menganalisis aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedmann telah menampilkan teori daerah inti. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran. Daerah inti atau core region dan daerah pinggiran atau periphery region. Daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah pedalaman atau daerah sekitarnya.

Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinu tetapi kumulatif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke bawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah. Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Daerah inti dan daerah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spasial. Kemajuan pembangunannya ditentukan oleh lembaga-lembaga daerah inti, bahwa daerah-daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang substansial.

Proses daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah pinggiran, yang terdiri dari pengaruh dominasi (menguatnya perekonomian di daerah inti sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya alam, manusia dan modal ke daerah inti), pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan

inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi (penciptaan struktur balas jasa dan menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif).

Pada umumnya daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsinya yang khusus, misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibukota pemerintahan, dan sebagainya. Sehubungan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan spasial (ke-tata-ruangan), Friedmann mengemukakan lima buah preposisi utama, yaitu sebagai berikut:

- a) Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan (*interrelationship dan interdependency*) daerah-daerah di sekitarnya melalui sistem suplai, pasar dan daerah administrasi.
- b) Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan inovasi ke daerah-daerah di sekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.
- c) Sampai pada suatu titik tertentu ciri *self reinforcing* pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial, akan tetapi mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran pembangunan daerah inti kepada daerah-daerah di sekitarnya tidak berhasil

ditingkatkan, sehingga keterhubungan daerah-daerah di sekitarnya terhadap daerah inti menjadi berkurang.

d) Dalam suatu sistem spasial, hirarki daerah inti ditentukan berdasar pada kedudukan fungsionalnya masing-masing meliputi karakteristiknya secara terperinci dan prestasinya.

e) Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

4. Pemikiran David Harvey tentang Alokasi Ruang dan Lahan (1973)

Perubahan spasial kota akan selalu terkait dengan pembentukan struktur ruang dan pola ruang kekotaan, yang mendorong berlangsungnya proses perubahan sosial. Proses pembentukan struktur ruang kota bertitik tolak dari keberadaan “ekonomi kapitalis”, di mana proses dan hubungan fungsional yang ada di dalam kota merupakan produk dari sistem ekonomi kapitalis itu sendiri. Dengan mengadopsi konseptualisasi Neo-Marxis untuk membahas struktur keruangan kota yang mempengaruhi perubahan sosial, pertama kali dilakukan oleh Harvey pada tahun 1973 dalam bukunya “*Social Justice in The City*”. Mekanisme-mekanisme alokasi lahan di dalam kota kepada individu-individu yang didasarkan atas pendapatannya (Harvey, 1973). Kondisi pemilikan lahan oleh kelompok elit perkotaan menyebabkan perubahan variasi sewa lahan

dan menciptakan ruang secara struktural dikaitkan dengan pola penggunaan lahan. Pemikiran Marxis menganggap, bahwa para kapitalis merencanakan kebijakannya berdasarkan atas pertimbangan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya di dalam sistem produksinya. Akibatnya mereka berusaha untuk menekan upah para pekerja pada sejumlah tertentu yang dianggap cukup hanya untuk mempertahankan hidup (*just sufficient to sustain life*) dan untuk mereproduksi pekerja-pekerja yang lebih banyak untuk generasi mendatang. Nilai yang dihasilkan oleh para pekerja ini disebut nilai lebih/tambah (*surplus value*). Nilai inilah yang menjadi dasar sumber keuntungan dan kekayaan masyarakat. Seperti diketahui bahwa tersedianya lahan di daerah perkotaan sangat terbatas dan oleh karenanya maka lahan tersebut mempunyai nilai ekonomi (*economic value*). Di dalam studi ekonomi, dikenal ada 2 macam pengukuran nilai, yaitu (1) nilai guna (*use value*) dan (2) nilai jual/tukar (*exchange/market value*). Nilai guna adalah suatu nilai yang timbul dari komoditi itu sendiri dalam proses ekonomi dan nilai jual adalah suatu nilai yang timbul dari komoditi itu apabila dijual. Apabila kedua macam nilai tersebut diterapkan untuk lahan kota maka akan timbul karakteristik-karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik lahan tersebut adalah: (1) lahan tidak mengalami pemindahan tangan (hak/penguasaan) dalam waktu yang singkat

sehingga pada saat seseorang/pihak tertentu menguasainya, mereka dapat menikmati kegunaan lahan tersebut dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menyewakannya, mengontrakkannya pada pihak lain, (2) lahan adalah suatu properti yang tidak bergerak dan tertentu sifatnya sehingga apabila terjadi pembelian lahan maka akan menjadikan si pemilik memegang hak-hak monopoli atasnya (3) lahan dan atau segala perbaikan-perbaikan di atasnya dapat berfungsi sebagai komoditi, dimana akan menjadikan pemiliknya mempunyai posisi ekonomi yang lebih kuat dibanding dengan yang tidak mempunyai. Makin banyak mempunyai lahan (makin luas pemilikan lahan) akan makin kuat posisi ekonominya (dengan asumsi bahwa semua jenis dan tipe lahan mempunyai harga yang seragam persatuan luas tertentu).

Baik nilai tukar lahan (*exchange value of land*) maupun pemilikan lahan (*land ownership*) ditentukan oleh persaingan dalam penawaran. Harvey (1973) mengatakan proses persaingan penawaran untuk bidang-bidang lahan tertentu di dalam kota, makin tinggi "*income*" nya makin tinggi kemampuan penawarannya dan makin tinggi pula kesempatan memperoleh lahan-lahan terbaik sedang makin rendah pendapatannya akan mengalami hal yang sebaliknya. Bagi mereka yang tidak ada kesempatan memperoleh lahan karena penghasilannya terlalu rendah, maka golongan ini

terpaksa harus “menyewa” dari golongan yang mempunyai lahan. Di sinilah letak kekhasan nilai lahan kota di dalam pendekatan marxist ini, di mana didalam proses penguasaan yang berlanjut, bahwa biaya relatif atas ruang di dalam kota akan rendah bagi golongan berpenghasilan tinggi, dan akan tinggi bagi golongan berpenghasilan rendah. Penjelasan tentang peranan sewa inilah yang merupakan pembeda utama antara pendekatan Marxist dan non Marxist untuk analisis kota. Bagi pendekatan non-Marxist, sewa lahan merupakan produk di mana penggunaan lahanlah yang menetapkan besar kecilnya sewa lahan. Pendekatan Marxist berpandangan sebaliknya, di mana sewa lahanlah yang akan menentukan corak penggunaan lahannya. Dalam bersaing untuk menyewa ruang di dalam kota, industrialis maupun kepala-kepala rumah tangga menetapkan penawarannya dalam hubungannya dengan struktur sewa yang telah terbentuk. Produk daripada proses sosial ekonomi pada masyarakat kapitalis ini adalah struktur penggunaan lahan perkotaan yang konsentris.

Transformasi spasial pada kawasan pinggiran perkotaan, yang didorong oleh daya gerak kapitalisme untuk melakukan perubahan struktur ruang kota dan pola ruang, dari produksi ke reproduksi ruang, pada akhirnya merekonstruksi berkembangnya kelas-kelas sosial berdasarkan tingkat pendapatan dan prestise. Ketersediaan

lahan perkotaan yang semakin terbatas dan semakin kuatnya penguasaan lahan oleh kapitalisme, merupakan determinan faktor yang menyebabkan perubahan fisik spasial kawasan pinggiran kota kearah perubahan yang bersifat revolusioner. Dengan demikian diasumsikan bahwa nilai lahan pada kawasan pinggiran perkotaan memiliki nilai ekonomi strategis (Yunus, 2008).

Mengacu pada konseptualisasi teori Marx, Weber dan Mc. Clelland yang dikonstruksi dengan menggunakan pendekatan produksi menuju reproduksi dari Henri Lefebvre dan David Harvey dipahami bahwa, dinamika perubahan sosial pada komunitas perkotaan pada kawasan pinggiran kota akibat transformasi spasial, menyebabkan perubahan pola aktivitas agraris tradisional ke arah industrial perkotaan. Kondisi ini kemudian berkembang ke arah gentrifikasi ekonomi ke suburbanisasi. Proses tersebut, ditandai dengan arus pergerakan urbanisasi dan perubahan struktur ruang dan pola ruang kawasan pinggiran perkotaan, yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap proses perubahan sosial pada komunitas baik pada tingkat struktur sosial, proses sosial, dan pola kultural.

Menurut Branch (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kota, yaitu:

a) Keadaan geografis : berupa bentuk fisik dan lokasi kota;

- b) Tapak (*site*) :berupa faktor-faktor geografis antara lain kelerengan dan keadaan geologis;
- c) Fungsi kota: terkait dengan unsur dasar utama berkembangnya suatu kota yang tampak dari kehidupan ekonomi, sosio-politik, aspek fisik, dan ruang kota;
- d) Sejarah dan kebudayaan: terkait dengan keberadaan tempat-tempat yang memiliki kepentingan sejarah atau kebudayaan;
- e) Unsur-unsur umum : terkait dengan penyediaan sarana prasarana perkotaan seperti jaringan jalan dan air bersih yang dapat menarik perkembangan kearah tertentu;

Ruswurm, 1980 dalam Yunus (2004: 131) mengatakan bahwa, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pinggiran kota yakni:

- a) Pertumbuhan Penduduk (*Population Growth*)
- b) Persaingan memperoleh lahan (*Competition For Land*)
- c) Hak-hak kepemilikan (*Property Right*)
- d) Kegiatan “*developers*” (*developers activities*)
- e) Perencanaan (*planning controls*)
- f) Perkembangan teknologi (*technological development*)
- g) Lingkungan fisik (*physical environment*)

Dari peristiwa perkembangan tersebut, maka yang dapat dilihat adalah banyaknya terjadi perubahan baik secara fisik maupun non fisik. Whyne Hammond (dalam Muhlisin, 2003) mengemukakan lima alasan tumbuhnya pinggiran kota sebagai berikut:

- a) Peningkatan pelayanan transportasi kota, baik itu berupa pelayanan angkutan umum ataupun jaringan jalan yang memadai.
- b) Pertumbuhan penduduk, dimana pertumbuhan disebabkan oleh berpindahnya sebagian penduduk dari bagian pusat kota ke bagian pinggiran dan masuknya penduduk dari pedesaan.
- c) Meningkatnya taraf hidup masyarakat.
- d) Gerakan pendirian bangunan pada masyarakat. Pemerintah membantu mereka yang ingin memiliki rumah sendiri melalui pemberian kredit lewat jasa suatu bank yang ditunjuk.
- e) Dorongan dari hakikat manusia sendiri, di mana merupakan sifat dasar manusia untuk mendapatkan yang terbaik.

5. Teori Albert Otto Hirschman tentang Konsep Dampak Tetesan ke Bawah (*Trickling Down Effect*) (1958)

Albert Hirschman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan di suatu tempat (titik atau kota) akan

menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan ke arah perkembangan pada tempat-tempat berikutnya. Hirschman menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat-tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya (kota atau pusat) sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Hirschman menggunakan istilah titik pertumbuhan (*growing point*) atau pusat pertumbuhan (*growing centre*) dan atau kutub pertumbuhan (*growth pole*) seperti yang digunakan oleh Francois Perroux (Perancis).

Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, di mana industry-industri berkelompok di tempat itu, karena diperolehnya berbagai manfaat dalam bentuk penghematan dan kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja, dan upah buruh yang relatif tinggi, lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan (kota-kota) daripada di daerah-daerah belakang (*hinterland*). Antar pusat (kota) dan daerah belakang terdapat keterhubungan dan ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) dapat mengabsorbsikan tenaga kerja yang terampil dan dilain pihak akan mengurangi pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) di daerah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat komplementaritas antara dua tempat tersebut. Jika komplementaritas

kuat (kota sebagai pusat mempunyai kedudukan yang kuat) akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah-daerah belakang (wilayah pengaruh) yang disebut *trickling down effect* (dampak tetesan ke bawah), dan sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (*polarization effect*).

Jika pengaruh polarisasi lebih kuat dari dampak penyebaran pembangunan, maka akan timbul masyarakat dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern, tetapi juga memiliki ciri-ciri daerah pedesaan yang terbelakang. Walaupun terlihat suatu kecenderungan yang suram, namun Hirschman optimis dan percaya bahwa pada akhirnya dampak tetesan ke bawah akan mengatasi dampak polarisasi. Misalnya, daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah pedesaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan akan mendorong perkembangan daerah pedesaan, tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pada khususnya ada kemungkinan besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah pedesaan adalah sedemikian rendah sehingga dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah perkotaan.

Dalam jangka panjang, penghematan-penghematan eksternal dan tersedianya komplementaritas di pusat-pusat (perkotaan) akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah sekitarnya

(wilayah pengaruhnya). Di lain pihak, berdasar kerangka konseptual yang serupa mengenai struktur titik-titik pertumbuhan dan daerah belakang, Gunnar Myrdal (1957) menggunakan istilah *backwash effect* (dampak pengurasan) dan *spread effect* (dampak penyebaran) yang mempunyai arti yang serupa dengan dampak polarisasi dan dampak *trickling down*.

Namun demikian, dalam hal penekanan pembahasan dan kesimpulannya terdapat perbedaan yang cukup besar. Analisis Myrdal memberikan kesan yang pesimistis. Myrdal berpendapat bahwa polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan, pemindahan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah-daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan sebaliknya di daerah pedesaan adalah tidak menguntungkan dan akan terkuras (pesimistis). Pesimistis tersebut dapat dimaklumi karena Myrdal tidak memahami bahwa timbulnya titik-titik pertumbuhan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan merupakan syarat bagi perkembangan selanjutnya dimana-mana, selain dari itu pusat pemikiran Myrdal adalah pada kausasi kumulatif menyebabkan ia tidak dapat melihat dengan jelas timbulnya kekuatan-kekuatan yang menimbulkan suatu titik balik apabila perkembangan kearah polarisasi di suatu wilayah sudah berlangsung untuk beberapa waktu. Kausasi sikuler kumulatif selalu menghasilkan penyebaran

pembangunan yang lemah dan ketidakmerataan, atau dapat dikatakan bahwa mobilitas akan memperbesar ketimpangan pendapatan dan migrasi akan memperbesar ketimpangan regional.

Berdasar pada perbedaan pandangan di atas, maka kebijakan perspektif yang dianjurkan oleh Hirschman dan Myrdal berbeda pula. Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif, sedangkan Myrdal menekankan pada langkah-langkah kebijakan untuk melemahkan *backwash effect* (dampak pengurasan) dan memperkuat *spread effect* (dampak penyebaran) agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah ke atas, dengan demikian akan memperkecil ketimpangan regional.

Gunnar Myrdal (1957) dan Hirschman (1958) dalam Keban (1995), menyerang pengertian *equilibrium* dalam teori ekonomi dan mengemukakan ide-ide dasar tentang polarisasi pembangunan. Menurut pandangan Myrdal, daerahdaerah inti dari perekonomian adalah magnet penguat dari kemajuan. Myrdal mengemukakan bahwa setelah pertumbuhan dimulai pada lokasi yang dipilih pada perekonomian bebas, arus masuk tenaga kerja, keterampilan, modal dan komoditi berkembang secara spontan untuk mendukungnya. Tetapi arus ini meliputi efek *backwash*, ketidaksamaan antara

daerah-daerah yang berkembang dengan daerah-daerah lain. Daerah-daerah yang sedang tumbuh mempengaruhi daerah-daerah lain melalui dua kekuatan yang berlawanan, menurut model Myrdal disebut *effect backwash* dan efek penyebaran (*spread effect* dan *backwash effect*).

Efek penyebaran menunjukkan dampak yang menguntungkan dari daerah-daerah yang makmur terhadap daerah-daerah yang kurang makmur, hal ini meliputi meningkatnya permintaan komoditi primer, investasi dan difusi ide serta teknologi. Dalam banyak negara-negara terbelakang, efek penyebaran terbatas pada daerah-daerah di sekitar pusat-pusat hirarki perkotaan. Hirschman membantah bahwa memilih dan memusatkan aktivitasnya pada titik-titik pertumbuhan adalah alami bagi para pengusaha. Pembangunan lama kelamaan tidak berimbang, pertumbuhan daerah yang sedang berkembang membatasi kapasitas pertumbuhan dimana-mana. Daerah inti menarik tenaga terampil dan tabungan dari daerah pinggiran. Elastisitas permintaan income lebih besar untuk barang-barang buatan daerah inti, dan oleh karena itu syarat-syarat perdagangan melawan produsen daerah pinggiran akan komoditi primernya (Jhingan, M.L. 1993, Arsyad, 1988). Ide pokok dari model Hirschman adalah bahwa efek polaritas disebabkan oleh "*effect trickling down*", ekuivalen dengan efek penyebaran dari Myrdal.

Effect trickling down meliputi tujuan komoditi daerah inti yang diproduksi di daerah pinggiran dan gerakan modal keselatan, di samping daerah inti dapat menarik tenaga daerah pinggiran yang cukup untuk menjamin meningkatnya produktivitas tenaga kerja marjinal dan tingkat konsumsi perkapita daerah pinggiran. Hirschman bersikeras bahwa *effect trickling down* hanya bisa terjadi bila di daerah inti membutuhkan daerah pinggiran untuk ekspansinya sendiri.

Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi ekonominya telah mengetahui adanya daya kompensasi yang berlawanan, yakni efek-efek arus balik atau polarisasi, yang akan menghambat perkembangan di seluruh negeri. Hirschman melihat bahwa secara geografis pertumbuhan mungkin tidak perlu berimbang. Ia percaya bahwa dengan berlangsungnya waktu, efek-efek menetes kebawah (*trickling down effects*) akan dapat mengatasi efek polarisasi dan hal yang demikian akan terjadi jika ada campur tangan negara (pemerintah) dalam perekonomian. Gagasan-gagasan tersebut di atas memberikan dasar bagi tumbuhnya model pusat-pinggiran (*core-periphery*) dari *pebrisch* seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi ekonomi menjelaskan perbedaan pembangunan/kemajuan antara *core* dan

periphery (pusat-pinggiran). Menurut Myrdal, bila dalam suatu wilayah didirikan industri, maka akan terjadi pemusatan penduduk di sekitar daerah industri tersebut. Penduduk disini memerlukan pelayanan sosial dan ekonomi, sehingga menarik para penanam modal. Akhirnya modalpun mengalir kearah itu. Industri pertama mungkin juga menarik pendirian industri lainnya baik yang menyediakan bahan mentahnya maupun industri yang mengolah bahan setengah jadi bahan yang dihasilkan oleh industri pertama. Demikianlah akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat (*Polarization of Growth*). "*Polarization of growth*" ini akan menimbulkan "*backwash-effects*" atau akibat-akibat yang menghambat pertumbuhan wilayahwilayah lain dari mana tenaga-tenaga terampil, modal barang-barang perdagangan ditarik kearah itu. Daerah yang terkena "*backwash-effects*" ini makin lama menjadi makin mundur dan disebut "*periphery*" (Henderink & Murtomo, 1988: 26)

B. Pengertian Pertambangan

Kegiatan pertambangan dapat diartikan sebagai suatu tahapan kegiatan yang diawali dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan (termasuk bila ada pengolahan dan pemurnian), pengangkutan/penjualan dan diakhiri dengan

rehabilitasi lahan pasca tambang (Kementrian ESDM tahun 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa karakteristik

pertambangan secara umum, berikut penjabarannya:

1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
2. Eksplorasi adalah usaha dalam rangka mencari, menemukan dan mengevaluasi cadangan terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Operasi produksi yaitu tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
4. Pengembangan dan kontruksi (Development and contruction) yaitu setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cadangan, terbukti sampai siap diproduksi secara komersial. Kontruksi adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan produksi.
5. Kontruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak tambang tersebut.

6. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batu bara.
7. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
8. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.

Pengelolaan pertambangan adalah suatu upaya yang dilakukan baik secara teknis maupun non teknis agar kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan, baik terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terhadap lingkungan.

Dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Sektor pertambangan merupakan sektor yang strategis, selain itu bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut (Djajadiningrat 2007).

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral. Yang artinya penambangan merupakan bagian dari pertambangan dalam konsep

yang luas. Penambangan terbagi menjadi tiga golongan yaitu bahan galian A, B dan C.

Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan di Indonesia mengacu PP No. 25 Tahun 2000, memaparkan kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomi termasuk di bidang pertambangan terdapat klasifikasi bahan galian menurut kepentingannya bagi pemerintah, yakni.

- a) Pertambangan Golongan A adalah bahan galian yang strategis. Dimana bahan galian tersebut penting untuk pertahanan/keamanan Negara atau untuk menjamin perekonomian Negara. Contohnya semua jenis batu bara, minyak bumi, bahan radio aktif tambang aluminium (bauksit), timah putih, mangan, besi dan nikel.
- b) Pertambangan Golongan B adalah golongan bahan galian yang strategis. Yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika dan asbes.
- c) Pertambangan Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan B ataupun A yakni :
 - 1) Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite) ;
 - 2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - 3) Yerosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - 4) Batu permata, batu setengah permata;

- 5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- 6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth) marmer, batu tulis;
- 7) Batu kapur, dolomit, kalsit;
- 8) Granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang
Tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain.

Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia, Nurdin dkk dalam (Dyahwanti, 2000:28).

C. Pengelolaan Pertambangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Telah diketahui bersama bahwa kepentingan kontraktor pertambangan umum adalah *profit oriented*, namun juga dibebani tanggung jawab *community development* (tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan umum), berdasarkan ketentuan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak berkepentingan dengan adanya kepastian *revenue/pemasukan* dari bagian pemerintah (*government take*) atas hasil dari produk pertambangan baik dari pajak maupun *royalti*, *deadrent* (iuran tetap)/iuran produksi, maupun pajak dari perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk anggaran pendapatan belanja negara di pusat maupun pemasukan asli pemerintah daerah sebagai tanggung jawab publik dan melaksanakan amanah untuk

menyejahterakan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkembangan tugas negara selanjutnya memunculkan tipe negara dalam arti materiil (tugas negara dalam arti luas), dimana negara bukan lagi hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi secara aktif ikut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut Marilang, tipe negara *welfare state* yang memungkinkan negara dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan pertambangan sebagai salah satu cabang produksi, demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Bukanlah suatu hal yang mudah mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah kandungan mineralnya. Butuh sebuah kearifan tingkat tinggi untuk memanfaatkan hasil hutan dan pengolahan tambang.

Tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas yang dibahas sebelumnya. Tujuan yang berisi tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.

Pengusahaan pertambangan sejumlah daerah di Indonesia tidak memerhatikan regulasi dan instrumen perizinan di bidang lingkungan hidup melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi general environmental law dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini pengelolaan pertambangan adalah suatu upaya yang dilakukan baik secara teknis maupun non teknis agar kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan permasalahan, baik terhadap kegiatan pertambangan itu sendiri maupun terhadap lingkungan.

Pengelolaan pertambangan sering hanya dilakukan pada saat penambangan saja. Hal ini dapat dimengerti, karena pada tahap inilah dinilai paling banyak atau sering menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Persepsi yang demikian kurang tepat. Pengelolaan pertambangan sebaiknya dilakukan sejak awal hingga akhir tahapan seperti tersebut di atas. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, maka sebelum suatu deposit bahan tambang ditambang, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu apakah deposit tersebut layak untuk ditambang ditinjau dari berbagai aspek. Dengan demikian, pengelolaan pertambangan secara garis

besar perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenis tahapan kegiatan, yaitu kegiatan awal berupa penentuan kelayakan penambangan, kegiatan kedua pada saat penambangan (eksploitasi), dan kegiatan ketiga/terakhir pada saat reklamasi lahan pasca penambangan.

D. Pengertian Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dikatakan sebagai sumber daya alam yang penting karena lahan tersebut merupakan tempat manusia melakukan segala aktifitasnya. Pengertian lahan dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi fisik geografi, lahan adalah tempat dimana sebuah hunian mempunyai kualitas fisik yang penting dalam penggunaannya. Sementara ditinjau dari segi ekonomi lahan adalah suatu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam produksi. Lichrield dan Drabkin (1980) dalam Marangkup (2006).

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain (Haeruddin, 1997).

Lahan sebagai ruang (*space*) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan dan manusia

merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusia lahan yang ada dapat berubah/dirubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan pertambangan. Dengan demikian lahan adalah ruang di permukaan bumi dapat sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi, di mana dalam pemanfaatannya hendaknya dilakukan secara benar dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya, termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu, maupun sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam (Hardjowigeno, 2001). Lahan merupakan sumberdaya pembangunan yang memiliki karakteristik ketersediaan atau luasnya relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil. Kesesuaian lahan dalam menampung kegiatan masyarakat juga cenderung bersifat spesifik karena lahan memiliki perbedaan sifat fisik seperti jenis batuan, kandungan mineral, topografi dan lain sebagainya. Menurut Notohadiprowiro dalam (I Made, 2004).

E. Pengertian Alih Fungsi Guna Lahan (Konversi Lahan)

Alih fungsi guna lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang tadinya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula. Dwipradnyana (2014) menjelaskan, perubahan penggunaan lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lainnya misalnya ke non pertanian.

Wadji Kamal (1987) dalam Wulandari (2017) menjelaskan pengertian perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari fungsi tertentu menjadi fungsi lainnya, misalnya dari sawah berubah menjadi pemukiman atau tempat usaha. Pengertian tersebut didukung oleh Lestari (2009) yang menjelaskan perubahan penggunaan lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam hal mata pencaharian.

Martin (1993) dalam Wahyunto (2001) mengatakan, perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada

kurun waktu yang berbeda. Alih fungsi atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya (Kustiawan, 1997).

Perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai perubahan suatu jenis penggunaan lahan ke penggunaan lainnya. Wijaya dalam Orleanti (2000) menjelaskan perubahan penggunaan lahan merupakan suatu tindak lanjut penyesuaian penggunaan lahan dalam fungsinya sebagai ruang kota, terhadap peningkatan kebutuhan ruang untuk aktivitas sosial dan ekonomi kota berikut sarana dan prasarana penunjangnya, serta penduduk kota.

Konversi lahan sama artinya dengan alih fungsi lahan atau perubahan lahan, yaitu mempunyai arti perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya. Konversi lahan sebenarnya diperlukan untuk melakukan aktivitas pembangunan yang nantinya juga untuk keperluan manusia. Menurut Wahyunto (2001) dalam Mustopa (2011), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Penggunaan lahan dan administrasi pertanahan di Indonesia, seperti halnya di negara-negara yang sedang berkembang lainnya

menghadapi banyak masalah. Misalnya, ketidak selarasan antar berbagai kepentingan terutama dengan berbagai sektor ekonomi, yang pada selanjutnya terjadi kerawanan konflik dan counter productive satu dengan lainnya (Acquaye, 1984). Selain itu, masalah lahan timbul akibat sistem peraturan yang pada umumnya sangat kompleks, sehingga sering tidak relevan lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Akibatnya, sistem pengelolaan lahan terhambat dan pemanfaatannya tidak berkelanjutan (Mclaughlin, 1996) dalam (Ritohardoyo, 2013:94).

Kebutuhan lahan yang semakin meningkat untuk keperluan masyarakat maupun pembangunan, telah meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya lahan di Indonesia (Sandy,1995; Harsono, 1995) dalam (Ritohardoyo, 2013:94). Pemecahan masalah tersebut memerlukan rencana strategis penataan dan administrasi pertanahan, sehingga keberlanjutan penggunaan lahan dapat terkendali dan mencegah dampak negatif. Salah satu kendala dalam penataan lahan, adalah terbatasnya ketersediaan informasi lahan secara akurat. Informasi lahan khususnya sistem registrasi antara lain mencakup data kadaster, pemilikan serta jenis hak lahan, dan data pemilik lahan.

F. Dampak Konversi Lahan di Wilayah Peri-Urban

Perkembangan konversi lahan dewasa ini terjadi pada wilayah peri-urban (WPU) karena padatnya lahan di pusat kota dan masih

banyaknya ruang lahan terbuka di WPU. Dalam perkembangannya, WPU tidak hanya mengalami perubahan atau transformasi fisik dan sosial ekonomi, tetapi juga mempunyai dampak terhadap lingkungannya. Yunus (2008) melihat dampak lingkungan yang terjadi di Wilayah Peri-urban yang gejalanya mencolok saja terkait lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosio kultural. Menurut Jayadinata (1999), dampak Lingkungan terjadi karena aktivitas atau perbuatan manusia yang keliru sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan atau ekologi. Ekologi menurut Jayadinata meliputi daratan, laut, dan udara. Dimana ekologi di daratan lebih ditekankan pada tanah, air, dan udara.

Mengenai dampak lingkungan abiotik yaitu adanya gejala terjadinya degradasi lingkungan menurut Yunus (2008). Penurunan kualitas lingkungan abiotik yang biasanya terjadi karena kegiatan manusia yang semakin intensif dan tidak terarah yang tercermin dalam wacana transformasi spasial di WPU, yaitu: terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh polusi udara, tanah, air, dan kerusakan lahan.

Penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh polusi udara misalnya yaitu polusi yang berasal dari kegiatan permukiman, transportasi, dan industri-industri. Penurunan kualitas lingkungan akibat polusi tanah terjadi karena adanya permasalahan tentang persampahan. Sampah merupakan sumber kotoran dan bau

yang tidak sedap dapat menjangkau jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, sangat wajar jika penduduk di suatu tempat tidak setuju jika di dekat tempat tinggal mereka dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini nantinya juga akan mempunyai potensi munculnya gejolak sosial. Untuk kota yang WPU nya masih didominasi lahan terbuka, penentuan tempat pembuangan sampah tidak banyak mengalami kendala besar. Kondisi sebaliknya akan dialami oleh WPU yang mempunyai sistem jaringan permukiman yang cukup padat.

Penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran air terjadi tergantung dari aktivitas yang terjadi di kota terdekat. Pencemaran air dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pencemaran air permukaan dan air bawah tanah. Pencemaran air permukaan berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Sebenarnya volume pencemaran masing-masing kegiatan tersebut tidak banyak, namun karena sumber pencemarannya atau rumah tangganya banyak, maka akibat kumulatif yang timbul menjadi besar. Gejala ini dialami hampir di semua kota di negara berkembang. Oleh karena sistem pembuangan limbah cair disalurkan melalui jaringan saluran dan bermuara ke sungai, dapat dipastikan kualitas air sungai sangat buruk. Selain pencemaran, dampak yang terkait air adalah meningkatnya air larian akibat aktivitas konversi lahan menjadi lahan terbangun.

Penurunan kualitas akibat kerusakan lahan yaitu adanya peningkatan kebutuhan bahan bangunan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatannya. Usaha pembuatan bahan bangunan banyak dilakukan di WPU. Beberapa bahan bangunan diambil dari tanah dan digali pada lahan miliknya. Di beberapa tempat, pembuatan batu bata dan genteng membuat kerusakan lahan dengan membuat lubang-lubang cukup banyak yang mengakibatkan kolam-kolam air pada musim penghujan. Hal ini terkait dengan kelancaran air yang melewati drainase.

Seperti yang dikemukakan oleh Bintarto (1984) dalam Khadiyanto (2005), permasalahan yang bersifat fisik akan bersangkut paut dengan masalah sosial ekonomi. Dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi dan kultural yaitu seperti penurunan kualitas lingkungan permukiman, gejala dekohesivitas sosial, pendesakan petani ke arah yang lebih jauh lagi, gejala diversifikasi mata pencaharian, gejala alih mata pencaharian, penurunan jumlah petani, dan perubahan gaya hidup (Yunus, 2008).

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor

lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain.

Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia, Nurdin dkk dalam (Dyahwanti, 2000:28).

Perubahan suatu guna lahan menjadi guna lahan lain dapat menjadi suatu keuntungan jika guna lahan baru tersebut lebih produktif dari guna lahan awalnya (Wijayanti, 2002). Antara lain :

a) Dampak ekonomi bagi pemerintah

Dampak ini antara lain meningkatnya penerimaan pajak bagi pemerintah dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

b) Dampak ekonomi bagi masyarakat

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak ini adalah terbukanya peluang baru dalam penyerapan tenaga kerja. Dampak positif lainnya adalah dengan produktifnya penggunaan lahan tersebut dapat meningkatkan harga lahan di kawasan tersebut.

G. Pengaruh Transportasi Terhadap Perkembangan Wilayah Periurban

Transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung fungsi suatu wilayah. Untuk itu, transportasi sebagai media pergerakan barang dan jasa harus mampu mencerminkan tingkat efisiensi dan efektifitas wilayah dalam hal mobilitas dan aksesibilitas baik secara internal maupun secara eksternal.

Yunus (2000), menyatakan bahwa berdasarkan studi Herbert (1976), di beberapa kota di Amerika membuktikan bahwa perkembangan prasarana transportasi termasuk pembangunan jalan akan sangat mempengaruhi perkembangan dan morfologi kota. Kota-kota di Amerika adalah kota-kota yang terkondisikan oleh kemajuan teknologi di bidang transportasi darat mulai dari terbentuknya sampai dengan perkembangannya. Menurut Gakenheimer (1999), bahwa masalah-masalah yang mempengaruhi tingkat mobilitas adalah tingkat permintaan kendaraan bermotor, kondisi permintaan lokal yang jauh melebihi kapasitas fasilitas, ketidakcocokan struktur perkotaan dengan peningkatan permintaan kendaraan serta kebutuhan lahan untuk infrastruktur transportasi yang mempunyai hubungan kuat terhadap meningkatnya permintaan kendaraan di kota-kota berkembang, kurangnya pemeliharaan jalan yang memadai dan kesepakatan terbatas antara pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam membentuk pendekatan yang tepat terhadap masalah tersebut. Menurut

Tamin (2000), bangkitan perjalanan memiliki pengertian jumlah perjalanan yang dibangkitkan (ditimbulkan) oleh zona pemukiman, baik sebagai asal maupun tujuan perjalanan atau jumlah perjalanan yang dibangkitkan (ditimbulkan) oleh aktivitas pada akhir perjalanan di zona pemukiman, pusat perdagangan, pusat pertokoan, pusat pendidikan, pusat industri dan lain sebagainya. Perumahan baru berarti tempat tinggal tetap atau kediaman yang terdiri dari beberapa rumah yang belum lama selesai dikerjakan (masih baru).

Menurut Mattsson (1999) bahwa rumah tangga membuat pilihan terhadap lokasi (zona dan tipe rumah), kepemilikan mobil/sepeda motor dan pola perjalanan yang diharapkan. Pola perjalanan mencakup frekuensi perjalanan, pilihan tujuan dan pilihan modus untuk beberapa jenis perjalanan. Semua pilihan ini diperlakukan dalam kerangka mikro ekonomi, yang memungkinkan rumah tangga untuk kegiatan bisnis misalnya, aksesibilitas untuk perumahan murah atau lebih baik. Makin berkembangnya wilayah peri urban baik untuk permukiman maupun untuk kegiatan pertambangan akan selalu diikuti oleh meningkatnya sarana transportasi. Sarana transportasi bermesin merupakan sumber polutan di udara yang signifikan. Oleh karena hampir seluruh penduduk menggunakan media transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak dapat disangka lagi bahwa mereka akan menerima dampak terhadap polusi udara yang ditimbulkannya, karena terpaksa

menghirup udara yang mengandung polutan. Makin banyak frekuensi seseorang menggunakan jalur transportasi dan menggunakan sarana transportasi terbuka akan makin banyak udara mengandung polutan. Di samping itu, polusi udara yang berasal dari sarana transportasi juga mempunyai dampak terhadap penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang jalan.

Berkembangnya kompleks industri dapat mempengaruhi struktur tata ruang suatu kota. Oleh karena *industrial booming* pertama kali muncul setelah terjadinya revolusi industri di kota-kota Eropa, beberapa pengamat melihat adanya pengaruh yang signifikan dari kemunculan kompleks industri terhadap tata ruang kotanya, termasuk di dalamnya adalah mengenai sebaran spasial permukimannya. Hal ini telah lama dikemukakan Peter Mann (1965) dalam Yunus (2005).

Menurut Whyne-Hammond (1995), kebanyakan jalur transportasi tidak dibangun secara keseluruhan, maksudnya jaringan transportasi ini selalu berkembang secara gradual dan bertahap dari waktu ke waktu. Dalam perkembangan transportasi ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan transportasi, antara lain :

1. Teori Poros (Babcock)

Peranan jalur transportasi dalam perkembangan daerah kekotaan dijelaskan oleh teori utama berkaitan dengan struktur keruangan kota yaitu teori poros (Babcock, 1993 dalam Yunus, 2000). Pada teori

poros yang memandang peran jalur transportasi dalam perspektif ekologis-babcock mengungkapkan bahwa keberadaan poros transportasi dengan mobilitas tinggi. Asumsi tersebut berimplikasi perkembangan zona-zona yang ada pada daerah sepanjang poros transportasi akan lebih besar dari zona yang lain. Pada dasarnya teori ini merupakan transportasi dalam mempengaruhi struktur bangunan kota. Keberadaan poros transportasi menurut Babcock akan mengakibatkan distorsi pada konsentris, karena sepanjang rute transportasi berasosiasi dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Daerah yang akan dilalui transportasi akan mempunyai perkembangan fisik yang berbeda dengan daerah-daerah di antara jalur-jalur yang disebut star-shaped patten/octopus-like pattern.

2. Teori Kekuatan Dinamis (Charles Colby)

Oleh karena dalam kota terdapat kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola penggunaan lahan kota, maka pola penggunaan lahan kota sendiri tidak statis sifatnya. Secara garis besar, kekuatan dinamis ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu ; (1) Kekuatan-kekuatan sentrifugal (*centrifugal forces*) adalah kekuatan- kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan dari bagian dalam suatu kota menuju bagian luarnya.; (2) Kekuatan-kekuatan sentripetal (*centripetal forces*) adalah kekuatan-kekuatan yang terjadinya pergerakan baik

penduduk maupun fungsi-fungsi kekotaan yang berasal dari bagian luar menuju bagian dalam daerah perkotaan. Kekuatan-kekuatan tersebut timbul karena adanya faktor pendorong dan penarik. Masing-masing zona mempunyai karakteristik keruangan (spatial characteristic).

H. Pengertian Pemanfaatan Lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah merupakan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Lahan adalah permukaan bumi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas, dimana pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat (Sugandhy, 2008:16).

Sedangkan menurut Cooke (2003:33), lahan merupakan keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala di bawah permukaannya yang bersangkutan paut dengan pemanfaatannya bagi manusia. Pengertian lahan/tanah menurut Undang-Undang

Pokok Agraria adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya termasuk bagian tubuh bumi yang dibawahnya dan bagian ruang diatasnya sesuai dengan tujuan penggunaannya. (Harsono dalam Soemadi,2009:5).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan pemanfaatan lahan adalah suatu usaha memanfaatkan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil (Soetarno, 2003:18).

Pemanfaatan lahan dapat ditinjau dari berbagai matra antara lain dari segi bentuk/tipe, hukum, ekonomi, sosial, objek, subjek, orientasi, rotasi, produksi, produktifitas, politik dan budaya, sehingga pendapat yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sangat luas adanya. Pada dasarnya, bentuk pemanfaatan adalah artikulasi kegiatan manusia yang ada diatas sebidang lahan. Hal yang membedakan antara bentuk pemanfaatan lahan non-urban dan urban adalah orientasi pemanfaatan lahan. Pada umumnya sangat sulit membedakan antara bentuk pemanfaatan lahan non-urban dan urban khususnya di wilayah peri urban.

I. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk di dalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas/puskesmas pembantu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan permukiman.

Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam usaha untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan sesuatu daerah, langkah pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis-jenis pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan membuka klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis. Istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Kalasifikasi lahan didefenisikan sebagai pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai kategori

berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.

Overlay peta dapat dilakukan secara manual (overlay manual), maupun dengan cara digital (overlay GIS). Dikatakan bahwa dalam pola penggunaan lahan seperti halnya mendeteksi perubahan pemanfaatan lahan, dua metode ini dapat digunakan. Pada metode interpretasi manual dan digital, tekanan diberikan pada perubahan penggunaan lahan dan perubahan-perubahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan.

Mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini perlu di upayakan alternative pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di Indonesia yaitu :

1. Terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konservasi tanah;
2. Terjadinya produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya;
3. Terdesaknya lahan pertanian yang relative subur oleh jenis penggunaan lahan non pertanian utamanya di daerah perkotaan.

Penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai berikut : penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari di mana telah termasuk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah

pengawasan lahan. Proses perubahan pola pemanfaatan lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian (Soemarwoto, 1999).

J. Perencanaan Landscap Pasca Tambang

Internationale Bauausstellung (IBA, 2009) dari Jerman telah merumuskan sepuluh prinsip perlakuan untuk perencanaan lanskap pada lahan pasca tambang, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Percontohan

Pengembangan lanskap pasca tambang harus dapat menjadi percontohan. Sebagai suatu pembenahan dalam model pembangunan budaya lanskap maka harus memiliki karakter yang berkontribusi pada pelaksanaan tujuan dan standar internasional pembangunan berkelanjutan.

2. Menggunakan Sumber Daya

Peninggalan pertambangan berupa tanah, bangunan, dan infrastruktur adalah warisan sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Pelestarian dan penggunaan kembali komponen khas tersebut menciptakan tempat khusus yang membentuk tampilan jembatan antara masa lalu dan masa depan.

3. Mengembangkan Identitas

Sebuah lanskap pasca pertambangan harus memiliki karakteristik baru tersendiri. Pemandangan asli yang telah hilang tidak dapat direproduksi. Perkembangan baru harus dimulai di lokasi yang bermakna, dengan tujuan mempromosikan dan membentuk identitas baru.

4. Memperluas Cakrawala Perencanaan

Perencanaan untuk lanskap pasca tambang harus dimulai sebelum penambangan beroperasi pada lahan tersebut. Dari awal, perencanaan harus mewakili tujuan untuk desain pengembangan masa depan dan harus memuat kemungkinan pilihan baru. Perencanaan harus menyertai proses penambangan dan bereaksi fleksibel terhadap perubahan kondisi kerangka kerja.

5. Membentuk Proses

Proses desain ulang harus nyata. Informasi, tahap-tahap perubahan, dan operasional antaranya merupakan elemen penting dari suatu proses dalam menyampaikan perubahan dan identitas.

6. Memungkinkan untuk kreativitas dan Inovasi

Pengembangan lanskap budaya baru memerlukan pelopor dan kreativitas, pertukaran perspektif dari dalam dan luar, serta membuka struktur pengambilan keputusan. Proses harus diatur sedemikian rupa untuk memfasilitasi solusi inovatif dan jalur baru.

7. Membangkitkan Gambaran

Gambaran dan garis besar pembangunan masa depan adalah penting sebagai pembuka mata dan sarana untuk membayangkan masa depan.

8. Memastikan Transparansi

Pengembangan lanskap pasca tambang harus terbuka dan transparan. Partisipasi yang komprehensif dari mereka yang terkena dampak, pengambilan kebijakan, dan pelaksana harus dijamin dalam semua tahap perencanaan.

9. Membangun Struktur Organisasi

Pelaksanaan tujuan perencanaan harus dijamin oleh struktur organisasi yang mampu bertindak dan cukup dilengkapi dengan pendanaan dan personil. Struktur organisasi mengambil alih manajemen proses, menetapkan jaringan, dan mengatur pendanaan dan promosi. Persyaratan untuk fungsi ini adalah suatu kerangka kerja hukum yang mengikat yang mengidentifikasi tingkat perencanaan, tugas dan tanggung jawab.

10. Mengambil Tanggung Jawab

Berlakunya prinsip pencemar adalah yang bertanggungjawab membayar rehabilitasi. Tugas pembangunan kualitatif yang menghasilkan nilai tambah tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal saja. Ini harus didukung oleh kewirausahaan dan tanggung jawab

masyarakat serta oleh kerjasama antara pemerintah setempat dan mitra tambahan.

K. Kota Berkelanjutan

Ada banyak pendekatan dalam proses perencanaan seperti “*Green City*”, “*Eco City*”, dan “*Liveable City*”. Setiap pendekatan tersebut memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Kota hijau dapat didefinisikan sebagai sebuah kota yang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti mengurangi limbah, melakukan daur ulang, menurunkan emisi, meningkatkan kualitas kawasan perumahan sekaligus memperluas ruang terbuka hijau, dan mendorong pengembangan bisnis lokal masyarakat yang berkelanjutan.

Kota yang ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai metafora yang mencakup berbagai persoalan ekologi perkotaan yang bertujuan untuk mencapai kota yang *sustainable*. Pendekatan ini mengusulkan berbagai kebijakan lingkungan, sosial dan kelembagaan yang diarahkan untuk mengelola ruang kota agar berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan dan menekankan pada pengelolaan lingkungan melalui proses perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Juga, *Eco-City* dijelaskan sebagai kota yang menyediakan standar hidup yang dapat diterima masyarakat tanpa menguras ekosistem dan lingkungan dimana ia bergantung. Ketika kota layak huni digambarkan sebagai sistem perkotaan yang berkontribusi pada aspek kesejahteraan fisik, sosial dan

mental serta perkembangan pribadi seluruh masyarakat didalamnya, pendekatan ini adalah tentang melaksanakan penataan ruang kota yang dapat pula memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat pada pendekatan ini adalah kesetaraan, martabat, aksesibilitas, keramahan, partisipasi dan pemberdayaan. (Hosam K. El Ghorab, Heidi A. Shalaby 2015)

L. Dasar Hukum Alih Fungsi Guna Lahan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Mengatur konsep pengalihfungsian lahan hanya tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep ekonomi. Kedaulatan ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat sebagai mana dimaksud dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yaitu:

“Sebagian orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Selain tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup, pengalihfungsian lahan juga tercermin pada konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan, yang tegas diatur dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) berbunyi:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan ayat (4) berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ”

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007

Pada UU nomor 26 tahun 2007 mengatur tentang alih fungsi guna lahan. Terdapat pada pasal 20 ayat (1) yang berbunyi :

“Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.”

Dari pasal tersebut mengandung pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

M. Kedudukan Moncongloe Dalam Konteks Mamminasata

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (MAMMINASATA) kedudukan Kecamatan Moncongloe berada pada sebagian wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Kecamatan. Adapun sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe berada pada zona B3 dan B4 yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah sampai dengan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sedang.

Kota Satelit yang dikembangkan dalam konsep Metropolitan Mamminasata adalah pembangunan kota baru Moncongloe yang fungsi utama kawasan kota baru adalah transportasi, perdagangan jasa, RTH, permukiman dan rekreasi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros tahun 2012-2032 disebutkan bahwa Kecamatan Moncongloe merupakan kota satelit KSN (Kawasan Strategis Nasional) Perkotaan Mamminasata bagian timur, sebagai kawasan permukiman baru kawasan strategis Moncongloe, kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor bypass Mamminasata dan kawasan perdagangan.

N. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan dan untuk menjadi sebuah acuan dalam penulisan. Adapun

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai alih fungsi guna lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah periurban dapat dilihat berikut ini:

Harry Hardian Sakti (2016) melakukan penelitian berjudul "*Fenomena Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Pertumbuhan Aktivitas Perkotaan (Kasus Koridor Ruas Jalan Hertasning-Samata di Makassar-Gowa)*", yang bertujuan menguji dan menganalisis faktor-faktor penentu perubahan pemanfaatan ruang dan pengaruh koridor jalan terhadap pertumbuhan kegiatan perkotaan. Metode analisis digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis, statistik deskriptif. Hasil analisis dan diskusi mengidentifikasi faktor-faktor penentu perubahan pemanfaatan ruang adalah jarak pergerakan, infrastruktur transportasi, ketersediaan fasilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas komersial dan layanan, jenis penggunaan lahan, harga tanah, nilai jual lahan, nilai strategis lokasi, dan pemilihan lokasi, juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kegiatan perkotaan adalah kegiatan permukiman, komersial dan layanan, pendidikan, dan jaringan pergerakan.

Batara Surya (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Fenomena Perubahan Fisik Spasial dalam Dinamika Pembangunan di Wilayah Pinggiran Kota*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan fisik spasial, artikulasi spasial, perubahan struktur ruang,

perubahan sosial, aglomerasi fungsi dan disaglomerasi fungsi dalam dinamika pembangunan kawasan pinggiran Hertasning-Samata Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian bahwa perubahan fisik spasial yang sangat cepat dan revolusioner berkontribusi positif terhadap perubahan struktur ruang, pola ruang, aglomerasi/disaglomerasi fungsi kawasan. Perubahan fungsi ruang yang didominasi fungsi komersil menjadi determinan perubahan sosial pada kawasan pinggiran Hertasning-Samata. Dominasi penguasaan reproduksi ruang oleh kapitalisme menunjukkan perbedaan penguasaan reproduksi ruang yang sangat signifikan antara ruang kapitalisme dan ruang prakapitalisme, berdampak pada penajaman strata secara ekonomi, perbedaan status, dan kelas-kelas sosial komunitas. Dinamika perubahan fisik spasial menyebabkan pergeseran orientasi kegiatan komunitas yang berjalan sejajar dengan dialektika modernitas dan rasionalisasi tindakan dalam komunitas lokal.

Kustanto Noor Adnan (2000) melakukan penelitian berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota di Kota Yogyakarta*", yang bertujuan mendapatkan gambaran secara faktual perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan ruang. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan

mengadakan penelitian di masyarakat dan survey instansional. Hasil penelitian bahwa peningkatan kepadatan bangunan maupun perubahan pemanfaatan ruang terjadi karena keberadaan pusat aktivitas masyarakat antara lain berupa kampus dan pusat perkantoran.

O. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berpedoman dari adanya kegiatan pertambangan galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan awal, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis dalam pengumpulan data, pengelolaan dan analisa serta menentukan hasil keluaran akhir (output). Untuk itu diperlukan sebuah kerangka pikir yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini.

Pada beberapa tahun belakangan ini, tutupan lahan di Desa Moncongloe Bulu telah banyak mengalami perubahan penggunaan lahan yang semula berupa lahan pertanian, kebun campuran yang kemudian mengalami alih fungsi lahan menjadi kawasan pertambangan galian golongan C dan industry pertambangan. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan keinginan peneliti untuk mengetahui besarnya alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan

penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru moncongloe dan strategi pengendalian kawasannya.

Olehnya itu pada penelitian ini, pengkajiannya di fokuskan pada seberapa besar alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru yang terjadi di Desa Moncongloe Bulu dan selanjutnya merumuskan strategi-strategi penataan kawasan yang dapat dilakukan di Desa Moncongloe Bulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka fikir penelitian di bawah ini :





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam metodologi penelitian perlu asumsi-asumsi yang melatarbelakangi berbagai metode yang dipengaruhi dalam kegiatan ilmiah. Asumsi-asumsi yang dimaksudkan adalah pendirian atau sikap yang akan dikembangkan di dalam kegiatan ilmiah. Sementara dalam sebuah penelitian ilmiah metode yang digunakan lebih kepada metode penelitian secara induksi yaitu penelitian yang dimulai dengan mengamati fenomena khusus untuk menyimpulkan yang umum/mengamati kondisi lapangan dan kemudian melahirkan satu hipotesis.

Nazir (1988: 51), mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan

kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe. Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros tepatnya di satu Desa yaitu Desa Moncongloe Bulu. Desa Moncongloe Bulu merupakan Desa yang menjadi daerah yang telah melakukan alih fungsi guna lahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Dengan luas wilayah 12,76 km² yang terdiri dari 5 dusun. Penetapan lokasi penelitian di dasarkan karena lokasi potensi pertambangan galian golongan C yang terletak di Desa Moncongloe Bulu dan aktifitas pertambangan yang terletak di Desa Moncongloe Bulu telah menyebabkan banyak alih fungsi guna lahan.

Secara lingkup wilayah penelitian, penelitian ini dilakukan pada satu desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperkecil lingkup wilayah penelitian dengan mengefisienkan waktu yang ada sehingga penelitian dapat dilakukan dengan maksimal.

Adapun penelitian ini berlangsung selama 7 bulan yaitu dimulai pada minggu pertama bulan Juli tahun 2021 dan berakhir pada minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Waktu penelitian tersebut mencakup tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian hingga tahap penyusunan skripsi atau laporan akhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel jadwal penelitian berikut ini :

Tabel 3.1 Schedule Pelaksanaan Penelitian/ Skripsi

| No | Agenda | Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November-Desember | | | | Januari | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan Sinopsis | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Persiapan Berkas (SK) | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penyusunan Bab I, II, dan III | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Survey Pengambilan Data | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penyusunan Bab IV dan V | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 6. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| | Tutup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

Sumber : Hasil Identifikasi 2021

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan tugas akhir ini membutuhkan data yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diselidiki secara langsung dan bisa di ukur dengan cara yang tidak langsung pula atau data yang penyajiannya berdasarkan gambar deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat dan survey lapangan untuk mengamati secara langsung lokasi penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai kondisi eksisting penggunaan lahan di Desa

Moncongloe Bulu dan data mengenai Aktifitas pertambangan Galian Tipe C di Wilayah Peri Urban Desa Moncongloe Bulu.

Data sekunder yang digunakan adalah data-data yang terkait dengan daerah penelitian dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang di peroleh dari instansi pemerintah yang terkait. Data sekunder ini berupa data kependudukan Desa Moncongloe Bulu, data gambaran umum Kecamatan Moncongloe, penelitian sebelumnya terkait perubahan penggunaan lahan serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sumber Data Penelitian

| No | Jenis Data | Kebutuhan Data | Pengumpulan Data | Sumber Data |
|----|-------------|--|------------------|-----------------------|
| 1 | Data Primer | <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi eksisting penggunaan Lahan lokasi penelitian • Aktifitas pertambangan galian golongan C • Data mengenai kondisi masyarakat • Kondisi Jaringan Jalan | Observasi | Pengamatan dilapangan |

Sumber : Hasil Identifikasi 2021

Tabel 3.2 Sumber Data Penelitian

| No | Jenis Data | Kebutuhan Data | Pengumpulan Data | Sumber Data |
|----|---------------|---|------------------|------------------|
| 2. | Data Sekunder | <ul style="list-style-type: none">• Kondisi Fisik Dasar wilayah/ administrasi Kecamatan Moncongloe• Luas Wilayah/ Administrasi desa Moncongloe Bulu• Citra satelit Desa Moncongloe Bulu• Jumlah Penduduk• Penggunaan Lahan Kecamatan Moncongloe | Dokumentasi | Instansi Terkait |

Sumber : Hasil Identifikasi 2021

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan suatu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan yaitu cara pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan melakukan proses pengamatan dan pengambilan data atau informasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa data yang akan didapatkan dengan metode ini adalah kondisi fisik dasar lokasi penelitian (eksisting dan pola penggunaan lahan lokasi penelitian), identifikasi lokasi potensi penambangan galian golongan C.

2. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar atau jurnal dan berupa aturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri (Permen)/standar dan pedoman teknis serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data jenis wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dengan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang bersifat fisik dan non fisik yang bersifat historical yang dialami masyarakat. Teknik wawancara melengkapi pengumpulan data yang tidak dapat diungkapkan oleh teknik observasi. Pada tahapan survey teknik ini bukan merupakan teknik pengumpulan data yang utama, melainkan hanya sebagai teknik pelengkap.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi yakni ditujukan untuk melengkapi data dalam rangka analisis masalah yang ada di wilayah perencanaan, kita memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada

hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Untuk keperluan ini, kita harus melakukan studi dokumentasi.

E. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari seseorang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono (2011). Dalam Budiono (2009) variabel diartikan sebagai salah satu sifat yang dapat dimiliki bermacam nilai/harga apabila suatu variabel hanya mempunyai satu nilai saja, maka variabel tersebut disebut konstanta Vink (1983) dan Soerianegara (1978).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang mempengaruhi alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan. Dalam ini untuk memudahkan penulis mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam beberapa bagian. Berikut merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3

Unsur Keterkaitan Variabel dan Indikator yang diukur

| Variabel Terkait (Dependen) atau Variabel (Y): | Indikator yang diukur | Kajian Teori |
|--|-----------------------------|---|
| Determinan Penurunan Kualitas Lingkungan | • Kondisi Sumber Daya Lahan | • Jayadinata (1999) • Hadi Sabari Yunus (2008) • Bintaro (1984) dalam Khadiyanto (2005) |
| | • Kondisi Jaringan Jalan | |

Sumber : Hasil Identifikasi, 2021

| Variabel Bebas (Independen) atau Variabel (X): | Indikator yang diukur | Kajian Teori |
|--|--|---|
| X ₁ : Alih Fungsi Guna Lahan | • Penggunaan lahan | • David Harvey (1973) |
| | • Perubahan fungsi sumber daya lahan kawasan pinggiran | • Hadi Sabari Yunus (2008) |
| X ₂ : Aktivitas Tambang Galian Golongan C | • Perubahan tata guna tanah | • Djajadiningrat 2007 |
| | • Dampak kawasan pertambangan | • Nurdin dkk dalam (Dyahwanti, 2000: 28) |
| X ₃ : Mobilitas Kendaraan | • Tingkat Pergerakan Kendaraan Tambang | • Gakenheimer (1999) • Babcock, 1993 dalam yunus, 2000 |

Sumber : Hasil Identifikasi, 2021

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Analisis adalah metode-metode yang digunakan dalam memecahkan rumusan masalah dengan penelitian, sehingga metode analisis data pada penelitian ini diuraikan berdasarkan rumusan masalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Analisis Superimpose (Overlay)/ Spasial Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru moncongloe, yang menggunakan analisis superimpose (*overlay*) / *spasial analisis*. Tumpang susun data keruangan atau *overlay* adalah salah satu prosedur analisis data spasial, dimana pada proses ini *layer* dimodifikasi sesuai dengan yang diperlukan. Proses *overlay* sendiri terdiri dari beberapa metoda, yaitu *identity*, *intersect*, *union*, *update*, *erase*, dan *symmetrical difference*. Software yang digunakan dalam teknik penggambaran serta simulasi tugas akhir ini yaitu menggunakan software ArcGIS (ArcMap10.4.1) untuk pengolahan data vector di *combine* dengan *Global Mapper* untuk pengolahan data Raster. Sedangkan untuk memperoleh data citra satelit menggunakan aplikasi google earth. Dengan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu pola perubahan penggunaan lahan di desa Moncongloe Bulu, Kabupaten Maros.

Adapun variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah kondisi penggunaan lahan desa Moncongloe Bulu tahun 2010, kondisi penggunaan lahan desa Moncongloe Bulu tahun 2015, dan kondisi penggunaan lahan desa Moncongloe Bulu tahun 2021

dengan interval 5 tahun yang diperoleh dari hasil deliniasi data citra satelit google earth dan survei lapangan. Kedua data deliniasi tersebut kemudian di overlay pada aplikasi Arcgis untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan matriks transformasi sehingga dapat mendeteksi perubahan lahan dari satu tipe ke tipe lainnya termasuk luas dan sebaran lainnya.

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru moncongloe. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (I Made Winartha 2006: 155). Adapun bentuk analisis deskriptif kualitatif dengan melihat variabel yang diteliti. Variabel yang dipilih ialah variabel kategori bebas. Data yang telah diperoleh di catat dan diteliti secara rinci setelah data dikumpulkan maka hasil data tersebut disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dari hasil analisis deskriptif kualitatif tersebut maka selanjutnya diinterpretasikan atau dideskriptifkan secara

mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C yang bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe.

3. Analisis SWOT

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru, analisis yang dipakai adalah analisis SWOT. Metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oportunity dan Treaths*) yaitu salah satu metode analisis yang digunakan dalam mengkaji dan menentukan strategi konsep yang tepat di wilayah Kecamatan Moncongloe sebagai upaya peningkatan kualitas hunian di lokasi tersebut dalam pengembangan kawasan kota baru, dimana penekanan bertumpu pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berikut ini penjelasan mengenai proses analisis SWOT :

- a. Tentukan indikator-indikator kekuatan, caranya adalah dengan mengidentifikasi semua indikator yang dapat kita kendalikan sendiri. Semua indikator yang mendukung tujuan kita merupakan indikator-indikator kekuatan. Sebaliknya, indikator yang menghambat atau mengganggu tujuan kita merupakan indikator kelemahan.

- b. Tentukan indikator-indikator kelemahan yang kita miliki. Tujuan kita menentukan indikator ini adalah untuk meningkatkan kinerja kita. Dengan mengidentifikasi kelemahan, kita dapat memperbaiki diri.
- c. Tentukan indikator-indikator peluang
- d. Menentukan indikator ancaman. Tentukan faktor-faktor apa saja yang dapat dianggap mengancam.

Tabel 3.4
Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

| Internal | Kekuatan yang dimiliki | Kelemahan yang dimiliki |
|------------------|--|--|
| Eksternal | Peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang | Ancaman yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlaksana |

Penentuan indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Penentuan indikator peluang dan ancaman disusun berdasarkan tujuan kita dalam membuat analisis SWOT.

- a. Membuat Strategi SO, WO, ST, dan WT

Setelah masing-masing indikator SWOT ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat formulasi strategi dengan

menggabungkan S dengan O, W dengan O, S dengan T, dan W dengan T. Cara ini dilakukan sesuai dengan tujuan kita melakukan analisis SWOT.

Sebelum melakukan pilihan strategi, kita perlu mengetahui pengertian masing-masing kuadran dari hasil penggabungan, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi.

- 1) Kuadran S-O: Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk merebut peluang;
- 2) Kuadran W-O: Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang. Artinya banyak peluang yang dapat diraih, tetapi tidak ditunjang dengan kekuatan yang memadai (lebih banyak kelemahannya) sehingga kelemahan tersebut perlu diminimalisasi terlebih dahulu;
- 3) Kuadran S-T: Strategi yang disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi;
- 4) Kuadran W-T: Strategi yang disusun dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

b. Model Analisis SWOT

Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisis

SWOT, yaitu:

- Pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penentuan nilai skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:
- Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari 4×4 , urutan 2 nilainya $3 \times 4 = 12$, urutan 3 nilainya $2 \times 4 = 8$ dan terendah nilai dari 4 dari 1×4) lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4;
- Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) – 4 (tinggi) untuk kekuatan dan peluang. Sedangkan skala 4 (rendah) – 1 (tinggi) untuk kelemahan dan ancaman. Namun jika tidak ada pembandingan, maka nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi (misalnya skala 4 untuk peluang yang paling tinggi);
- Nilai tertinggi untuk bobot X peringkat adalah 1 – 2 (kuat) dan terendah adalah 0 -1 (lemah).

Tabel 3.5 Internal Strategy Factor Analysis (IFAS)

| No. | Kekuatan | SP | K | Sp x K | Bobot |
|---------------|-----------|----|---|--------|-------|
| | | | 4 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 4 | | |
| Jumlah | | | | | |
| No. | Kelemahan | SP | K | Sp x K | Bobot |
| | | | 4 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 4 | | |
| Jumlah | | | | | |

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 3.6 Nilai Skor IFAS

| No. | Kekuatan | Bobot | Rating (1-4) | Skor |
|---------------|-----------|-------|-----------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah | | | | |
| No. | Kelemahan | Bobot | Rating (4-1) | Skor |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Sumber: Hasil Analisis

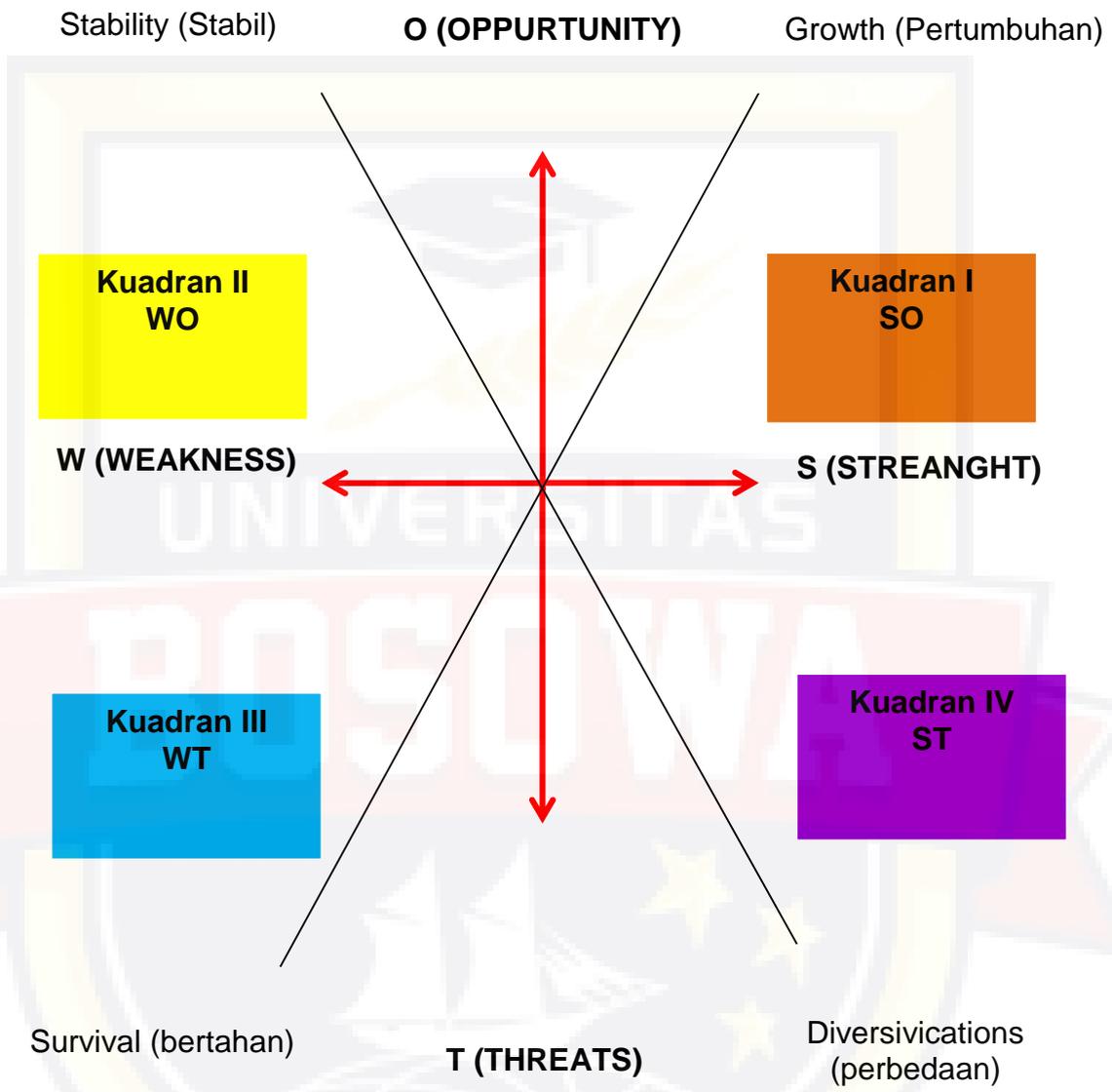
Tabel 3.7 Nilai Skor Internal Strategi Factor Analysis (IFAS)

| No. | Peluang | SP | K | Sp x K | Bobot |
|---------------|---------|----|---|--------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah | | | | | |
| No. | Ancaman | SP | K | Sp x K | Bobot |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

Tabel 3.8 Nilai Skor EFAS

| No. | Peluang | Bobot | Rating (1-4) | Skor |
|---------------|---------|-------|-----------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah | | | | |
| No. | Ancaman | Bobot | Rating (4-1) | Skor |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Sumber : Hasil Analisis



Gambar 3.1 Kuadran SWOT

Tabel 3.9 Matriks Strategi SWOT

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| IFAS | KELEMAHAN/ WEAKNESSES (W) | KEKUATAN/ STRENGTHS (S) |
| | | |
| EFAS | | |
| PELUANG/ OPURTUNITY (O) | STRATEGI (WO) | STRATEGI (SO) |
| | KUADRAN II | KUADRAN I |
| ANCAMAN/ TREAHTS(T) | STRATEGI (WT) | STRATEGI (ST) |
| | KUADRAN III | KUADRAN IV |

G. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang termasuk dalam lingkup kajian penelitian ini yakni :

1. Determinan Penurunan Kualitas Lingkungan (Y) biasanya terjadi karena kegiatan manusia yang semakin intensif dan tidak terarah sehingga menyebabkan polusi udara, kerusakan lahan dan kondisi jalan bermasalah.

2. Alih fungsi guna lahan (X_1) adalah perubahan spasial kawasan pinggiran kota dengan melihat fungsi penggunaan lahan yang mengalami perubahan.
3. Aktifitas tambang galian golongan C (X_2) adalah perubahan tata guna tanah dan melihat dampak aktivitas tambang terhadap kualitas lingkungan. Yang dimaksud dengan pertambangan sesuai dengan studi kasus adalah tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
4. Tambang galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan B ataupun A yakni Granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir.
5. Mobilitas Kendaraan (X_3) adalah Melihat tingkat pergerakan kendaraan tambang pada lokasi penelitian.
6. Penggunaan Lahan adalah sebuah pemanfaatan lahan sesuai dengan kondisi eksisting alam.
7. Wilayah adalah ruang yang menjadi tempat dimana penelitian di lakukan/tempat di mana tambang galian tersebut berada (Tambang galian tipe D di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros).
8. Desa merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

9. Wilayah Peri Urban adalah wilayah pedesaan yang berkembang secara signifikan setelah memperoleh dampak luapan kegiatan kota dan kemudian memiliki sifat-sifat campuran dari keduanya.
10. Masyarakat yang di maksudkan dalam penelitian ini ialah semua penduduk yang berada di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
11. Pemetaan adalah Proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara atau metode tertentu hingga di dapatkan hasil berupa *softcopy* maupun *hardcopy* peta dan berbentuk vektor maupun raster.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Maros

1. Aspek Fisik Dasar

a. Wilayah Administrasi

Kabupaten Maros terletak di sebagian barat Sulawesi Selatan antara $40^{\circ}45'$ - $50^{\circ}07'$ lintang selatan dan $109^{\circ}205'$ - $129^{\circ}12'$ bujur timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah kabupaten Maros $1.619,12 \text{ Km}^2$ yang secara administrasi pemerintahannya terdiri dari 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan.

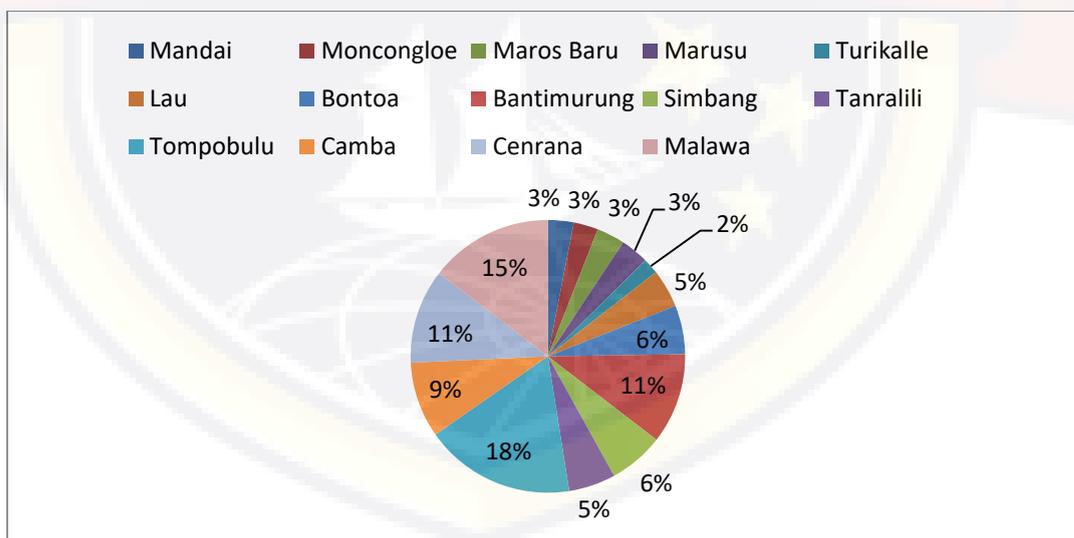
Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Maros dalam angka 2021, kecamatan terluas yaitu ialah Kecamatan Tompobulu dengan luas $287,66 \text{ Km}^2$, dan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Turikale dengan luas $29,93 \text{ Km}^2$. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020

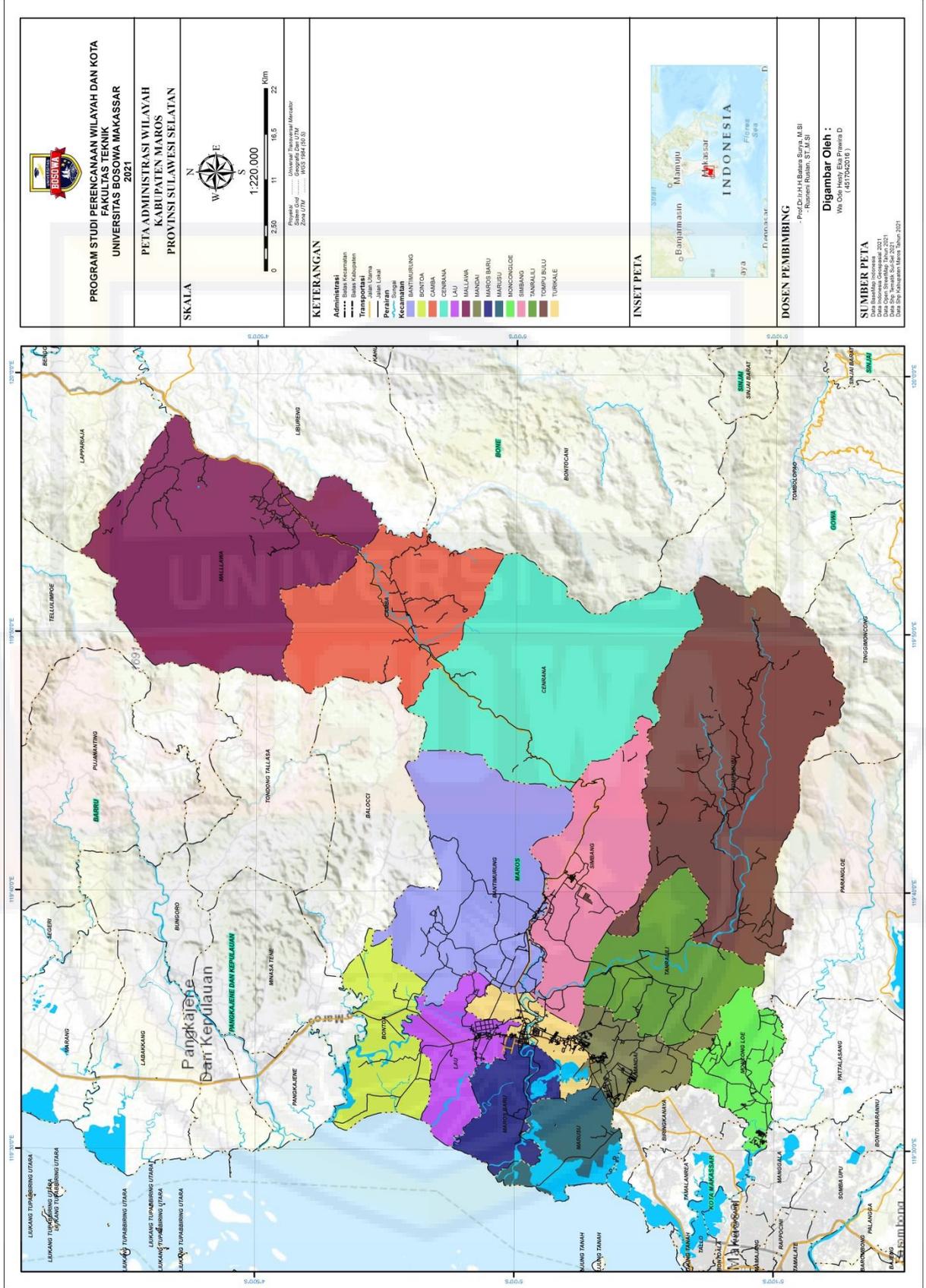
| No. | Kecamatan | Luas (Km ²) | | |
|-----|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | | Luas Daratan | Luas Perairan | Luas Total |
| 1 | Mandai | 49.11 | - | 49.11 |
| 2 | Moncongloe | 46.87 | - | 46.87 |
| 3 | Maros Baru | 53.76 | - | 53.76 |
| 4 | Marusu | 53.73 | - | 53.73 |
| 5 | Turikalle | 29.93 | - | 29.93 |
| 6 | Lau | 73.83 | - | 73.83 |
| 7 | Bontoa | 93.52 | - | 93.52 |
| 8 | Bantimurung | 173.7 | - | 173.7 |
| 9 | Simbang | 105.31 | - | 105.31 |
| 10 | Tanralili | 89.45 | - | 89.45 |
| 11 | Tompobulu | 287.66 | - | 287.66 |
| 12 | Camba | 145.36 | - | 145.36 |
| 13 | Cenrana | 180.97 | - | 180.97 |
| 14 | Malawa | 235.92 | - | 235.92 |
| | Maros | 1.619,12 | | 1.619,12 |

Sumber : BPS Kabupaten Maros dalam angka 2021

Diagram 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros



Sumber : BPS Kabupaten Maros dalam angka 2021



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros

b. Iklim

Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,70°C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,5°C (terjadi pada bulan Juli 2020) sedangkan yang paling tinggi adalah 33,3°C (terjadi pada bulan September 2020). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Rata-rata dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2020

| Bulan | Suhu Udara | | | Kelembaban Udara | | |
|-----------|------------|------|-----------|------------------|-----|-----------|
| | Maks | Min | Rata-rata | Maks | Min | Rata-rata |
| Januari | 30,8 | 24,9 | 27,3 | 97 | 77 | 86 |
| Februari | 30,5 | 24,7 | 27,0 | 98 | 81 | 88 |
| Maret | 31,2 | 24,7 | 26,9 | 96 | 78 | 85 |
| April | 31,7 | 23,7 | 27,7 | 94 | 77 | 85 |
| Mei | 32,2 | 25,2 | 28,1 | 92 | 75 | 84 |
| Juni | 31,9 | 24,4 | 27,5 | 90 | 66 | 80 |
| Juli | 31,7 | 23,5 | 27,1 | 89 | 67 | 79 |
| Agustus | 33,1 | 24,0 | 28,0 | 90 | 51 | 71 |
| September | 33,3 | 24,2 | 28,3 | 83 | 49 | 72 |
| Oktober | 33,0 | 24,4 | 28,2 | 88 | 54 | 77 |
| November | 31,9 | 24,5 | 27,6 | 93 | 69 | 84 |
| Desember | 29,8 | 24,3 | 26,4 | 97 | 77 | 89 |

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

c. Curah Hujan

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis dengan curah hujan rata-rata sekitar 163 mm setiap bulannya, dengan jumlah 121 hari hujan berkisar hari selama Tahun 2020. Pada bulan Januari

curah hujan menyentuh angka 735 mm³, dimana ini merupakan curah hujan tertinggi di tahun 2020, dan di bulan Agustus sampai Oktober tidak terjadi curah hujan 0 mm³, untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2020

| Bulan | Curah Hujan (mm ³) | Hari Hujan | Penyinaran Matahari (%) |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Januari | 557 | 24 | 57 |
| Februari | 564 | 26 | 42 |
| Maret | 339 | 17 | 10 |
| April | 138 | 18 | 70 |
| Mei | 233 | 17 | 52 |
| Juni | 67 | 9 | 69 |
| Juli | 33 | 12 | 74 |
| Agustus | 11 | 4 | 90 |
| September | 53 | 7 | 80 |
| Oktober | 136 | 12 | 81 |
| November | 321 | 20 | 62 |
| Desember | 900 | 29 | 27 |

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

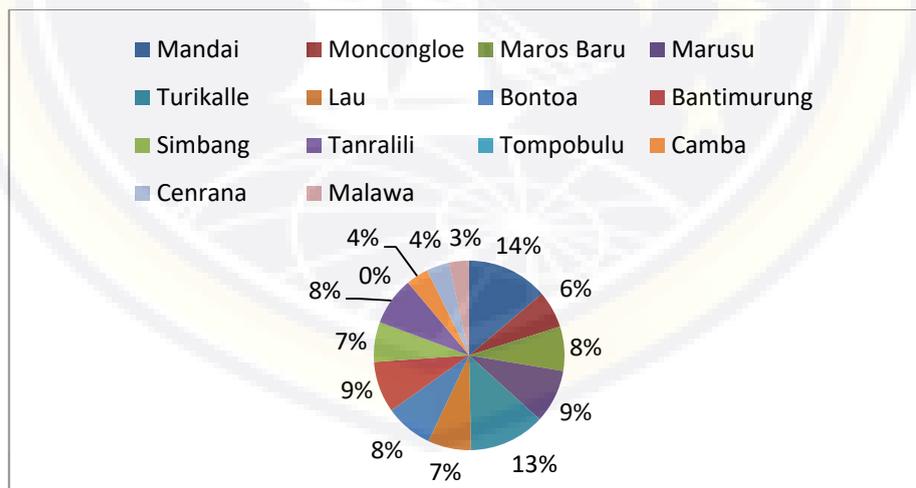
Berdasarkan data BPS Kabupaten Maros dalam angka tahun 2021, penduduk Kabupaten Maros pada Tahun 2020 sebanyak 391.774 jiwa, dan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk 48.558 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020**

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk |
|-----|---------------|-----------------|
| 1 | Mandai | 51.801 |
| 2 | Moncongloe | 23.728 |
| 3 | Maros Baru | 28.360 |
| 4 | Marusu | 34.324 |
| 5 | Turikalle | 48.558 |
| 6 | Lau | 27.542 |
| 7 | Bontoa | 30.604 |
| 8 | Bantimurung | 32.825 |
| 9 | Simbang | 25.538 |
| 10 | Tanralili | 30.964 |
| 11 | Tompobulu | 15,932 |
| 12 | Camba | 14.223 |
| 13 | Cenrana | 14.562 |
| 14 | Malawa | 12.813 |
| | Jumlah | 391.774 |

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

**Diagram 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros Tahun 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2021

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

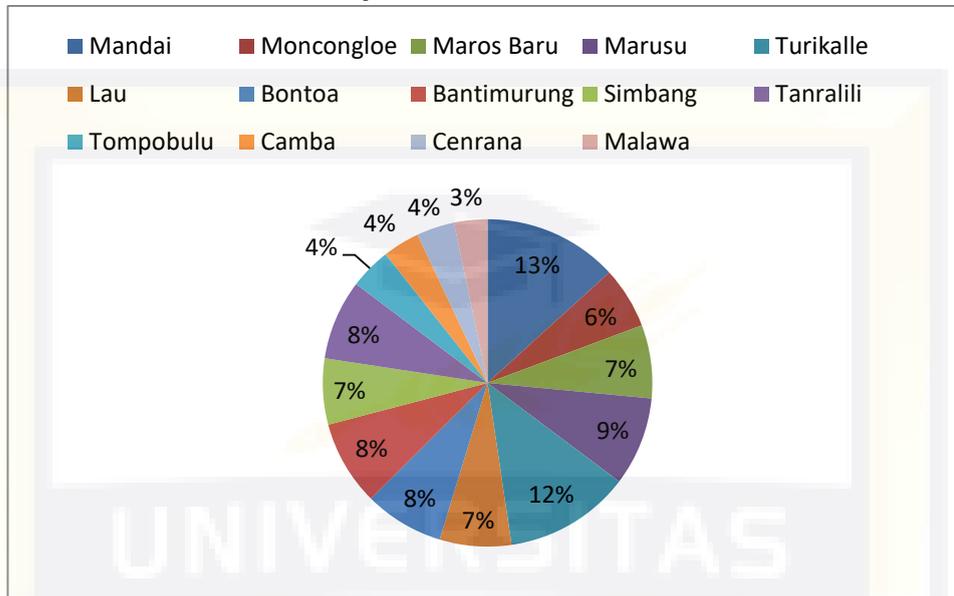
Berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2021 Kabupaten Maros, tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.622 jiwa/km². Sedangkan yang terendah di Kecamatan Malawa, 54 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Presentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km ² |
|-----|--------------|---------------------|--|
| 1 | Mandai | 13,22 | 1.055 |
| 2 | Moncongloe | 6,06 | 506 |
| 3 | Maros Baru | 7,24 | 528 |
| 4 | Marusu | 8,76 | 639 |
| 5 | Turikalle | 12,39 | 1.622 |
| 6 | Lau | 7,03 | 373 |
| 7 | Bontoa | 7,81 | 327 |
| 8 | Bantimurung | 8,38 | 189 |
| 9 | Simbang | 6,52 | 243 |
| 10 | Tanralili | 7,90 | 346 |
| 11 | Tompobulu | 4,07 | 55 |
| 12 | Camba | 3,63 | 98 |
| 13 | Cenrana | 3,72 | 80 |
| 14 | Malawa | 3,27 | 54 |
| | Maros | 100,00 | 242 |

Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2021

Diagram 4.3 Distribusi dan kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2021

c. Permukiman

Perkembangan kawasan harus di dasarkan pada kemampuan daya dukung lahan, struktur kota, kondisi fisik kawasan dan masalah estetika kawasan untuk itu perlu adanya upaya pengendalian terhadap perkembangan pemukiman agar kiranya tidak menimbulkan efek negatif terhadap vitalitas kawasan dan citra kawasan pemukiman di Kecamatan Moncongloe

1) Sertifikat Tanah

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Di Kecamatan sendiri terdapat empat jenis hak tanah yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Adapun tabel sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut kecamatan dan jenis hak tanah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6 Banyaknya Sertifikasi Tanah yang dikeluarkan menerut Kecamatan dan Jenis Hak tanah Tahun 2019

| No. | Kecamatan | Hak Atas Tanah | | | | Jumlah |
|-----|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|--------------|
| | | Hak Milik | Hak Guna Bangunan | Hak Guna Usaha | Hak Pakai | |
| 1 | Mandai | 33 | 2 | - | - | 35 |
| 2 | Moncongloe | 66 | 12 | - | 1 | 79 |
| 3 | Maros Baru | 3 | - | - | - | 3 |
| 4 | Marusu | 51 | 23 | - | - | 74 |
| 5 | Turikalle | 1.019 | - | - | - | 1.019 |
| 6 | Lau | 7 | - | - | - | 7 |
| 7 | Bontoa | 142 | - | - | - | 142 |
| 8 | Bantimurung | 6 | - | - | - | 6 |
| 9 | Simbang | 1.806 | - | - | - | 1.806 |
| 10 | Tanralili | 75 | 2 | - | - | 77 |
| 11 | Tompobulu | 215 | 1 | - | - | 252 |
| 12 | Camba | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | Cenrana | 2 | - | - | - | 2 |
| 14 | Malawa | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 3.462 | 39 | - | 1 | 3.497 |

Ket: *Data 2020 Belum Tersedia

Sumber: BPS, Kabupaten Maros Dalam Angka, 2020

B. Gambaran Umum Kecamatan Moncongloe

1. Aspek Fisik Dasar

a. Keadaan Geografis

Keadaan geografis Kecamatan Moncongloe merupakan daerah bukan pantai yang berbentuk daratan. Dari lima daerah wilayah administrasi yang ada, kesemuanya berstatus desa dengan topografi dataran rendah, serta ketinggian rata-rata lima puluh meter di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Moncongloe sekitar 46,87 Km². Berdasarkan administrasi Kecamatan Moncongloe berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanralili
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar

Berdasarkan keadaan geografis Kecamatan Moncongloe dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Keadaan Geografis Kecamatan Moncongloe Tahun 2019

| Desa | Bukan Pantai | | | |
|--------------------|--------------|--------|------------------|----------|
| | Pantai | Lembah | Pegunungan Bukit | Daratan |
| Moncongloe Lappara | - | - | - | |
| Moncongloe Bulu | - | - | - | |
| Moncongloe | - | - | - | |
| Bonto Bunga | - | - | - | |
| Bonto Marannu | - | - | - | |
| Jumlah | - | - | - | 5 |

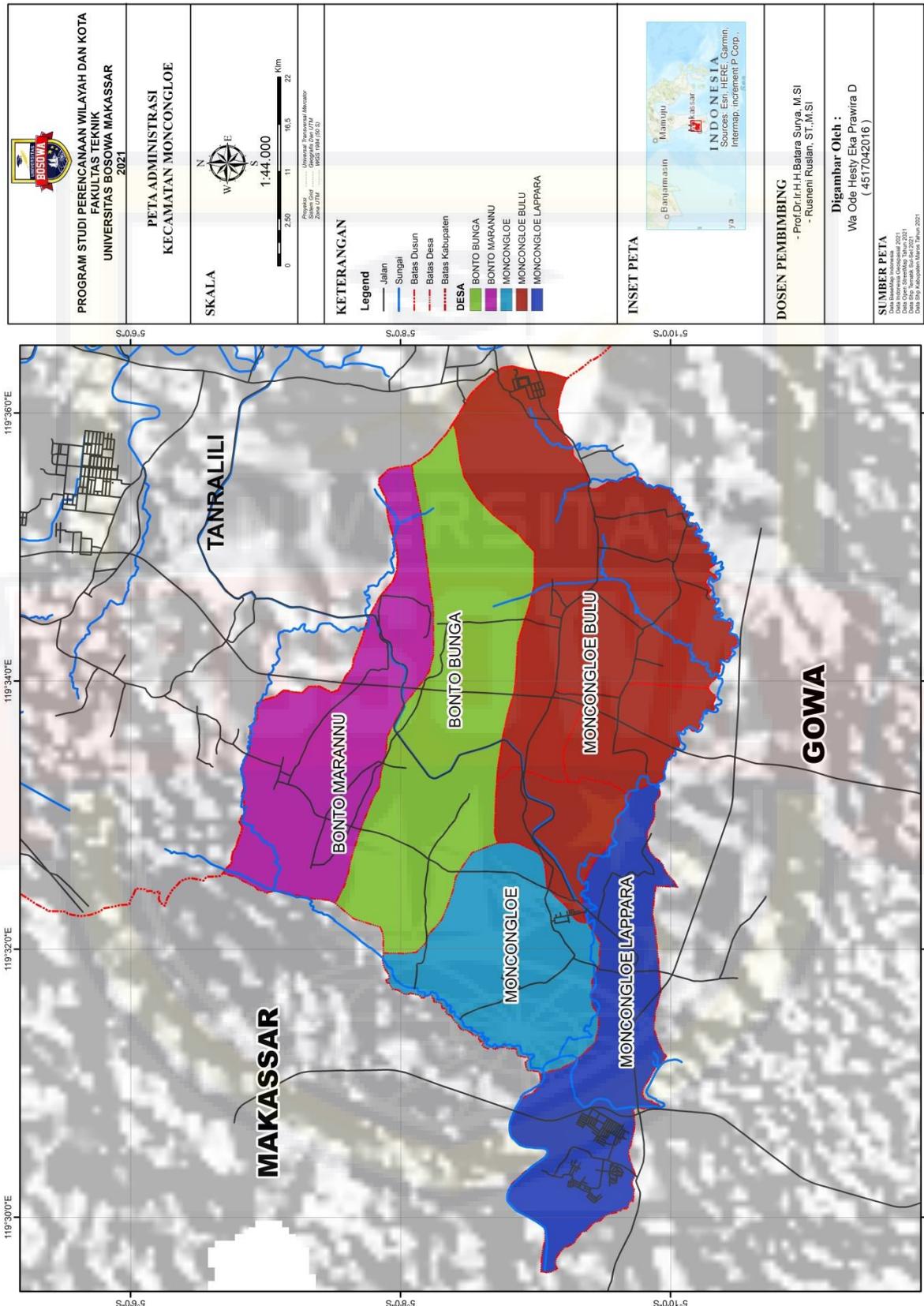
Sumber : BPS, Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 4.8 di bawah luas Kecamatan Moncongloe sekitar 46,87 Km². Desa Moncongloe Bulu adalah desa yang paling luas di bandingkan dengan desa- desa yang lain memiliki luas yaitu 12,76 Km² dibandingkan dengan Desa Moncongloe Lappara dengan luas 9,73 Km², dan Desa Moncongloe dengan luas 6,54 Km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Luas Wilayah Kecamatan Moncongloe Tahun 2020

| No. | Desa | Luas (Km ²) |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Moncongloe Lappara | 9,73 |
| 2 | Moncongloe Bulu | 12,76 |
| 3 | Moncongloe | 6,58 |
| 4 | Bonto Bunga | 10,02 |
| 5 | Bonto Marannu | 7,78 |
| Jumlah | | 46,87 |

Sumber : BPS, Kecamatan Moncongloe Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Moncongloe

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah RT, RW, RK, Dusun, dan Blok Sensus

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk 23.728 jiwa pada tahun 2020, terdapat 88 jumlah rukun tetangga (RT), 17 rukun warga (RW), 17 dusun, dan tidak terdapat rukun keluarga (RK) di Kecamatan Moncongloe, data ini berdasarkan BPS Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2021. Jumlah rukun tetangga (RT) tertinggi terdapat di Desa Moncongloe Lappara dengan jumlah 26 rukun tetangga (RT), dan untuk rukun warga (RW) berjumlah 3, dusun berjumlah 3, sedangkan desa yang memiliki jumlah paling sedikit yaitu Desa Bonto Bunga dengan jumlah 11 RT, 3 RW, dan 3 dusun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Jumlah RT, RW, Dusun, dan Blok Sensus di Kecamatan Moncongloe Tahun 2020

| Desa | RT | RW | RK | Dusun |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Moncongloe Lappara | 26 | 3 | - | 3 |
| Moncongloe Bulu | 19 | 5 | - | 5 |
| Moncongloe | 15 | 3 | - | 3 |
| Bonto Bunga | 11 | 3 | - | 3 |
| Bonto Marannu | 17 | 3 | - | 3 |
| Jumlah | 88 | 17 | 0 | 17 |

Sumber : BPS Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2021

b. Luas Desa, Jumlah Penduduk, dan Kepadatannya

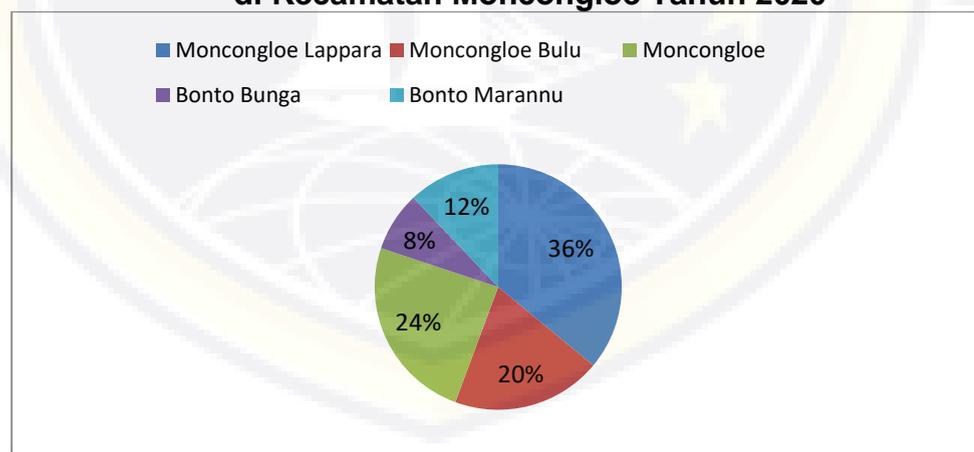
Berdasarkan data tahun 2021, luas keseluruhan Kecamatan Moncongloe adalah 46,87 Km², dengan kepadatan penduduk yang mencapai 506 jiwa/km². Penduduk Kecamatan Moncongloe berjumlah 23.728 jiwa. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Moncongloe yaitu, 883 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kecamatan Moncongloe Tahun 2020

| Desa | Luas (Km ²) | Penduduk | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|--------------------|-------------------------|---------------|--|
| Moncongloe Lappara | 9,73 | 8.549 | 879 |
| Moncongloe Bulu | 12,76 | 4.654 | 365 |
| Moncongloe | 6,58 | 5.812 | 883 |
| Bonto Bunga | 10,02 | 1.856 | 185 |
| Bonto Marannu | 7,78 | 2.857 | 367 |
| Jumlah | 46,87 | 23.728 | 506 |

Sumber : BPS Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2021

Diagram 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Moncongloe Tahun 2020



Sumber : BPS Kecamatan Moncongloe Dalam Angka Tahun 2021

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

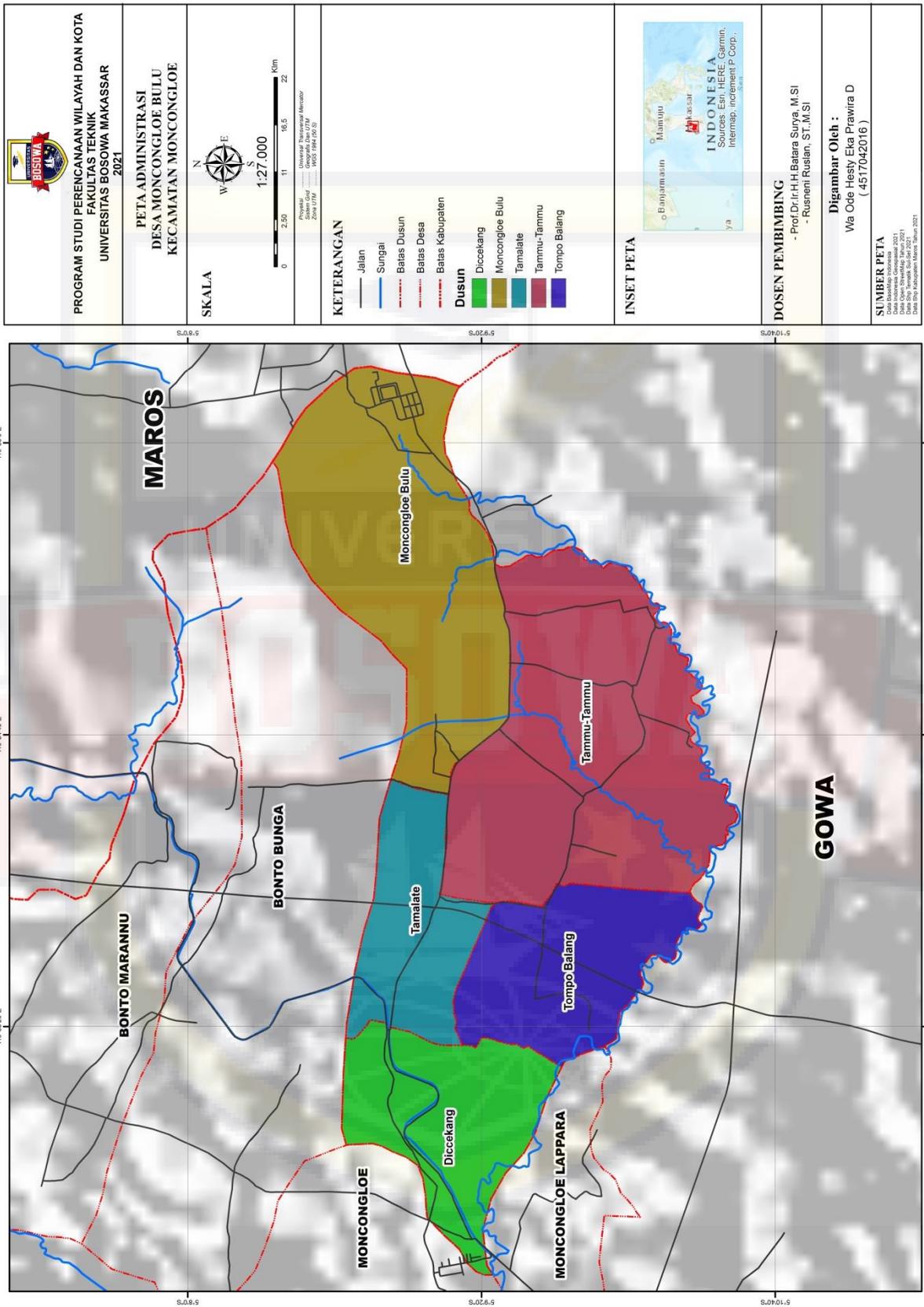
1. Letak Geografis dan Administratif Lokasi Penelitian

Desa Moncongloe Bulu merupakan salah satu desa dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Moncongloe. Secara fisik Desa Moncongloe Bulu merupakan desa yang berbatasan dengan Kota Makassar dan luas Desa Moncongloe Bulu sekitar 1.487,488 Ha dengan topografi dataran rendah serta ketinggian rata-rata lima puluh meter di atas permukaan laut serta memiliki jumlah penduduk 4.654 jiwa.

Desa Moncongloe Bulu yang berada di wilayah peri urban atau daerah pinggiran Kota Makassar. Secara administratif Desa Moncongloe Bulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonto Bunga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moncongloe Lappara dan Desa Moncongloe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanralili

Secara teritorial Desa Moncongloe Bulu terbagi dalam 5 Rukun Warga (RW) dengan memiliki berbagai macam profesi, menurut data survey lapangan terdapat aktivitas tambang galian golongan C yang berada di Desa Moncongloe Bulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar berikut ini :



Gambar 4.3 Peta Administrasi Desa Moncongloe Bulu

2. Kondisi Lokasi Penelitian

Alih fungsi guna lahan wilayah periurban ke penggunaan lain di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros yang mana konversi lahan pertanian ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap produktivitas lahan. Intensitas konversi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan pertanian yang beralih fungsi tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori sedang dan rendah.

Akibat dari adanya alih fungsi guna lahan di Desa Moncongloe Bulu, dapat menjadi sebuah ancaman yang serius terhadap produktivitas tata guna lahannya karena dampaknya bersifat permanen. Sumber daya lahan yang telah dikonversi ke penggunaan lain di luar pertanian sangat kecil peluangnya untuk berubah kembali menjadi lahan pertanian. Keberadaan lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke non pertanian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek. Salah satu dampak alih fungsi guna lahan di Desa Moncongloe Bulu yaitu kerusakan lingkungan. Untuk perubahan kondisi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.4 Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2010
Sumber : Google Earth



Gambar 4.5 Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2015
Sumber : Google Earth



Gambar 4.6 Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2021
Sumber : Google Earth

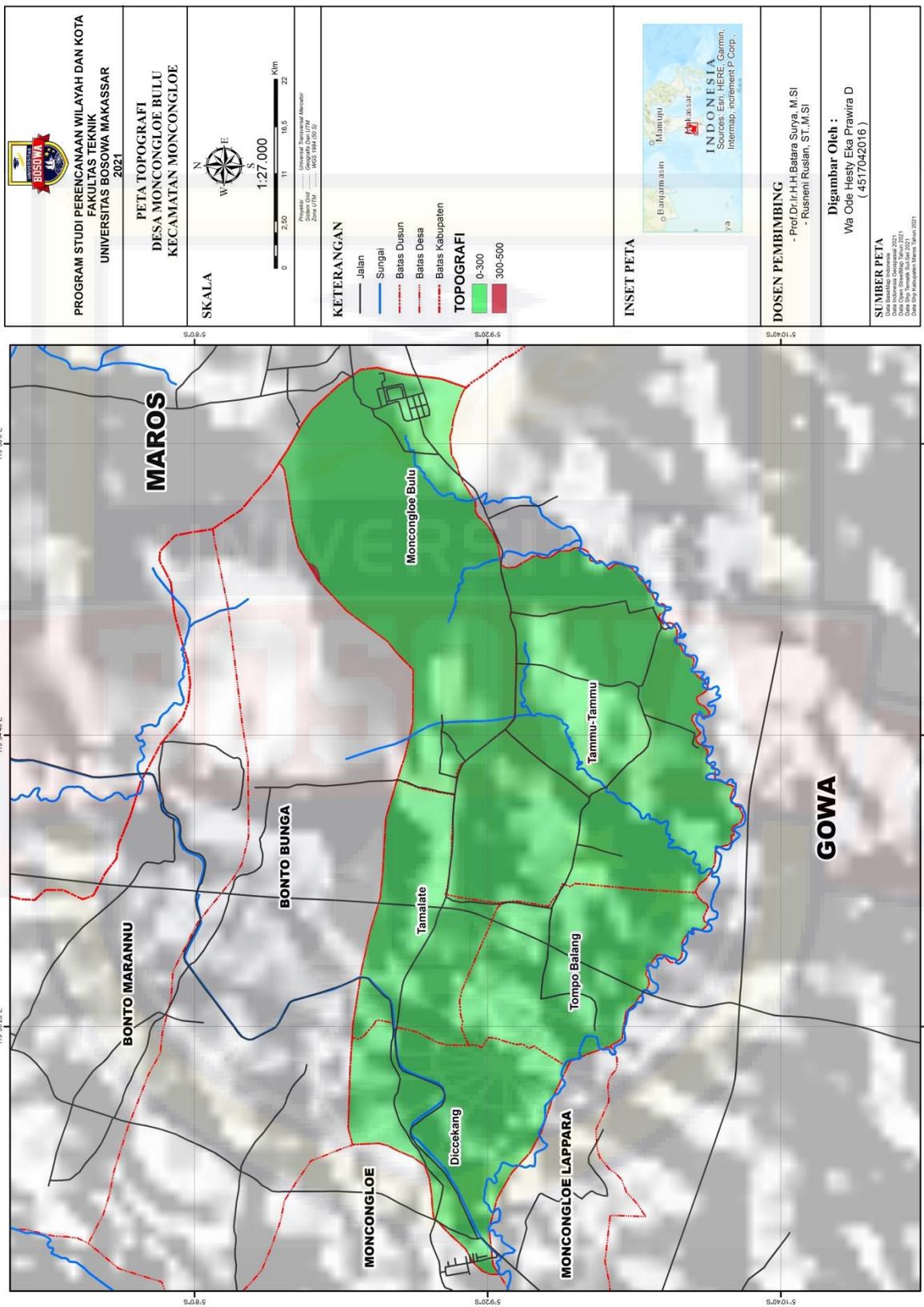
3. Kondisi Fisik Dasar Lokasi Penelitian

Kajian mengenai aspek fisik dasar lokasi penelitian ini meliputi kondisi topografi atau kemiringan lereng, aspek klimatologi atau kondisi iklim dan curah hujan, kondisi geologi dan jenis tanah, serta aspek penggunaan lahan. Berikut ini pembahasan selengkapnya.

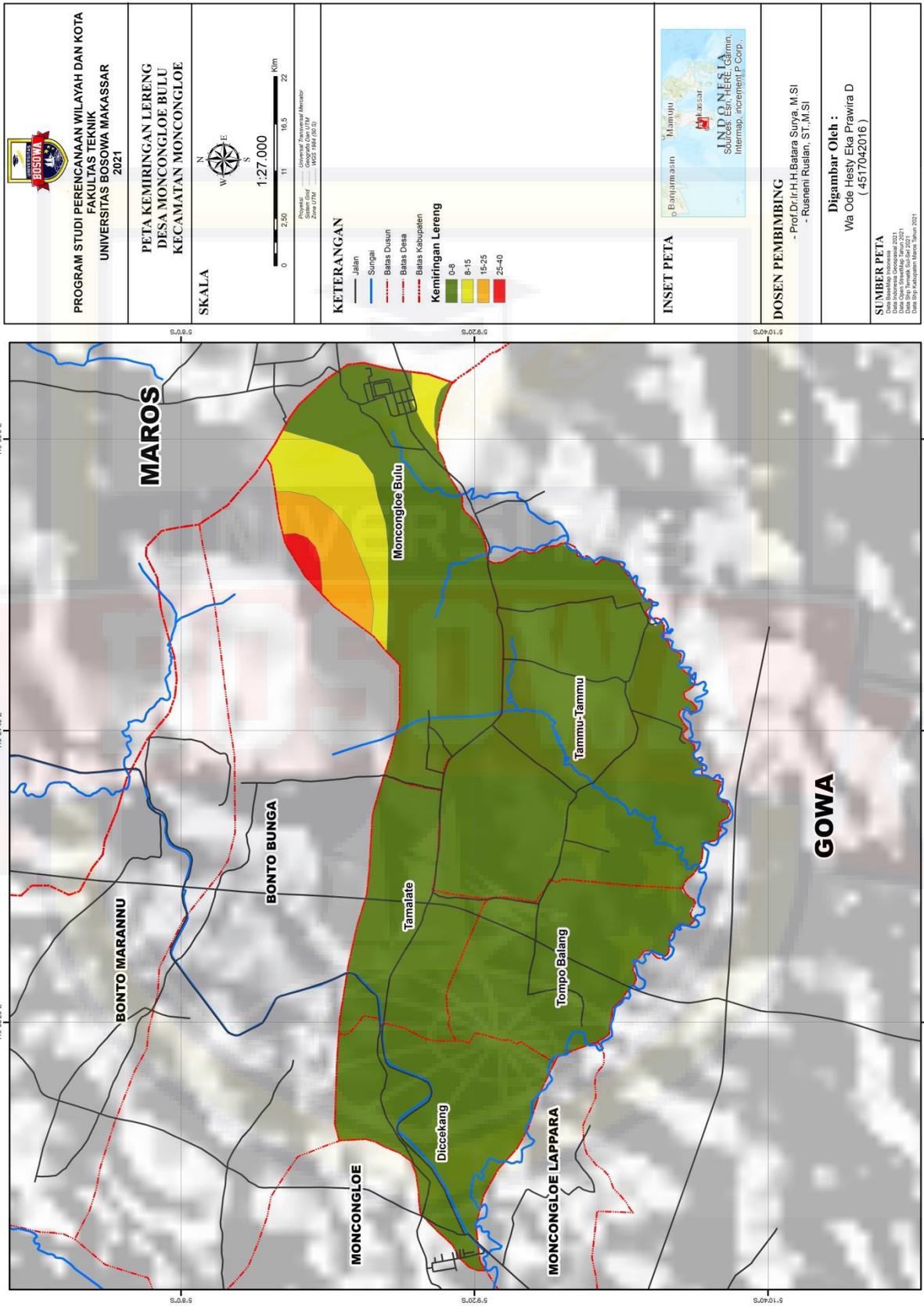
a. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi lokasi penelitian merupakan sebuah wilayah daratan rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara ketinggian 0- 50 mdpl. Wilayah dengan ketinggian 300 - 500 mdpl yang merupakan rentang ketinggian paling mendominasi.

Adapun kondisi kemiringan lereng, lokasi penelitian dalam hal ini adalah Desa Moncongloe Bulu merupakan wilayah dengan kelerengan yang bervariasi antara 0-40%. Rentang kemiringan lereng tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelerengan yakni kelerengan 0-8%, 8-15%, 15-25%, dan kelerengan 25-40%. Dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.7 Peta Kondisi Topografi Desa Moncongloe Bulu



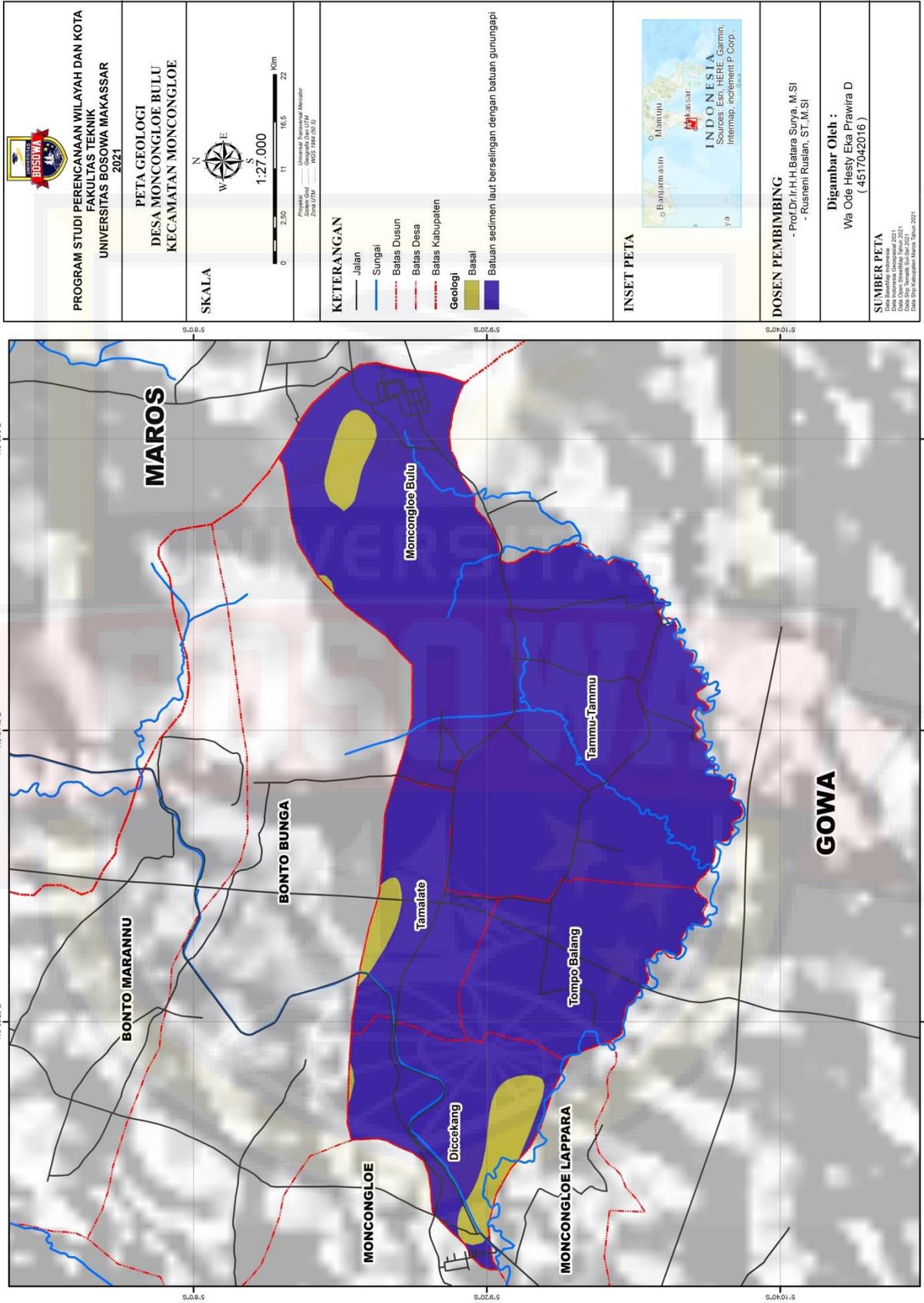
Gambar 4.8 Peta Kemiringan Lereng Desa Moncongloe Bulu

b. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

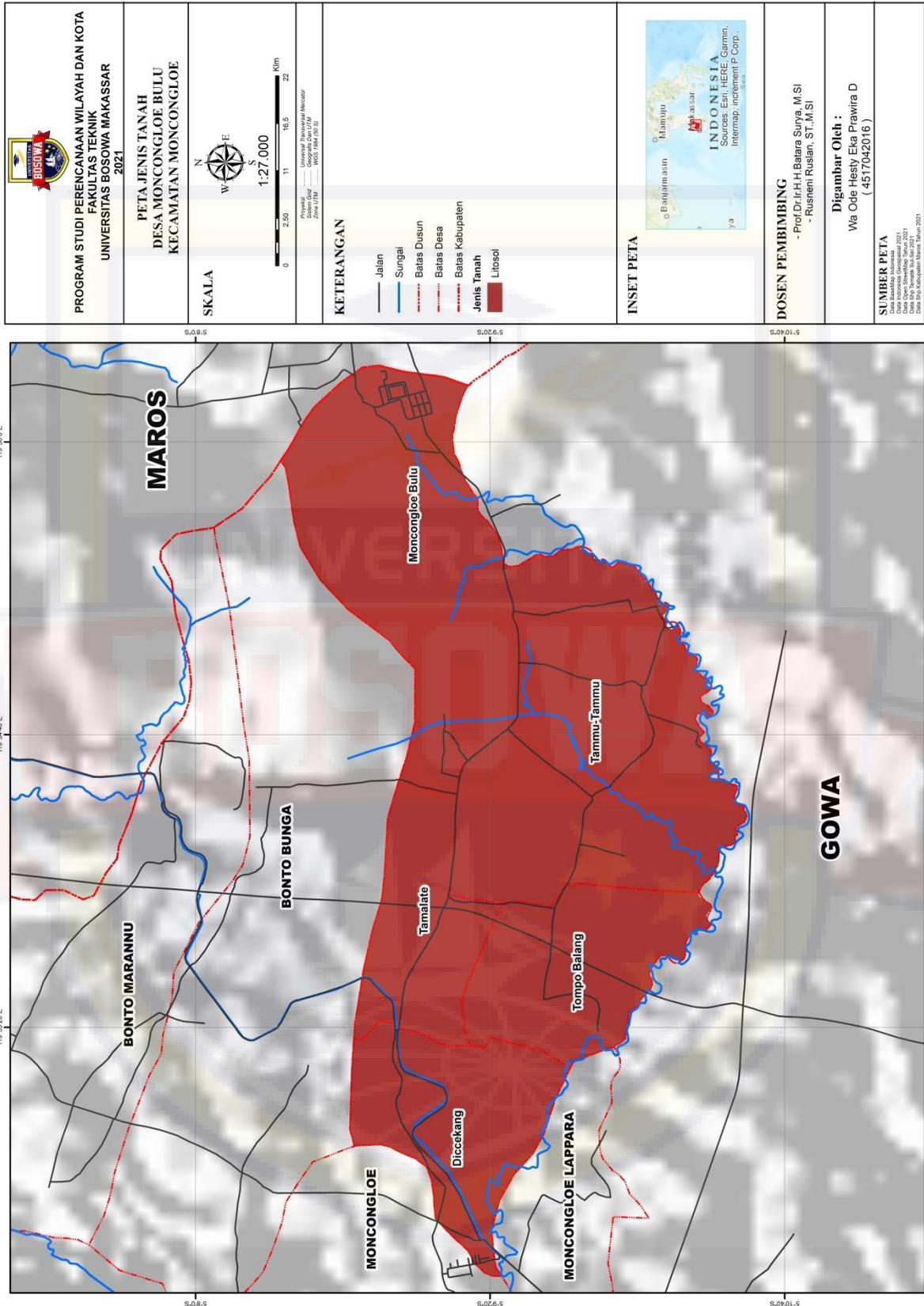
Dalam kawasan ini, terdapat dua jenis kelompok formasi batuan yakni formasi batuan basal dan formasi batuan camba. Formasi camba tersusun dari batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunungapi. Batuan ini terdiri dari batupasir tufaan berselingan dengan tufa, batupasir, batulanau dan batulempung. Umumnya mengeras kuat dan sebagian kurang padat, tebal perlapisan 5 – 100 cm, tufanya berbutir halus hingga lapilli, mengandung fosil foraminifera kecil yang menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen atas serta diendapkan dalam lingkungan neritik (laut dangkal). Formasi ini tebalnya tidak kurang dari 1.000 m, merupakan satuan batuan tertua. Kemudian batuan terobosan basal dan andesit yang menerobos batuan formasi camba yang bertekstur porfiri dengan fenokris piroksen kasar sebagian mencapai ukuran lebih 1 cm, berwarna kelabu tua kehitaman dan kehijauan. Sedangkan endapan aluvium tersusun dari material lepas (tidak terkonsolidasi), berukuran lempung sampai bongkah.

Adapun jenis tanah di wilayah penelitian dalam hal ini Desa Moncongloe Bulu yakni seluruh hamparan merupakan jenis tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari batuan beku yang berasal dari proses meletusnya gunung berapi

dan juga sedimen keras dengan proses pelapukan kimia (dengan menggunakan bantuan organisme hidup) dan fisika (dengan bantuan sinar matahari dan hujan) yang belum sempurna. Dan hal ini tentu membuat struktur asal batuan induknya masih terlihat. dan hal ini pula yang menyebabkan bahwa tanah litosol disebut juga dengan tanah yang paling muda, sehingga bahan induknya dangkal dan sangat sering terlihat di permukaan sebagai batuan padat yang padu. Tanah litosol ini merupakan jenis tanah yang belum lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan. Tanah litosol sama halnya dengan jenis tanah yang lainnya, yakni mempunyai kandungan tersendiri. Kandungan yang dimiliki oleh tanah litosol adalah unsur hara. Setiap jenis tanah pasti mempunyai kandungan unsur hara. Namun yang membedakan adalah mengenai seberapa banyak unsur hara yang terkandung di dalam tanah tersebut. Seperti halnya tanah yang lainnya, tanah litosol juga mempunyai kandungan unsur hara. Tanah litosol merupakan jenis tanah yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu, mempunyai lapisan bumi yang tidak terlalu tebal hanya 45 cm saja, merupakan jenis tanah baru, mempunyai penampang yang besar, berbentuk krikil, pasir, dan bebatuan kecil, dan memiliki tekstur tanah yang bervariasi.



Gambar 4.9 Peta Geologi Desa Moncongloe Bulu



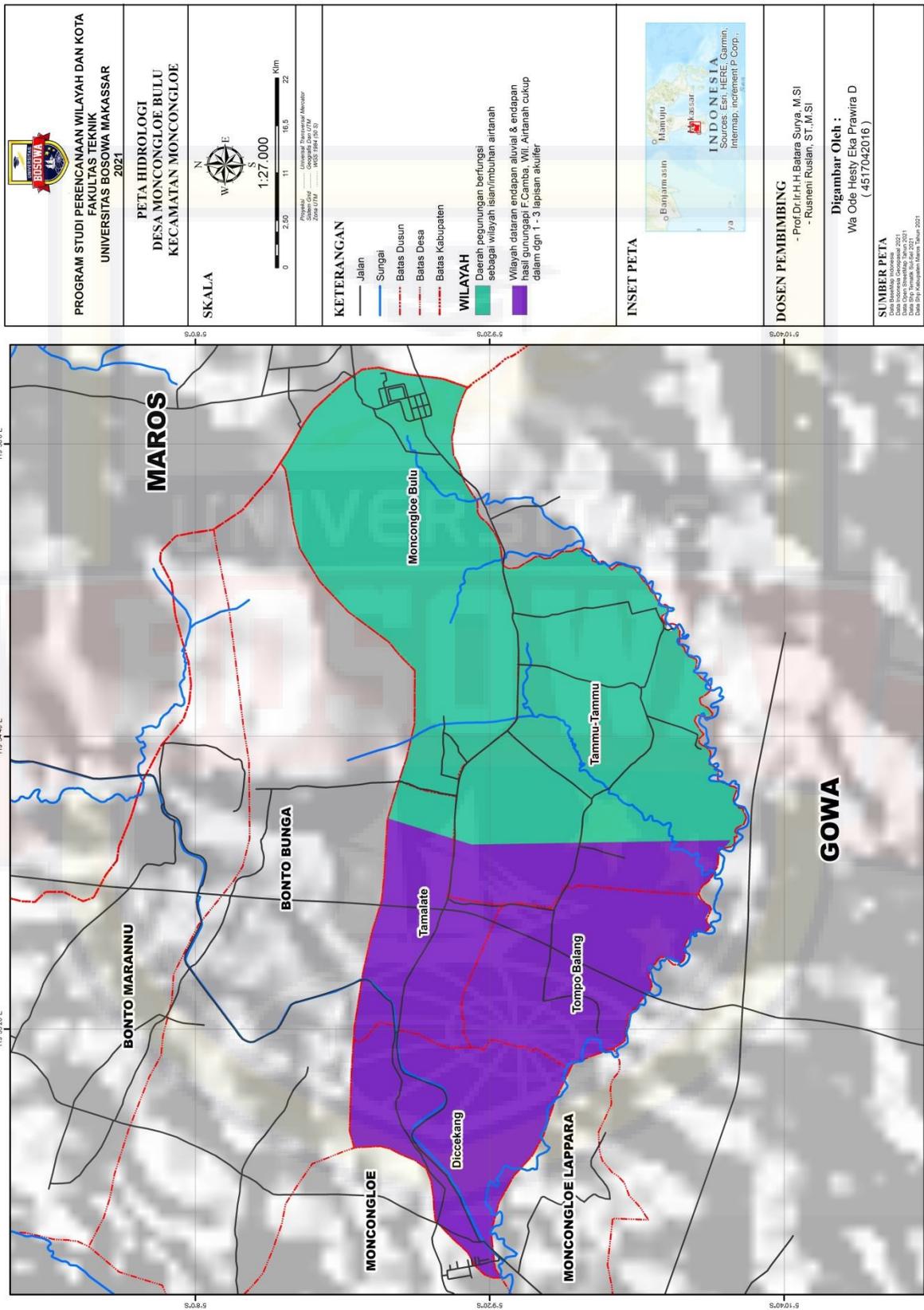
Gambar 4.10 Peta Jenis Tanah Desa Moncongloe Bulu

c. Kondisi Hidrologi

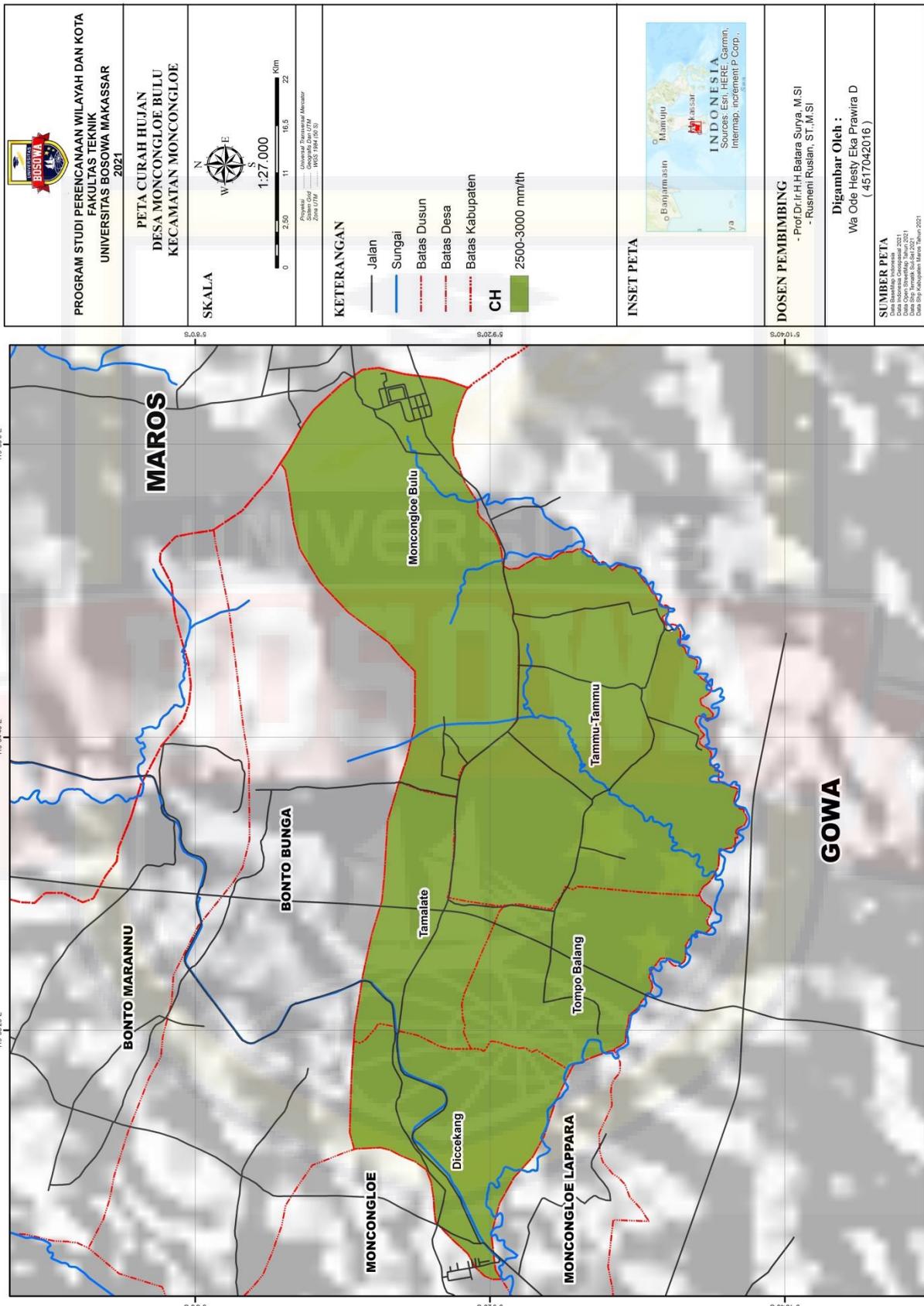
Adapun kondisi hidrologi lokasi penelitian yakni merupakan hamparan daerah pegunungan yang berfungsi sebagai wilayah isian/ imbuhan air tanah. Hal ini disebabkan karena Desa Moncongloe Bulu dilalui oleh sungai Lekopancing. Potensi sumberdaya air di Desa Moncongloe Bulu telah dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk berbagai keperluan yang bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan berupa air sungai) sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

d. Kondisi Curah Hujan

Desa Moncongloe Bulu mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 2.500 – 3.000 mm/ tahun. Tipe iklim wilayah penelitian menurut sistem klasifikasi Schmith dan Ferguson (1951) yang didasarkan pada besarnya curah hujan, yaitu Bulan Basah (> 200 mm) dan Bulan Kering (<100 mm) adalah termasuk kedalam Type A. Bulan basah 5 bulan/ tahun. Curah hujan terbanyak adalah bulan januari dengan rata-rata curah hujan 38,2 mm/hr.



Gambar 4.11 Peta Hidrologi Desa Moncongloe Bulu



Gambar 4.12 Peta Kondisi Curah Hujan Desa Moncongloe Bulu

e. Kondisi Penggunaan Lahan

Lahan merupakan permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Lahan adalah sumberdaya alam yang terbatas, dimana dalam penggunaannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukannya dirumuskan dalam rencana-rencana dengan maksud demi kesejahteraan masyarakat. Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusia lah lahan dapat berubah fungsinya, sebagai contoh berubahnya bentuk pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan pertambangan. Dengan demikian lahan adalah sumberdaya yang dapat dieksploitasi, dalam kaitannya dengan alih fungsi guna lahan hendaknya dalam memanfaatkan sumberdaya lahan hendaknya dilakukan secara benar dan menjaga kelestariannya.

Penggunaan lahan di Desa Moncongloe Bulu terdiri atas penggunaan lahan hutan, perkebunan, permukiman, Sawah, semak belukar, dan kawasan pertambangan. Jenis penggunaan lahan terbesar di lokasi penelitian yakni perkebunan yang memiliki luas 1.029,93 Ha atau 69,24% dari luas wilayah lokasi penelitian sedangkan penggunaan lahan Kosong merupakan jenis tutupan lahan terkecil yaitu Lahan Kosong yang luasnya 0,96 ha atau 0,001% dari total lahan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya

luasan dan persentase masing-masing tiap aspek penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

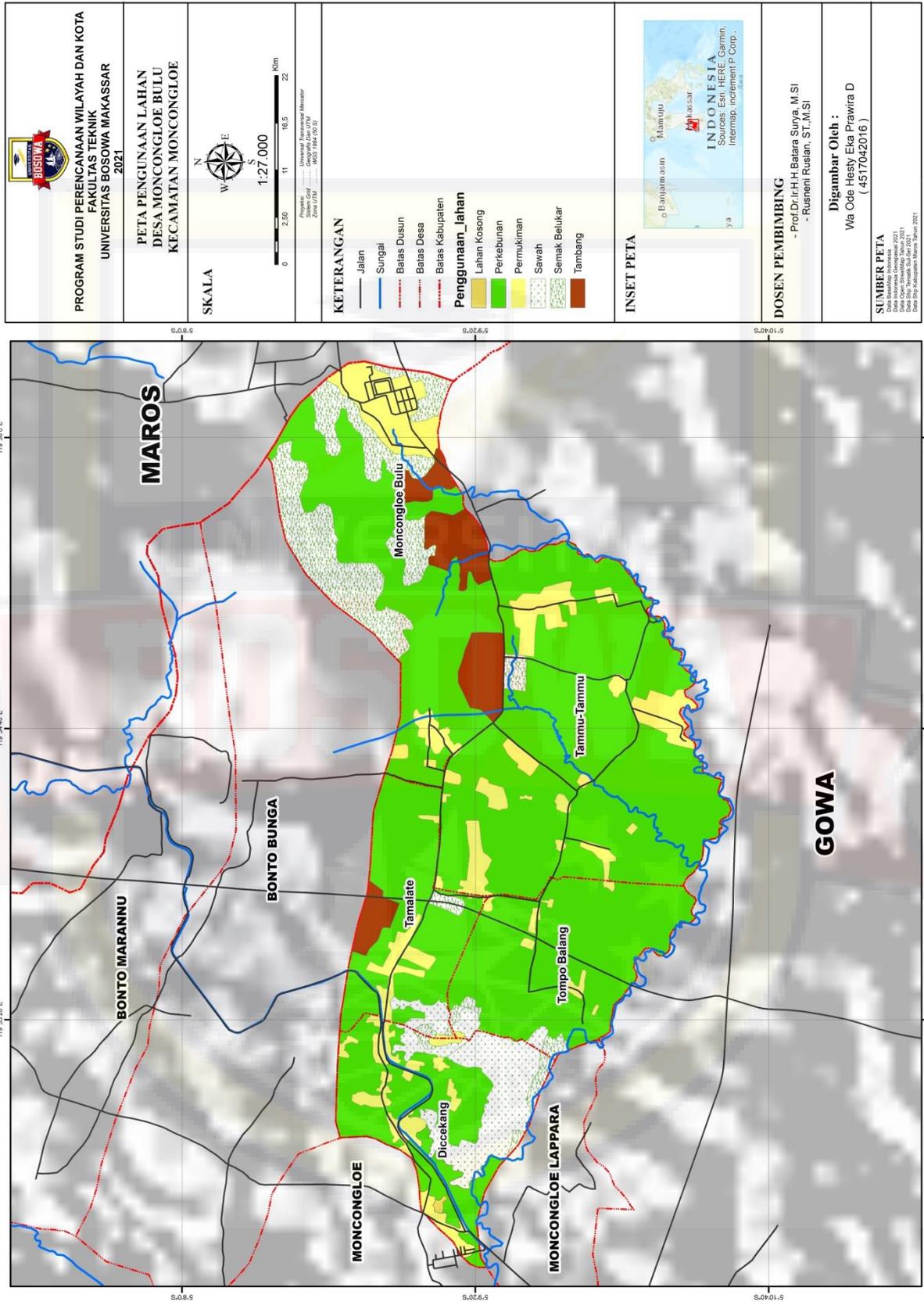
Tabel 4.11 Penggunaan Lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun

2021

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Presentase (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | Lahan Kosong | 0,96 | 0,06 |
| 2. | Perkebunan | 1.029,93 | 69,24 |
| 3. | Permukiman | 169,128 | 11,37 |
| 4. | Sawah | 77,25 | 5,19 |
| 5. | Semak Belukar | 139,16 | 9,36 |
| 6. | Tambang | 71,06 | 4,78 |
| Jumlah | | 1.487,488 | 100 |

Sumber : Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan dari data penggunaan lahan tersebut diketahui penggunaan lahan di Desa Moncongloe Bulu didominasi oleh lahan perkebunan yaitu dengan luas 1.029,93 Ha atau 69,24% dari luas keseluruhan dan untuk permukiman 238,38 Ha atau 19,43%, Semak Belukar dengan luas 139,16 Ha atau 9,36%, Sawah dengan luas sebesar 77,25 Ha atau 5,19%, sedangkan tambang memiliki luas 71,06 Ha atau 4,78 dari luas keseluruhan.



Gambar 4.13 Peta Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu

f. Aspek Prasarana Transportasi Lokasi Penelitian

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi merupakan tolak ukur berkembangnya sektor-sektor kegiatan yang ada pada Desa Moncongloe Bulu. Salah satu dari prasarana transportasi darat yang tersedia di Desa Moncongloe Bulu adalah prasarana jalan yang memiliki peran dan fungsi yang cukup signifikan dalam memperlancar arus transportasi. Prasarana transportasi yang terdapat di Desa Moncongloe Bulu hanya terdapat satu yakni prasarana transportasi darat berupa jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (UU NO. 48 Tahun 2004). Peran jalan ada tiga, yang pertama sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga jalan merupakan kesatuan sistem jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah republik Indonesia. Menurut kelompoknya jalan terbagi atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum berdasarkan fungsinya terbagi empat yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Berikut ini adalah panjang jalur transportasi di Kecamatan Moncongloe, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12 Panjang Jalur Transportasi di Kecamatan Moncongloe

| Jenis Jalan | Panjang Jalur (Km) |
|-------------------------------|---------------------------|
| Kolektor Primer | 17,27 |
| Kolektor Sekunder | 38,91 |
| Lokal Primer | 83,78 |
| Lokal Sekunder | 61,96 |
| Jalan Pejalan Kaki | 20,68 |
| Jalur Pesepeda | 20,68 |
| Jalur Bus Rapid Transit (BRT) | 5,37 |
| Jumlah | 248,65 |

Sumber : PERDA RDTR Kecamatan Moncongloe

g. Aktifitas Pertambangan Galian Golongan C di Lokasi Penelitian

Dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Sektor pertambangan merupakan sektor yang strategis, selain itu bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut (Djajadiningrat 2007).

Aktifitas pertambangan di Desa Moncongloe Bulu pada umumnya menghasilkan material tambang seperti andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir. Desa moncongloe bulu memiliki potensi material seperti andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir yang berlimpah di sekitar desa ini. Material tersebut berasal dari sekitar sumber daya alam desa moncongloe bulu yang mana kondisi seperti ini di manfaatkan oleh para kontraktor pertambangan. Pertambangan di Desa Moncongloe Bulu dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor

lingkungan antara lain faktor geografis, fauna dan flora, kerusakan lahan, polusi udara dan lain-lain.

Untuk mengetahui alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C bekerja sebagai determinan penurunan kualitas lingkungan kawasan kota baru Moncongloe di Desa Moncongloe Bulu, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap keadaan dan potensi yang dimiliki.



Sumber : Hasil Survei lapangan Tahun 2021

Gambar 4.14 Kondisi Tambang Galian Golongan C

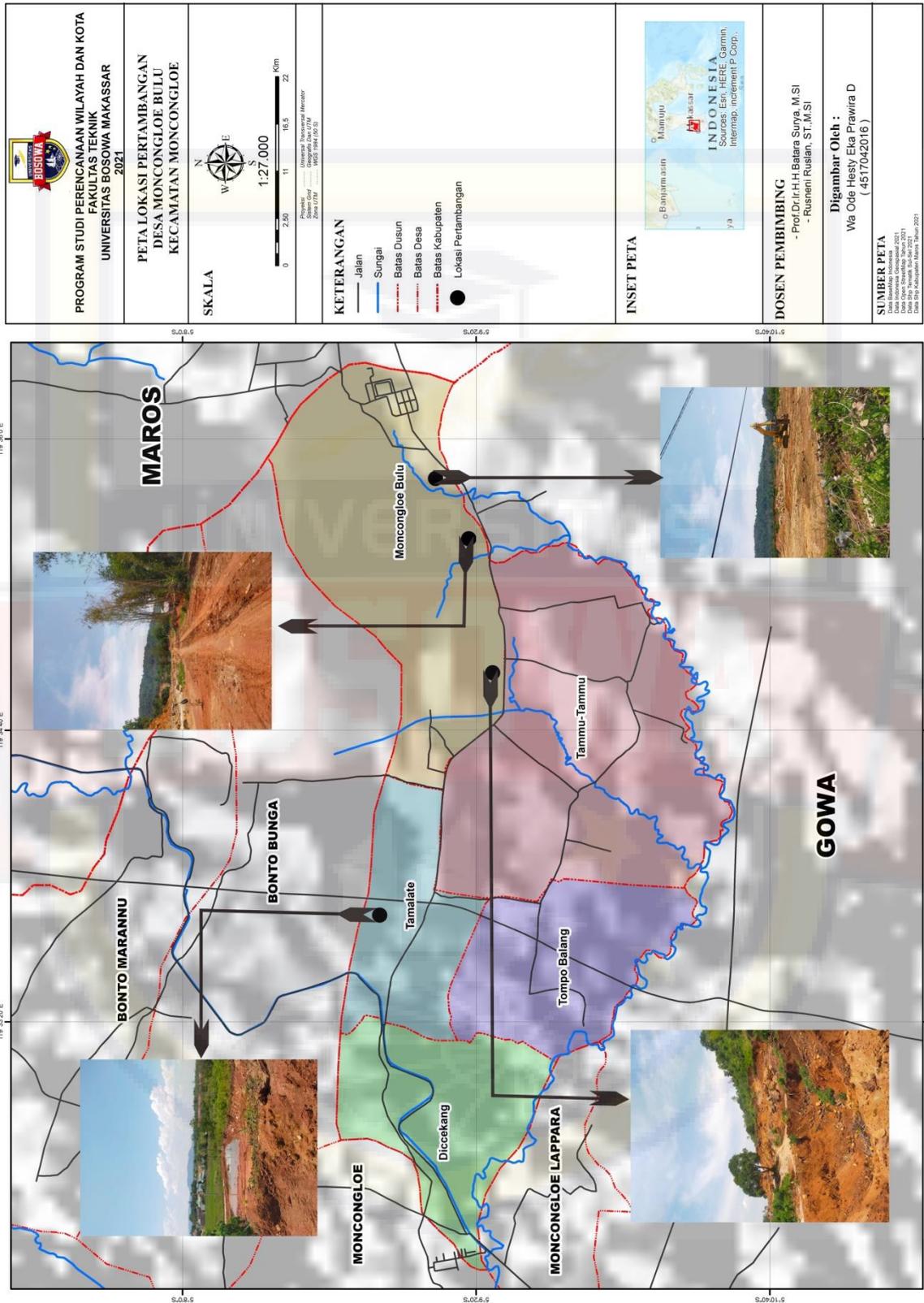
Saat ini terdapat beberapa titik lokasi aktivitas pertambangan di Desa Moncongloe Bulu. Kegiatan tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu menggunakan alat konstruksi yang menyebabkan meningkatnya polusi udara berupa debu dan kondisi jalan yang berlumpur akibat dilalui kendaraan berat seperti truk truk pengangkut hasil tambang sehingga mengganggu masyarakat

yang melintas di Desa Moncongloe Bulu. Tingkat pergerakan kendaraan juga mengakibatkan polusi di Desa Moncongloe Bulu. Hal tersebut merupakan akibat dari keberadaan aktifitas tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu.



Sumber : Hasil Survei lapangan Tahun 2021

Gambar 4.15 Aktivitas Truk pengangkut hasil Tambang



Gambar 4.16 Peta Lokasi Tambang Galian C

D. HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

1. Mengetahui Bagaimana Alih Fungsi Guna Lahan Tambang Galian Golongan C Bekerja Sebagai Determinan Penurunan Kualitas Lingkungan Kawasan Kota Baru Moncongloe

a. Analisis Superimpose (Overlay) / *Spasial Analisis*

Berdasarkan hasil analisis superimpose (Overlay), dalam hal ini adalah layer Desa Moncongloe Bulu pada tahun 2010 dan layer penggunaan lahan Desa Moncongloe Bulu pada tahun 2015. Kemudian layer Desa Moncongloe Bulu pada tahun 2015 dan layer penggunaan lahan Desa Moncongloe Bulu pada tahun 2021. Overlay merupakan salah satu teknik pengambilan kesimpulan dalam SIG.

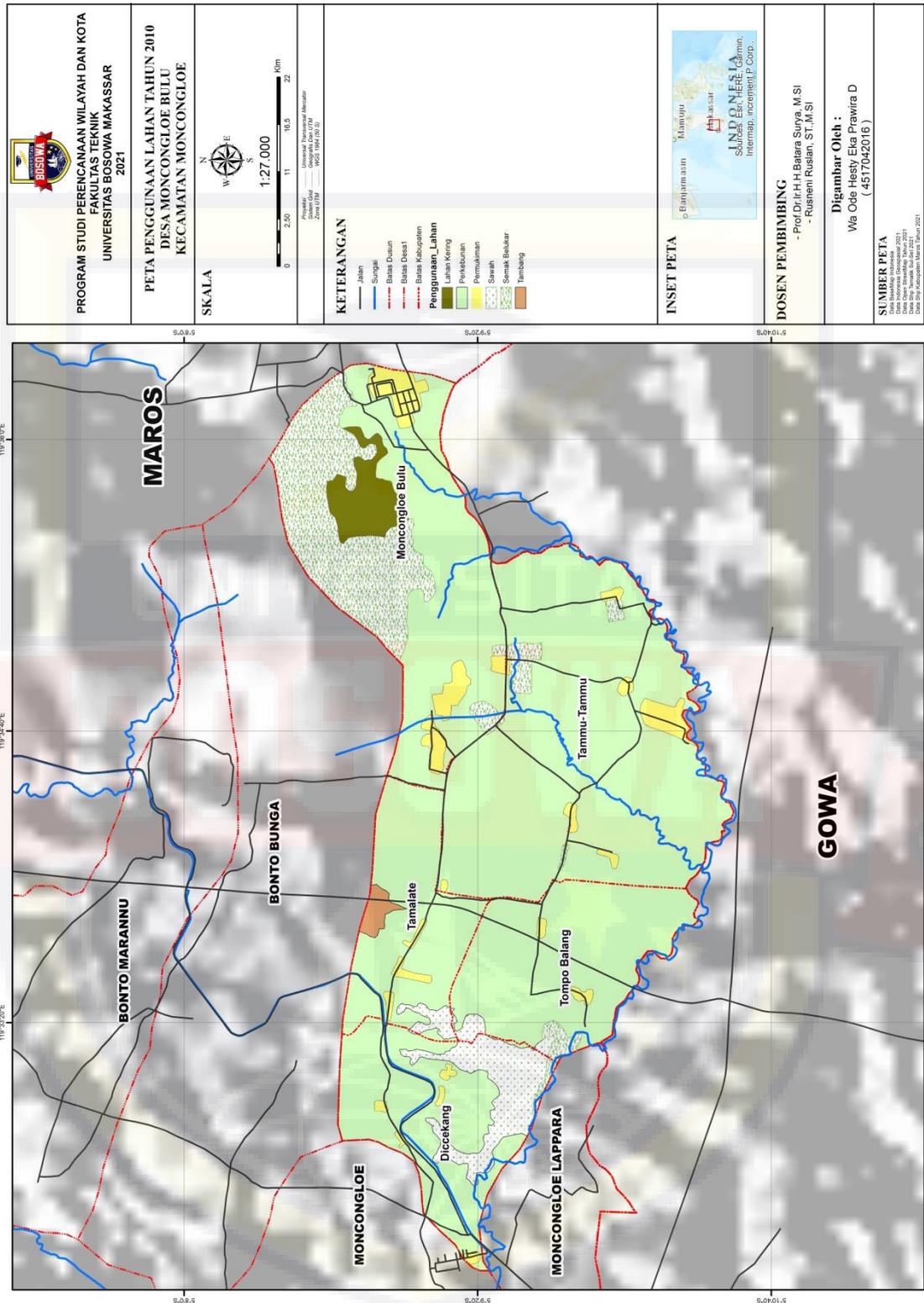
Kawasan penelitian Desa Moncongloe Bulu merupakan kawasan kota baru yang masuk dalam ruang kawasan Metropolitan Mamminasata, yang mana Konsep pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang Metropolitan Mamminasata membagi kawasan perkotaan yang meliputi kota inti, sub-sub pusat kota dan beberapa kota-kota satelit, merupakan suatu pendekatan di dalam mengarahkan ruang kawasan Metropolitan Mamminasata yang dikelilingi oleh kota-kota satelit sesuai dengan kebutuhan pembangunan kawasan Mamminasata itu sendiri.

Berdasarkan hasil survey dan data yang ada, penggunaan lahan di Desa Moncongloe Bulu terdiri atas penggunaan lahan

perkebunan, permukiman, semak belukar, sawah dan pertambangan. Seiring berjalannya waktu maka terjadi pula pergeseran penggunaan lahan. Ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami degradasi atau beralih fungsi. Beberapa pergeseran penggunaan lahan tersebut berupa permukiman dan tambang galian golongan C. Yang mana di Desa Moncongloe Bulu merupakan perkembangan dan pertumbuhan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi komersil yang dilaksanakan oleh pengembang menjadi meluas ke kantung-kantung lahan yang masih kosong ditandai dengan semakin ekspansifnya pembangunan kawasan permukiman dan dominan berlokasi pada area strategis sepanjang koridor jalan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Kondisi pemilikan lahan oleh kelompok elit perkotaan menciptakan ruang secara struktural dikaitkan dengan pola penggunaan lahan. Ketersediaan lahan perkotaan yang semakin terbatas dan semakin kuatnya penguasaan lahan oleh kapitalisme, merupakan determinan faktor yang menyebabkan perubahan fisik spasial kawasan pinggiran kota kearah perubahan yang bersifat revolusioner.

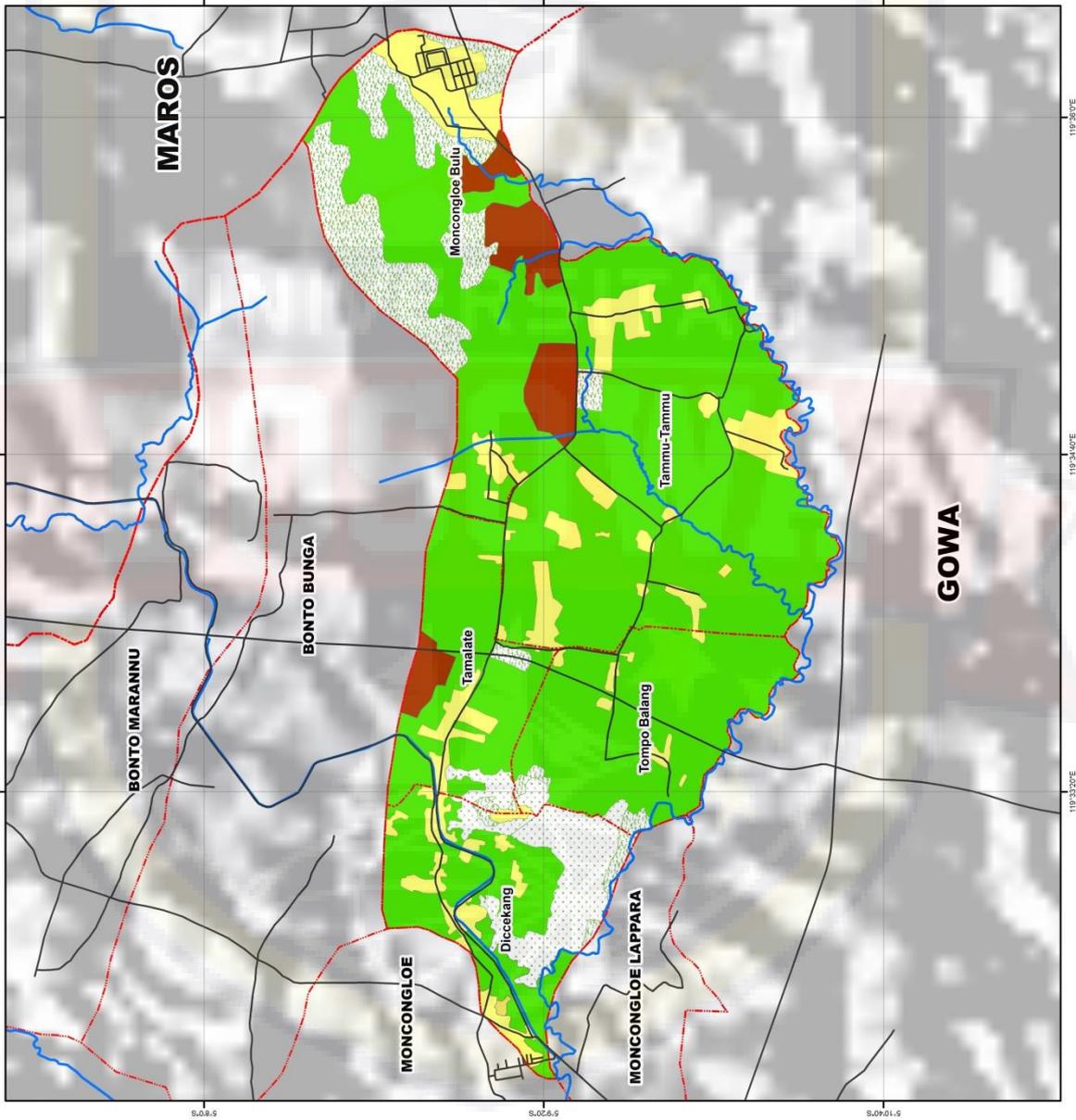
Perubahan penggunaan lahan terjadi akibat adanya potensi tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu yang memicu munculnya industri-industri pertambangan. Transformasi spasial

yang terlihat adalah proses berubahnya bentuk pemanfaatan lahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan tertentu seperti alih fungsi guna lahan pertanian menjadi pemanfaatan lain yakni permukiman dan tambang galian golongan C. Perubahan penggunaan lahan tambang galian golongan C disebabkan oleh masyarakat yang menjual lahannya untuk di lakukan kegiatan tambang karna menurut masyarakat desa Moncongloe keuntungan terhadap nilai ekonomi yang didapatkan sangatlah besar. Kondisi pemilikan lahan oleh kelompok elit perkotaan menyebabkan perubahan variasi sewa lahan dan menciptakan ruang secara struktural dikaitkan dengan pola penggunaan lahan. Berikut adalah peta penggunaan lahan Desa Moncongloe Bulu tahun 2010, 2015 dan 2021.



Gambar 4.17 Peta Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu Tahun 2010

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2021 | PETA PENGGUNAAN LAHAN DESA MONCONGLOE BULU KECAMATAN MONCONGLOE | SKALA  1:27.000 | KETERANGAN <ul style="list-style-type: none"> — Jalan — Sungai — Batas Dusun — Batas Desa — Batas Kabupaten Penggunaan lahan <ul style="list-style-type: none"> — Lahan Kosong — Perkebunan — Permukiman — Sawah — Semak Belukar — Tambang | INSET PETA  INDONESIA Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., Swisstopo |
| DOSEN PEMBIMBING - Prof. Dr. Ir. H. Balara Sunjaya, M.Si - Rusnelli Ruslan, ST, M.Si | | | | Digambar Oleh : Wa Ode Hesty Eka Prawira D (4517042016) |
| SUMBER PETA Data Base Map Indonesia Data Open Street Map Data Base Map Indonesia Data Base Map Indonesia | | | | SUMBER PETA Data Base Map Indonesia Data Open Street Map Data Base Map Indonesia Data Base Map Indonesia |



**Gambar 4.19 Peta Penggunaan Lahan Desa Moncongloe
Bulu Tahun 2021**

Komposisi penggunaan lahan tahun 2010 didominasi oleh perkebunan sebesar 77,76% dari luas wilayah. Selanjutnya berturut-turut : Semak Belukar 11,16%, Sawah 4,35%, Permukiman 3,95%, Lahan Kosong 2,25%, dan Kawasan Pertambangan 0,53%. Sedangkan pada tahun 2015 perkebunan 66,24% Semak Belukar 22,46% Permukiman 5,20% Sawah 4,89% Kawasan Pertambangan 1,13% dan Lahan Kosong 0,08%. Kemudian tahun 2021 tetap didominasi oleh Perkebunan 69,24% Permukiman 11,37% Semak Belukar 9,36% Sawah 5,19% Kawasan Pertambangan 4,78% dan lahan kosong 0,06%. Perubahan penggunaan lahan desa Moncongloe Bulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13 Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun 2010-2015

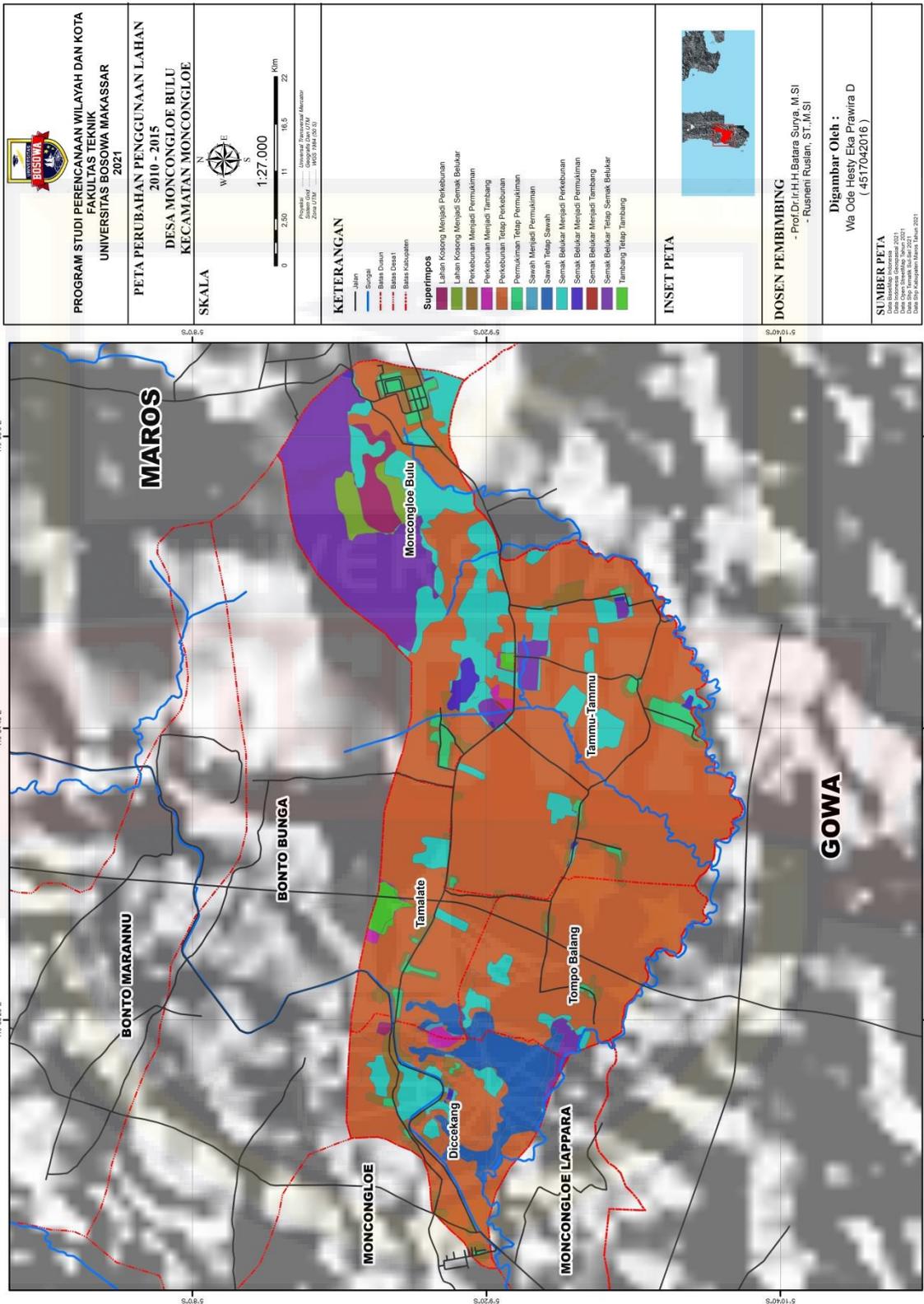
| No | Jenis Penggunaan Lahan | Tahun 2010 | | Tahun 2015 | | Deviasi | |
|----|------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| | | Luas (Ha) | % | Luas (Ha) | % | Luas (Ha) | % |
| 1. | Lahan Kosong | 33,50 | 2,25 | 1,16 | 0,08 | -32,34 | -7,94 |
| 2. | Perkebunan | 1.156,62 | 77,76 | 985,33 | 66,24 | -171,29 | -42,06 |
| 3. | Permukiman | 58,82 | 3,95 | 77,42 | 5,20 | +18,60 | +4,57 |
| 4. | Sawah | 64,69 | 4,35 | 72,68 | 4,89 | +7,99 | +1,96 |
| 5. | Semak Belukar | 165,968 | 11,16 | 334,06 | 22,46 | +168,09 | +41,27 |
| 6. | Tambang | 7,86 | 0,53 | 16,84 | 1,13 | +8,98 | +2,20 |
| | Jumlah | 1.487,488 | 100 | 1.487,488 | 100 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Hasil Analisis Gis 2021

Jenis – jenis penggunaan lahan yang mengalami pengurangan luasan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah perkebunan sebesar 42,06%, dan Lahan kosong sebesar 7,94%, sedangkan penggunaan lahan yang mengalami peningkatan luasan adalah Semak Belukar sebesar 41,27%, Permukiman sebesar 4,57%, kawasan

pertambahan 2,20%, sawah yang mengalami pertambahan luasan 1,96% penambahan luas penggunaan lahan. Pada kawasan pertambahan secara perlahan mengalami peningkatan luasan dalam waktu 5 tahun. Berikut gambar perubahan penggunaan lahan Desa Moncongloe Bulu Tahun 2010-2015:





Gambar 4.20 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Desa Moncongloe Bulu Tahun 2010-2015

Dapat dilihat pada tabel 4.17 bahwa perubahan penggunaan lahan pada tahun 2015-2021 yang mengalami pengurangan adalah Lahan kosong sebesar 0,05%, dan Semak belukar sebesar 49,95%. Kemudian penggunaan lahan yang mengalami peningkatan luasan adalah permukiman sebesar 23,50%, pada tahun 2015-2021 luasan kawasan tambang meningkat secara signifikan sebesar 13,90%. Berikut tabel 4.17 perubahan penggunaan lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun 2015-2021.

Tabel 4.14 Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Moncongloe Bulu Tahun 2015-2021

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Tahun 2015 | | Tahun 2021 | | Deviasi | |
|---------------|------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| | | Luas (Ha) | % | Luas (Ha) | % | Luas (Ha) | % |
| 1. | Lahan Kosong | 1,16 | 0,08 | 0,96 | 0,06 | -0,20 | -0,05 |
| 2. | Perkebunan | 985,33 | 66,24 | 1.029,93 | 69,24 | +44,60 | 11,43 |
| 3. | Permukiman | 77,42 | 5,20 | 169,128 | 11,37 | +91,71 | 23,50 |
| 4. | Sawah | 72,68 | 4,89 | 77,25 | 5,19 | +4,57 | 1,17 |
| 5. | Semak Belukar | 334,06 | 22,46 | 139,16 | 9,36 | -194,90 | -49,95 |
| 6. | Tambang | 16,84 | 1,13 | 71,06 | 4,78 | +54,22 | 13,90 |
| Jumlah | | 1.487,488 | 100 | 1.487,488 | 100 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Hasil Analisis Gis 2021

Dapat diketahui berdasarkan hasil analisis superimpose yang telah dilaksanakan, pada tahun 2010-2015 perubahan penggunaan lahan permukiman mengalami penambahan peluasan seluas 18,60 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan perkebunan, penggunaan lahan kosong, penggunaan lahan sawah, dan penggunaan lahan semak belukar. Penggunaan lahan permukiman yang tidak mengalami perubahan yaitu seluas 58,82 Ha. Perubahan penggunaan lahan semak belukar mengalami peningkatan peluasan seluas 168,09 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan kosong dan penggunaan lahan perkebunan. Penggunaan lahan kawasan pertambangan mengalami peningkatan seluas 8,98 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan perkebunan dan perubahan penggunaan lahan semak belukar. Untuk perubahan penggunaan lahan sawah mengalami penambahan luasan seluas 7,99 Ha.

Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami pengurangan dari tahun 2010-2015 adalah penggunaan lahan perkebunan seluas 171,29 yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan permukiman dan perubahan penggunaan lahan kawasan tambang galian golongan C. kemudian pengurangan penggunaan lahan kosong seluas 32,34 Ha yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan perkebunan dan perubahan penggunaan lahan semak belukar.

Berdasarkan hasil analisis superimpose yang dikerjakan dari tahun 2015-2021 penggunaan lahan permukiman mengalami penambahan peluasan sebesar 91,71 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan perkebunan, sawah, lahan kosong dan semak belukar. Untuk penggunaan lahan perkebunan mengalami penambahan luas seluas 44,60 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan kosong dan perubahan penggunaan lahan semak belukar. Kemudian untuk penggunaan lahan sawah mengalami penambahan luas seluas 4,57 Ha yang diperoleh dari lahan kosong dan semak belukar. Kemudian penggunaan lahan yang mengalami pengurangan peluasan adalah semak belukar seluas 194,90 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan perkebunan, perubahan penggunaan lahan permukiman dan perubahan penggunaan lahan tambang. Untuk perubahan penggunaan lahan kosong pada tahun 2015-2021 penggunaan lahan kosong mengalami pengurangan luasan seluas 0,20 Ha yang diperoleh dari perubahan penggunaan lahan perkebunan, sawah, dan permukiman.

Berdasarkan hasil analisis superimpose (overlay) yang telah dilaksanakan, beberapa interpertasi dapat diajukan. Pertama, pada tahun 2010-2021 terjadi alih fungsi guna lahan di Desa Moncongloe Bulu. Dalam hal ini keterkaitan bentuk pemanfaatan sumber daya lahan dan perubahan spasial yang terlihat pada Desa Moncongloe Bulu adalah proses berubahnya bentuk pemanfaatan sumber daya lahan yang

berorientasi pada kepentingan kedesaan menjadi bentuk pemanfaatan lahan lain ditunjukkan melalui interpretasi pada hasil overlay peta yang menjelaskan bahwa terdapat aktifitas-aktifitas kegiatan baru di Desa Moncongloe Bulu. Hal yang paling signifikan perkembangannya pada perubahan penggunaan lahan kawasan tambang yang mengalami penambahan jumlah luasan seluas 54,22 Ha yang disebabkan perubahan penggunaan lahan perkebunan dan semak belukar. Kawasan tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu pada tahun 2010 memiliki total luasan 7,86 Ha namun terjadi peningkatan total luasan pada tahun 2021 menjadi 71,06 ha. Dapat diketahui bahwa terjadi alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C pada kawasan kota baru moncongloe. Apabila dikondisikan kawasan kota baru Moncongloe mempolakan perkembangan aktivitas permukiman dan perdagangan yang awalnya merupakan fungsi pertanian dengan kata lain terjadinya alih fungsi guna lahan dari fungsi pertanian (agraris) ke lahan fungsi non pertanian (fungsi industrial perkotaan). Sehingga dapat di simpulkan bahwa kelangkaan sumberdaya lahan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan fungsi sumberdaya lahan kawasan pinggiran . Kedua, Desa Moncongloe Bulu memiliki potensi tambang galian C yang menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas tambang yakni menggali dan mengambil material di sekitar gunung menggunakan alat berat seperti eksapator dan mengangkutnya. Aktivitas tambang galian c ini juga mengeruk lahan

perkebunan masyarakat sekitar, yang mengakibatkan hilangnya lahan perkebunan tersebut. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun lahan perkebunan secara perlahan hilang dan beralih fungsi menjadi kawasan tambang galian golongan C. Ketiga, terjadinya alih fungsi guna lahan pada kawasan kota baru di Desa Moncongloe Bulu disebabkan oleh kepemilikan lahan masyarakat yang mana nilai ekonomis pada lahan yang tinggi sehingga bahan galiannya dijual untuk kepentingan ekonominya, berdasarkan hal tersebut terjadinya alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C disebabkan oleh nilai ekonomi yang tinggi. Dari hasil interpretasi yang telah di kaji menunjukkan bahwa terjadi alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C pada kawasan Kota Baru Moncongloe.

b. Analisis Deskriptif Kualitatif

1) Faktor terjadinya kerusakan lahan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan, kondisi lahan di Desa Moncongloe Bulu sangat mengkhawatirkan. Sebagai mana diketahui bahwa penggalian tambang di Desa Moncongloe Bulu digunakan untuk kebutuhan bahan bangunan didalam kota maupun disekitar wilayah pinggiran kota. Penggalian tanah untuk penimbunan telah menyebabkan kerusakan lahan yang sangat tidak menguntungkan bagi lahan di Desa

Moncongloe Bulu maupun lahan sekitarnya. Secara umum terjadi lobang-lobang yang cukup banyak mengakibatkan banyaknya kolam-kolam air pada saat musim penghujan sehingga dapat menimbulkan bencana yang tidak diinginkan kedepannya. Penggalian tanah telah mengakibatkan hilangnya lapisan tanah bagian atas yang relatif subur daripada lapisan tanah bagian bawahnya sehingga apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan akan mengurangi produktivitasnya. Penambangan ini akan mengganggu pembangunan kedepannya karena terhalang oleh lobang-lobang bekas tambang galian. Oleh karena topografi mikro yang tercipta menjadi tidak karuan maka untuk pengembangan permukiman atau peruntukan lainnya pada masa yang akan datang akan mengalami kesulitan. Penggalian yang dilakukan pada persil tertentu sangat mengabaikan efek eksternalitas terhadap persil-persil di sekitarnya yang berakibat mudah terjadinya longsor.

Melihat data hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap salah seorang warga Bapak Kepala Desa Moncongloe Bulu, yang menginformasikan bahwa masyarakat desa Moncongloe Bulu merasa sangat khawatir terhadap adanya aktivitas tambang galian golongan C karena kegiatan tambang pada wilayah pinggiran desa moncongloe bulu menunjukkan gejala yang mengarah

kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan lahan. Setiap upaya pembangunan di kawasan kota Moncongloe selalu menimbulkan dampak positif dan negatif maka para penentu dan pembuat kebijakan hendaknya lebih memperhatikan hal tersebut, pada saat pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan temporal dan spasial yaitu untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta untuk kepentingan wilayah tersebut dan wilayah yang lain.

2) Faktor terjadinya kerusakan jaringan jalan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa aktifitas tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu memberi dampak terhadap kondisi jaringan jalan. Pengangkutan hasil tambang oleh mobil truck juga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan yang disebabkan oleh alat berat dan tanah hasil tambang di Desa Moncongloe Bulu, terutama pada saat musim hujan kondisi jalan di kawasan kota baru moncongloe sangatlah berlumpur hal tersebut dapat membahayakan masyarakat sekitar karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selain itu kondisi jaringan jalan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap lingkungan permukiman di Desa Moncongloe Bulu. Perlu adanya peningkatan kualitas struktur jalan yang awalnya aspal kemudian diubah menjadi struktur beton agar dapat mengurangi

resiko kerusakan jalan yang semakin tinggi di Desa Moncongloe Bulu.

Apabila ingin terciptanya kota baru yang berkelanjutan di Desa Moncongloe Bulu perlunya diterapkan konsep-konsep perencanaan yang berlandaskan *sustainable city*. Selain itu peran aktif masyarakat terhadap pengendalian pemanfaatan ruang juga sangat penting sesuai dengan perda kabupaten Maros no 18 tahun 2008 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya bisa di hindari.

3) Analisis tingkat mobilitas kendaraan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Terdapat beberapa jalur transportasi primer dan sekunder yang berperan besar dalam perkembangan kota baru moncongloe. Jalur tersebut antara lain jalur Mamminasata yang memiliki akses dari/ke Kab. Maros, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar. Akses tersebut menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Akses ini dibangun untuk memudahkan masyarakat yang ingin menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa , Kabupaten Maros ataupun ke kota Makassar. Pembangunan jaringan jalan menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin yang pada saat ini terlihat jelas nampak perkembangan ruang yang terbangun di sepanjang jaringan jalan

tersebut. Menurut teori poros Babock (1932) dalam Yunus (2000) yang menyebutkan keberadaan poros transportasi akan mengakibatkan distorsi pola konsentris, karena sepanjang rute transportasi tersebut berasosiasi dengan mobilitas yang tinggi.

Salah satu faktor yang menentukan perkembangan fungsi ruang di Desa Moncongloe Bulu adalah adanya aktivitas tambang galian golongan C. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa jalur transportasi yang berada di Kawasan kota baru Moncongloe memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangannya. Adanya aktivitas tambang galian golongan C di Desa Moncongloe Bulu dapat mempengaruhi aksesibilitas transportasi karena tingkat pergerakan truck dalam proses pengangkutan hasil tambang menyebabkan padatnya arus lalu lintas. Sehingga dapat diketahui bahwa faktor meningkatnya tingkat pergerakan kendaraan terhadap adanya aktivitas tambang di Desa Moncongloe Bulu memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan jaringan jalan dan mobilitas kendaraan di Desa Moncongloe Bulu.

- 4) Analisis hubungan perubahan pemanfaatan ruang pada kawasan kota baru Moncongloe Bulu terhadap struktur ruang

Berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Proses perkembangan kawasan kota baru moncongloe pada awal pertumbuhannya memiliki bentuk yang kompak dalam wilayah yang kecil. Proses perkembangan kota baru moncongloe pada dasarnya dilihat bahwa kota baru moncongloe yang ditetapkan sebagai Kota Satelit yang dikembangkan dalam konsep Metropolitan Mamminasata. Yang mana pembangunan kota baru Moncongloe memiliki fungsi utama sebagai kawasan kota baru transportasi, perdagangan jasa, RTH, permukiman dan rekreasi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros tahun 2012-2032 disebutkan bahwa Kecamatan Moncongloe merupakan kota satelit KSN (Kawasan Strategis Nasional) Perkotaan Mamminasata bagian timur, sebagai kawasan permukiman baru kawasan strategis Moncongloe, kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor bypass Mamminasata dan kawasan perdagangan. Dalam konteks perkembangan kota baru moncongloe dalam posisinya sebagai kawasan strategis nasional pada akhirnya membentuk pola keterkaitan antarkota sehingga membentuk planologis dan sistem pusat-pusat pelayanan kota.

Proses pembentukan pola keterkaitan ruang kawasan kota baru moncongloe bulu mengkondisikan hubungan interaksi ruang secara fisik, sosial dan ekonomi antara daerah-daerah di sekitar Kota Makassar yang menjadi cukup intensif sehingga membentuk pergerakan orang, barang, dan jasa dan inovasi-inovasi melalui jejaringan prasarana transportasi perkotaan. Ditinjau dari segi prosesnya, dinamika perubahan struktur ruang kawasan kota baru moncongloe diasumsikan akibat dua macam faktor yang mempengaruhi, yaitu proses perkembangan spasial secara sentrifugal dan perkembangan spasial secara sentripetal. Hal ini sejalan dengan konsep teori Yunus (2006), bahwa proses perkembangan spasial secara horisontal menjadi penentu bertambah luasnya areal perkotaan dan makin padatnya areal bangunan pada kawasan pinggiran kota. Pergeseran fungsi ruang pusat Kota Makassar ke kawasan kota baru Moncongloe ini merupakan suatu proses penambahan ruang yang terjadi secara mendatar dengan cara menempati ruang-ruang yang masih kosong. Proses inilah yang kemudian di katakan sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan struktur ruang dan pola ruang kawasan kota baru Moncongloe.

Terbentuknya struktur ruang baru dengan pola konsentris pada kawasan kota baru moncongloe disebabkan oleh faktor

keberadaan koridor jalan utama, yang fungsinya selain menghubungkan kawasan kota baru Moncongloe dengan pusat kota Makassar dan juga kabupaten lain, juga berperan dan mengubah pola perjalanan penduduk kawasan kota baru moncongloe dari asal ketujuan pergerakan. Adanya koridor jalan yang menghubungkan Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar sesuai fakta yang ditemukan berkontribusi positif terhadap terbentuknya pusat-pusat pelayanan dan sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya struktur ruang kota baru Moncongloe. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pergeseran pemanfaatan ruang kawasan kota baru moncongloe ditandai dengan keberadaan fungsi-fungsi baru yang dominan, antara lain keberadaan fungsi permukiman yang berkembang pesat pada kawasan kota baru moncongloe mengkondisikan bahwa alih fungsi guna lahan berdasarkan intensitasnya adalah sangat ditentukan perkembangan kawasan permukiman baru yang sifatnya skala besar. Selain itu, terdapat keberadaan fungsi tambang galian golongan C pada kawasan kota baru Moncongloe sehingga terjadi pula alih fungsi guna lahan yang menyebabkan perkembangan kawasan kota baru perlu ditingkatkan lagi terkait pengendalian pemanfaatan ruangnya agar tidak terjadinya penurunan kualitas lingkungan untuk menghindari bencana pada

masa yang akan datang. Dampak secara langsung akibat perkembangan fungsi-fungsi baru tersebut adalah mendorong perkembangan kawasan kota baru moncongloe kearah modernisasi, suburbanisasi, dan perubahan morfologi kawasan yang sangat beragam. Alih fungsi guna lahan yang berlangsung dari waktu ke waktu mengkondisikan perubahan fisik spasial yang sangat signifikan. Perkembangan permukiman baru, ketersediaan sistem jaringan dan perkembangan sarana dan prasarana pada kawasan kota baru moncongloe mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di laksanakan, beberapa pendapat dapat di ajukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. *Pertama*, secara faktual alih fungsi guna lahan tambang galian golongan C menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga keberlanjutan sumberdaya alam di Desa Moncongloe Bulu semakin sempit serta tidak terciptanya kota yang ramah lingkungan seperti terjadinya polusi udara, kerusakan lahan, dan rusaknya jaringan jalan pada kawasan kota baru Moncongloe. *Kedua*, Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa jalur transportasi yang berada di Kawasan kota baru moncongloe memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangannya. Adanya aktivitas tambang galian golongan C di Desa

Moncongloe Bulu dapat mempengaruhi aksesibilitas transportasi karena tingkat pergerakan truck dalam proses pengangkutan hasil tambang menyebabkan padatnya arus lalu lintas. Sehingga dapat diketahui bahwa faktor meningkatnya tingkat pergerakan kendaraan terhadap adanya aktivitas tambang di Desa Moncongloe Bulu memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan jaringan jalan. *Ketiga*, pergeseran pemanfaatan ruang kawasan kota baru moncongloe ditandai dengan keberadaan fungsi-fungsi baru yang dominan, antara lain keberadaan fungsi permukiman yang berkembang pesat pada kawasan kota baru moncongloe mengkondisikan bahwa alih fungsi guna lahan berdasarkan intensitasnya adalah sangat ditentukan perkembangan kawasan permukiman baru yang sifatnya skala besar. Selain itu, terdapat keberadaan fungsi tambang galian golongan C pada kawasan kota baru Moncongloe sehingga terjadi pula alih fungsi guna lahan yang menyebabkan perkembangan kawasan kota baru perlu ditingkatkan lagi terkait pengendalian pemanfaatannya agar tidak terjadinya penurunan kualitas lingkungan untuk menghindari bencana pada masa yang akan datang.

Dalam menyikapi dampak alih fungsi guna lahan tambang galian golongan c terhadap penurunan kualitas lingkungan di desa moncongloe bulu perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang berupa sistem perizinan yang ketat terhadap pemerintah sekitar dengan

mengikutsertakan masyarakat, karna hal ini memerlukan perhatian khusus agar tidak menimbulkan akibat yang semakin besar dikemudian hari.

2. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Daerah Periurban Berbasis Pengembangan Kawasan Kota Baru

a. Analisis SWOT

Analisis Swot digunakan untuk mengetahui strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru di Desa Moncongloe Bulu. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang dimasa depan. Berikut adalah analisis SWOT untuk perumusan Strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan kota baru di Desa Moncongloe Bulu.

- **Kekuatan**

1. Desa Moncongloe Bulu memiliki potensi sumberdaya lahan terhadap pembangunan kota baru kedepannya
2. Adanya aktivitas baru akibat alih fungsi guna lahan sehingga membuka peluang usaha bagi masyarakat
3. Terdapat jalur transportasi primer dan sekunder yang berperan besar dalam perkembangan kota baru Moncongloe.

- **Kelemahan**

1. Terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas tambang galian golongan C.

- **Peluang**

1. Perda Kabupaten Maros No. 16 tahun 2008 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan
2. Salah satu desa yang merupakan kota satelit KSN Mamminasata
3. Memiliki banyak akses masuk baik dari Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kota Makassar
4. Memiliki rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat desa Moncongloe Bulu

- **Ancaman**

1. Terdapat aktivitas tambang galian golongan C yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan
2. Lemahnya pengendalian penataan ruang yang menyebabkan berubahnya bentuk pemanfaatan sumber daya lahan kawasan kota baru Moncongloe
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 4.15
Strategi Internal

| Faktor Strategi Internal (Kekuatan) | SP | K | SP x K | Bobot |
|--|-----------|----------|---------------|--------------|
| 1. Desa Moncongloe Bulu memiliki potensi sumberdaya lahan terhadap pembangunan kota baru kedepannya | 16 | 4 | 64 | 0,36 |
| 2. Adanya aktivitas baru akibat alih fungsi guna lahan sehingga membuka peluang usaha bagi masyarakat | 12 | 4 | 48 | 0,27 |
| 3. Terdapat jalur transportasi primer dan sekunder yang berperan besar dalam perkembangan kota baru Moncongloe | 16 | 4 | 64 | 0,36 |
| Jumlah | | | 176 | 1,00 |
| Faktor Strategi Internal (Kelemahan) | SP | K | SP x K | Bobot |
| 1. Terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas tambang galian golongan C. | 8 | 4 | 32 | 1,00 |
| Jumlah | | | 32 | 1,00 |

Sumber : Hasil Analisis tahun 2021

Tabel 4.16
Nilai Skor IFAS

| Faktor Strategi Internal | Bobot | Rating (1-4) | Skor |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| Kekuatan (S) | | | |
| 1. Desa Moncongloe Bulu memiliki potensi sumberdaya lahan terhadap pembangunan kota baru kedepannya | 0,36 | 3 | 1,08 |
| 2. Adanya aktivitas baru akibat alih fungsi guna lahan sehingga membuka peluang usaha bagi masyarakat | 0,27 | 1 | 0,27 |
| 3. Terdapat jalur transportasi primer dan sekunder yang berperan besar dalam perkembangan kota baru Moncongloe | 0,36 | 2 | 0,72 |
| Jumlah Skor | | | 2,07 |

| Faktor Strategi Internal | Bobot | Rating | Skor |
|---|--------------|---------------|-------------|
| Kekuatan (S) | | (1-4) | |
| Kelemahan/Permasalahan (W) | Bobot | Rating | Skor |
| | | (4-1) | |
| 1. Terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas tambang galian golongan C. | 1,00 | 2 | 2,00 |
| Jumlah Skor | | | 2,00 |

Sumber : Hasil Analisis tahun 2021

Tabel 4.17
Strategi Eksternal

| Faktor Strategi Eksternal (Peluang) | SP | K | SP x K | Bobot |
|--|-----------|----------|---------------|--------------|
| 1. Perda Kabupaten Maros No. 16 tahun 2008 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan | 8 | 4 | 32 | 0,22 |
| 2. Salah satu desa yang merupakan kota satelit KSN Mamminasata | 12 | 4 | 48 | 0,33 |
| 3. Memiliki banyak akses masuk dari Kab. Gowa, Kab.Maros, dan Kota Makassar | 8 | 4 | 32 | 0,22 |
| 4. Memiliki rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat desa Moncongloe Bulu | 8 | 4 | 32 | 0,22 |
| Jumlah | | | 144 | 1,00 |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Tabel 4.18
Strategi Eksternal

| Faktor Strategi Eksternal (Ancaman) | SP | K | SP x K | Bobot |
|---|-----------|----------|---------------|--------------|
| 1. Terdapat aktivitas tambang galian golongan C yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan | 16 | 4 | 64 | 0,36 |
| 2. Lemahnya pengendalian penataan ruang yang menyebabkan berubahnya bentuk pemanfaatan sumber daya lahan kawasan kota baru Moncongloe | 12 | 4 | 48 | 0,27 |
| 3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 16 | 4 | 64 | 0,36 |
| Jumlah | | | 176 | 1,00 |

Sumber : Hasil Analisis tahun 2021

Tabel 4.19
Nilai Skor EFAS

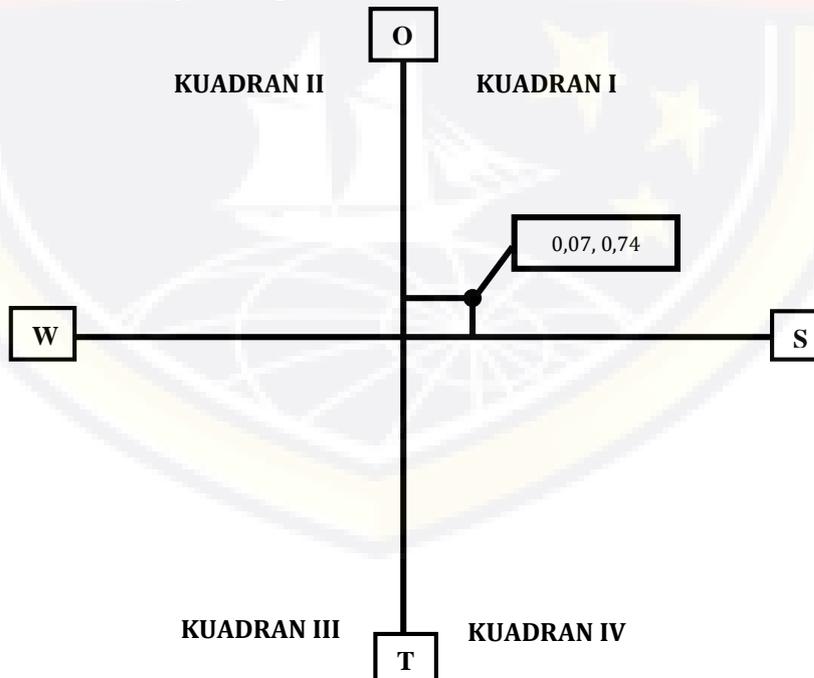
| Faktor Strategi Eksternal | Bobot | Rating (1-4) | Skor |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| Peluang (O) | | | |
| 1. Perda Kabupaten Maros No. 16 tahun 2008 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan | 0,22 | 3 | 0,66 |
| 2. Salah satu desa yang merupakan kota satelit KSN Mamminasata | 0,33 | 4 | 1,32 |
| 3. Memiliki banyak akses masuk dari Kab. Gowa, Kab.Maros, dan Kota Makassar | 0,22 | 2 | 0,44 |
| 4. Memiliki rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat desa Moncongloe Bulu | 0,22 | 3 | 0,66 |
| Jumlah Skor | | | 3,08 |

Tabel 4.19
Nilai Skor EFAS

| Ancaman (T) | Bobot | Rating (4-1) | Skor |
|---|-------|--------------|-------------|
| 1. Terdapat aktivitas tambang galian golongan C yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan | 0,36 | 2 | 0,72 |
| 2. Lemahnya pengendalian penataan ruang yang menyebabkan berubahnya bentuk pemanfaatan sumber daya lahan kawasan kota baru Moncongloe | 0,27 | 2 | 0,54 |
| 3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 0,36 | 3 | 1,08 |
| Total Skor | | | 2,34 |

Sumber : Hasil Analisis tahun 2021

- a. (IFAS) Hasil kekuatan – kelemahan = $2,07 - 2,00 = 0,07$
- b. (EFAS) Hasil peluang – ancaman = $3,08 - 2,34 = 0,74$



Posisi berada pada sumbu $X = 0,07$ dan sumbu $Y = 0,74$ jadi posisi pada kuadran I. Strategi yang digunakan dan diprioritaskan yaitu **Strategi**

SO memanfaatkan peluang untuk mempertahankan kekuatan, yakni :

1. Memanfaatkan seluruh masyarakat yang ada dengan membentuk lembaga masyarakat desa Moncongloe guna merealisasikan perda Kabupaten Maros No.16 tahun 2008 pasal 3 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan terkait penataan ruang terhadap aktifitas tambang galian golongan C.
2. Merancang dan mendesain alih fungsi guna lahan dengan konsep Green Open Space seperti taman lingkungan, taman kota, RTH Jalur hijau, hutan kota, dan pertanian perkotaan terhadap pembangunan desa Moncongloe Bulu sebagai kota satelit yang berintegrasi dengan kota metropolitan MAMMINASATA.
3. Mengembangkan konsep transportasi bebas hambatan terhadap mobilitas kendaraan seperti perbaikan jaringan jalan oleh pemerintah setempat setiap 5 tahun sekali agar akses dari/ke kab. Gowa, Kab. Maros, dan Kota Makassar tetap berfungsi baik.
4. Memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada untuk pembangunan permukiman yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga di Desa Moncongloe Bulu dapat menjadi kota baru dengan menerapkan konsep green building yang ramah lingkungan terhadap Kota Metropolitan Mamminasata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian alih fungsi guna lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Peri Urban (Studi Pengembangan Kawasan Kota Baru Moncongloe Metropolitan Mamminasata), peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Alih fungsi guna lahan yang terjadi berkaitan dengan perubahan spasial yang terlihat pada Desa Moncongloe Bulu hal tersebut berorientasi pada kepentingan kedesaan menjadi bentuk pemanfaatan lahan lain ditunjukkan melalui interpretasi pada hasil overlay peta yang menjelaskan bahwa terdapat aktifitas-aktifitas kegiatan baru di Desa Moncongloe Bulu yaitu aktivitas tambang galian golongan C sehingga hal tersebut mendeterminasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan berupa kerusakan lahan dan rusaknya jaringan jalan di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe.
2. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah periurban berbasis pengembangan kawasan Kota Baru di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten

Maros yakni : Memanfaatkan seluruh masyarakat yang ada dengan membentuk lembaga masyarakat desa Moncongloe guna merealisasikan perda Kabupaten Maros No.16 tahun 2008 tentang penataan dan pendayagunaan kawasan pedesaan terkait penataan ruang terhadap aktifitas tambang galian golongan C, Merancang dan mendesain alih fungsi guna lahan dengan konsep *Green Open Space* seperti taman lingkungan, taman kota, RTH Jalur hijau, hutan kota, dan pertanian perkotaan terhadap pembangunan desa Moncongloe Bulu sebagai kota satelit yang berintegrasi dengan kota metropolitan MAMMINASATA, Mengembangkan konsep transportasi bebas hambatan terhadap mobilitas kendaraan seperti perbaikan jaringan jalan oleh pemerintah setempat setiap 5 tahun sekali agar akses dari/ke kab. Gowa, Kab. Maros, dan Kota Makassar tetap berfungsi baik, Memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada untuk pembangunan permukiman yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga di Desa Moncongloe Bulu dapat menjadi kota baru dengan menerapkan konsep green building yang ramah lingkungan terhadap Kota Metropolitan Mamminasata.

B. SARAN

Dari beberapa uraian kesimpulan yang dibuat maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam hal ini ialah :

1. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan acuan di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dalam upaya pengelolaan pemanfaatan ruang terhadap aktivitas penambangan. Serta kebijakan mengenai perlindungan lingkungan sekitar di kawasan permukiman kota baru.
2. Bagi Masyarakat, perlunya sosialisasi kepada masyarakat setempat dalam penyadaran menjaga fungsi penggunaan lahan kawasan kota baru karena eksploitasi yang berlebihan di Desa Moncongloe bulu dapat membahayakan keberlanjutan lingkungan sekitar dan berpotensi menimbulkan bencana. Perlunya pembentukan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat dalam mengkoordinir pelestarian lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya, dari hasil penelitian ini perlu adanya penelitian lanjutan mengenai variabel lain. Dengan adanya penelitian-penelitian lain diharapkan munculnya temuan baru yang dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acquaye, Egezezer. 1984. "*Principle and Issue,*" *Land Tenure and Rural Productivity*. Suva: SPREP, hal. 150.
- Babcock, P., & Gove, P. B. (1993). *Webster's Third New International Dictionary of the English*
- Bintarto. 1984. *Interaksi Desa Kota*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta
- Branch, Melville C. (1995). *Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Budiono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian (Edisi Ke-2)*. Surakarta: UNS Press.
- Colby, Charles. (1933). "*Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography*" in *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 23.
- Cooke, R.U. and Dorrkamp, J.C., 2003, *Geomorphology in Environmental Management An Introduction*, Oxford: Clavendon Press.
- Djajadiningrat, 2007. *Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat*. [Makalah Seminar Ilmiah Nasional Mining. *Environment and People Welfare*]. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Dwipradnyana, 2014, *Faktor- faktor yang mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap kesejahteraan Petani (Study Kasus di Subak Jdi, Kecamatan Kediri, Tabanan)*, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Dyahwanti, Inarni Nur. 2000. *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing*
- Friedman. J and Alonso.,1964, *Regional Economics Development and Planning*, MT Press, London.

- Ghorab, Hosam K. El dan Heidi A. Shalaby. 2015. *Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt. Alexandria Engineering Journal* 55: 497.
- Giyarsih, Sri Rum. 2009. *TransFormasi Wilayah*. Disertasi. Fakultas Geografi Universitas Gadjah mada Yogyakarta.
- Guckenheimer, P & Holmes J. (1985). *Nonlinear Oscillation Dynamical Systems and Bifurcation of Vector Fields*. New York: Springer.
- Haeruddin, 1997:6, Jayadinata 1999:10., Pengertian Lahan.
- Hardjowigeno, S., Widiatmaka. 2001. *Evaluasi Lahan Dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Bogor: IPB Press.
- Harsono, S. 1995. "Kebijakan Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pemerataan." Makalah dalam Kongres Nasional Forum Mahasiswa Perencanaan Indonesia (FMPI) Tanggal 26-29 November 1995, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Harvey, David, 1973. *Social Justice and the City (Revised Edition)*. Georgia: The University of Georgia Press.
- Henderink, J & Murtomo R. 1988. *Konsep dan Teori Pembangunan*, Nr XII. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Herbert, *Television Production Handbook*, Wadsworth Publishing Co, USA, 1976
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economics Development (Vol. 10)*. University of Texas: Yale University Press.
- Jhingan ML, (1988). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Johara T. Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kamal T.B. Wadji. 1987. *Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh untuk Menganalisa Penggunaan Lahan di Kecamatan Giriwoyo dan Sekitarnya*. Yogyakarta : PUSPIC UGM BAKOSURTANAL.

- Keban, Y. (1995). *Pembangunan Regional (Hand Out)*. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UGM.
- Khadiyanto, Parfi. 2005. *Tata Ruang Berbasis Pada Kesesuaian Lahan*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Koestoer, R. H, 1995, *Perspektif Lingkungan Desa Kota Teori dan Kasus*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Kustanto Nur Adnan. 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota di Yogyakarta*. Tesis S2, Program Magister Perencanaan Wilayah Kota Undip, Tidak dipublikasikan.
- Kustiawan, I. 1997. *Konversi lahan pertanian di Pantai Utara Jawa*. Prisma No. 1 Tahun 1997. Pustaka LP3ES. Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law An Introduntion, (New York-London: W.W.Norton & Company)*.
- Lestari, T. 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. IPB. Bogor.
- Lichfield, D. dan Drabkin, H. Darin. 1980. *"Land Policy and Urban Growth"*. Oxford: Pegamon Press.
- Marangkup PR, Hubert And Eka Ulin S, M. (2006) *Identifikasi Pola Pengembangan Daerah Pinggiran Dan Pola Jaringan Jalan Kota Semarang*. Undergraduate Thesis, F. Teknik Undip.
- Mattsson. 1999. *A model for integrated analysis of household location and travel choices. Transportation Research Part A Policy and Practice 34(5):375-394*
- McGee. 1991. *"The Future of the Asean City: the emergence of Desakota Region"* dalam *Proceeding International Seminar and workhop in the South East Asian City of the Future*, Jakarta. January 21-25, 1990.
- McLaughlin J. L.,1996, *Five Novel Mono-tetrahydrofuran Ring Acetogenins from the Seeds of Annona muricata, Journal of Natural Products, 59 (2), 100-108.*

- Moh. Nazir. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhlisin. 2003 Daerah Periurban. Jurnal Dinamika Permukiman Volume I/Mei
- Mustopa, Z. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak". Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory and Underdeveloped Regions. By Gerald Duckworth & Co. Ltd*
- Notohadiprawiro, T., Soekodarmodjo, S.dan Sukana, E. 2004. Pengelolaan Kesuburan Tanah dan Peningkatan Efisiensi Pemupukan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 01-19hal.
- Orleanti, D. (2000). Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian (Sawah) Menjadi Lahan Perkotaan (Studi Kasus Semarang). Kolokium. Yogyakarta: Program Studi Teknik Planologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang RTRWN Kawasan Mamminasata
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros tahun 2012-2032
- Sakti, H. H. (2016). Fenomena Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Pertumbuhan Aktivitas Perkotaan (Kasus Koridor Ruas Jalan Hertasning - Samata di Makassar - Gowa) Harry Hardian Sakti. Jurnal Palno Madani, 5, 171–179.
- Sandy. 1995 "Tanah Muka Bumi." Dalam Undangundang Pokok Agraria 1960-1995. Jakarta: Indograph Bakhti FMIPIA-UI
- Schmidt, F. H dan Ferguson, J. H. A. 1951. *Rainfall Types Based On Wet and Dry Period Rations for Indonesia With Western New Guinea.* Jakarta: Kementrian Perhubungan Meteorologi dan Geofisika.

- Soemadi, H. 2009. Kebijakan Tata Ruang dan Tata Bangunan. Yogyakarta:STPN.
- Soetarno, W. 2003. Pengaruh Perubahan Fungsi Jalan Terhadap Perkembangan Guna Lahan Pada Koridor Jalan Pamularsih Semarang. Tesis tidak diterbitkan. Program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Su Ritohardoyo, (2013). Penggunaan Dan Tata Guna Lahan. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sugandhy. 2008. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Sukirno, Sadono. 2007. Makro ekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surya, B. (2016). Fenomena Perubahan Fisik Spasial dalam Dinamika Pembangunan di Wilayah Pinggiran Kota. Indonesian Journal of Geography.
- Surya, B. (2018). Transformasi Spasial dan Keberlanjutan Kota Metropolitan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda.
- Tamin, Ofyar, Z. 2000. Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB
- Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Wahyunto, M.Z. Abidin, A. Priyono, dan Sunaryo. 2001. "Studi Perubahan Penggunaan Lahan Di Sub DAS Citarik, Jawa Barat dan DAS

Kaligarang, Jawa Tengah". Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Balai Penelitian Tanah. Bogor.

Whyne-Hammond, Charles. 1995. *Elements of Human Geography*. George & Unwin. London

Yunus, H.S.(2008). Dinamika Wilayah Peri Urban-Determinan Masa Depan Kota. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yunus, HS. (2000). Struktur Tata Ruang Kota.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, HS. (2005). Klasifikasi Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, HS. (2005). Manajemen Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNIVERSITAS

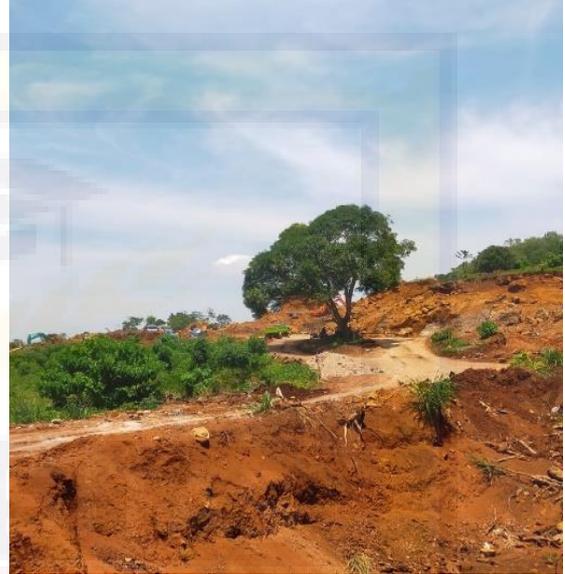
BOSOWA





LAMPIRAN

VISUALISASI KONDISI LOKASI PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wa Ode Hesty Eka Prawira D. lahir di Ujung Pandang 10 April 1999, merupakan putri pertama dari pasangan Darmin dan Wa Ode Haida. Alamat rumah di Asmil Yon Zipur 8/SMG Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan riwayat pendidikan yakni pada SDN 115 Inpres Benteng Gajah (2005-2011); SMP Darul Arqam Gombara (2011-2014); SMA Negeri 21 Makassar (2014-2017). Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Bosowa Makassar melalui jalur reguler dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4 tahun.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kampus. Penulis aktif dalam kepengurusan di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama dua periode sebagai Anggota Bidang Keilmuan periode 2019-2020 dan sebagai Anggota Bidang

Kaderisasi periode 2020-2021, aktif dalam Kepengurusan Bengkel Seni Teknik Universitas Bosowa Selama Dua Periode sebagai Anggota Bidang Departemen Seni Teater periode (2019-2020) dan Sebagai Sekretaris Umum periode (2020-2021), aktif dalam Kepengurusan Forum Komunikasi Dara Daeng Maros selama dua periode sebagai anggota bidang Keagamaan periode (2021-2022) dan sebagai anggota bidang Kebudayaan & Pariwisata periode (2022-2023).

